



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH



TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas Rahmat dan karunia Allah SWT, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023 ini dapat di selesaikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan salah satu saran untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan melalui jajaran Perangkat Daerah Tahun 2023, sebagai konsekwensi dan konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, LAKIP ini juga sebagai kepatuhan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 82 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Substansi pokok LAKIP Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023 ini memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buru Selatan selama Tahun 2023, sekaligus menginformasikan berbagai permasalahan yang di hadapi dan upaya solusi penyelesaiannya sehingga penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dapat mendukung terwujudnya visi misi, tujuan, dan sasaran Kabupeten Buru Selatan.

Namun demikian dalam penyusunan LAKIP ini masih banyak terdapat kekurangan baik menyangkut format maupun substansinya, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan LAKIP dimasa mendatang. Semoga dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan, mampu menunjukkan kinerjanya secara lebih nyata sesuai dengan tupoksi kewenangan masing-masing.

Akhir kata disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP ini dan semoga dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh selama tahun kedepan agar tercipta kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya oleh

masing-masing SKPD Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.

Namrole, Maret 2024


BUPATI BURU SELATAN, 48
Hj. SAFITRI MALIK SOULISA, S.IP.M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023 sebagai bahan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada Tahun 2023, tetapi juga memuat sekurang-kurangnya yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta penyelenggaraan Pemerintahan di masa mendatang. Melalui analisis pengukuran kinerja yang ada di dalam LAKIP tersebut diharapkan segenap stakeholder di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dapat secara Bersama-sama berperan aktif dan bekerja sama guna perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan di masa mendatang.

**PERNYATAAN REVIUW ATAS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	
Ringkasan Eksekutif.....	
Reviu Lakip.....	
Daftar isi.....	
Daftar Gambar.....	
Daftar Tabel	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	7
C. Sistematika Penulisan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
1. Tujuan dan Sasaran.....	9
2. Strategis dan Arah Kebijakan	30
B. Penetapan Kinerja Tahun 2023	42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	45
A. Pengukuran Kinerja.....	45
1. Capaian Indikator Utama	46
2. Capaian Kinerja Sasaran.....	47
3. Capaian Kinerja Tujuan	47
B. Evaluasi dan Analisis.....	48
1. Capaian Indikator Kinerja Utama	38
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran	48
C. Akuntabilitas Capaian Keuangan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.....	89
BAB IV PENUTUP	90
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Buru Selatan	2
Gambar 1.2 Organisasi Perangkat Daerah	6

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Kabupaten Buru Selatan	10
Tabel 2.2	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	16
Tabel 2.3	Strategi Pembangunan dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026	31
Tabel 2.4	Penetapan Kinerja Tahun 2023.	42
Tabel 3.1	Pengukuran dengan Skala Ordinal	46
Tabel 3.2	Indikator Sasaran Terkoneksinya sistim perhubungan sampai pada pusat aktifitas ekonomi masyarakat.....	48
Tabel 3.3	Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Terkoneksinya sistim perhubungan sampai pada pusat aktifitas ekonomi Masyarakat	50
Tabel 3.4	Indikator Sasaran Membangun dan memaksimalkan sarana dan prasarana transportasi laut, darat secara memadai di kabupaten buru selatan.....	50
Tabel 3.5	Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Membangun dan memaksimalkan sarana dan prasarana transportasi laut, darat secara memadai di kabupaten buru selatan.....	51
Tabel 3.6	Indikator Sasaran Terciptanya kluster produk unggulan daerah berbasis agro marine.....	51
Tabel 3.7	Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Terciptanya kluster produk unggulan daerah berbasis agro marine.....	53
Tabel 3.8	Indikator Sasaran Perancangan master plan cluster pengembangan produk perikanan dan pertanian	53
Tabel 3.9	Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Perancangan master plan cluster pengembangan produk perikanan dan pertanian.....	54
Tabel 3.10	Indikator Sasaran Peningkatan Kapasitas Petani, Nelayan (Pengetahuan Teknis, Teknologi, Manajemen Usaha	54
Tabel 3.11	Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Perancangan master plan cluster pengembangan produk perikanan dan pertanian.....	56
Tabel 3.12	Indikator Sasaran Membentuk sentra produk perikanan dan pertanian Sesuai dengan kluster produk unggulan.....	56

Tabel 3.13 Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Membentuk sentra produk perikanan dan pertanian Sesuai dengan kluster produk unggulan.....	58
Tabel 3.14 Indikator Sasaran Membangun sarana dan prasarana secara proporsional dan berkelanjutan untuk mendukung kluster produk unggulan pengembangan di setiap wilayah.....	59
Tabel 3.15 Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Membangun sarana dan prasarana secara proporsional dan berkelanjutan untuk mendukung kluster produk unggulan pengembangan di setiap wilayah.....	60
Tabel 3.16 Indikator Sasaran Membangun sarana Penciptaan lapangan kerja.....	61
Tabel 3.17 Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Penciptaan lapangan kerja.....	62
Tabel 3.18 Indikator Sasaran Pembentukan Dan Penguatan Tatakelola pusat usaha kecil mikro dan menengah sesuai potensi wilayah	63
Tabel 3.19 Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Pembentukan Dan Penguatan Tatakelola pusat usaha kecil mikro dan menengah sesuai potensi wilayah.....	63
Tabel 3.20 Indikator Sasaran Membentuk Kluster Pengembangan UMKM berdasarkan potensi wilayah.....	64
Tabel 3.21 Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Membentuk Kluster Pengembangan UMKM berdasarkan potensi wilayah.....	65
Tabel 3.22 Indikator Sasaran Memfasilitasi tersedianya infrastruktur dan akses modal bagi pengembangan UMKM Produktif	65
Tabel 3.23 Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Memfasilitasi tersedianya infrastruktur dan akses modal bagi pengembangan UMKM Produktif.....	66
Tabel 3.24 Indikator Sasaran Pengadaan tanah untuk peningkatan sarana prasarana pembangunan, perumahan layak huni.....	68
Tabel 3.25 Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Pengadaan tanah untuk peningkatan sarana prasarana pembangunan, perumahan layak huni.....	69
Tabel 3.26 Indikator Sasaran Pendidikan Gratis Dengan pola yang adil, professional berorientasi output.....	70
Tabel 3.27 Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Pendidikan Gratis Dengan pola yang adil, professional berorientasi output.....	71
Tabel 3.28 Indikator Sasaran Membangun Pendidikan anak usia dini (PAUD) untuk mencetak landasan yang kokoh bagi penguatan SDM.....	72
Tabel 3.29 Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Membangun Pendidikan anak usia dini (PAUD) untuk mencetak landasan yang kokoh bagi penguatan SDM.....	72
Tabel 3.30 Indikator Sasaran Tersedianya akses Kesehatan bagi masyarakat.....	73
Tabel 3.31 Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Tersedianya akses Kesehatan bagi masyarakat.....	75
Tabel 3.32 Indikator Sasaran Meningkatkan kebersihan dan Kesehatan	75

	lingkungan di seluruh wilayah buru selatan.....	
Tabel 3.33	Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Meningkatkan kebersihan dan Kesehatan lingkungan di seluruh wilayah buru selatan.....	76
Tabel 3.34	Indikator Sasaran Pembentukan dan pengembangan desa wisata.....	77
Tabel 3.35	Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Pembentukan dan pengembangan desa wisata.....	79
Tabel 3.36	Indikator Sasaran Pengembangan potensi pariwisata daerah secara profesional	79
Tabel 3.37	Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Pengembangan potensi pariwisata daerah secara profesional	80
Tabel 3.38	Indikator Sasaran Mendorong aktifitas keagamaan yang bersinergi dengan budaya lokal.....	80
Tabel 3.39	Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Mendorong aktifitas keagamaan yang bersinergi dengan budaya lokal.....	81
Tabel 3.40	Indikator Sasaran Peningkatan harkat dan martabat serta kualitas hidup bagi penyandang masalah.....	81
Tabel 3.41	Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Peningkatan harkat dan martabat serta kualitas hidup bagi penyandang masalah.....	82
Tabel 3.42	Indikator Sasaran Terwujudnya tata Pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas KKN.....	82
Tabel 3.43	Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Terwujudnya tata Pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas KKN.....	83
Tabel 3.44	Indikator Sasaran Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah dalam menjalankan fungsinya secara efektif dan profesional.....	85
Tabel 3.45	Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah dalam menjalankan fungsinya secara efektif dan profesional.....	86
Tabel 3.46	Indikator Sasaran Mengoptimalkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur serta kualitas layanan yang prima.....	86
Tabel 3.47	Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah dalam menjalankan fungsinya secara efektif dan profesional.....	87
Tabel 3.48	Indikator Sasaran Menyederhanakan alur birokrasi dengan system satu atap guna meningkatkan pelayanan public yang efisien dan efektif.....	88
Tabel 3.49	Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Menyederhanakan alur birokrasi dengan system satu atap guna meningkatkan pelayanan public yang efisien dan efektif.....	89
Tabel 3.50	Indikator Sasaran Melakukan praktek pengelolaan keuangan daerah yang adil, transparan.....	90
Tabel 3.51	Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Melakukan praktek pengelolaan keuangan daerah yang adil, transparan	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan paradigma baru telah memberikan perubahan yang mendasar dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada hakekatnya perubahan tersebut diarahkan untuk lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mensejahterakan masyarakat baik melalui peningkatan daya saing daerah maupun peningkatan pelayanan publik .

Sejalan dengan hal tersebut, isu strategis yang mengemuka dewasa ini dan tengah berkembang disektor publik yaitu semakin menguatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintahan di daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel. Konsekuensi dilaksanakannya pelayanan publik yang akuntabel mengharuskan Pemerintah Daerah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan manajemen kinerja yang sinergis dan terintegrasi mencakup pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang menegaskan kembali pentingnya sinergitas antara aspek keuangan dan kinerja dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas , fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2023 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian visi dan misi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) tahun 2023.

1. KONDISI GEOGRAFIS

Secara astronomis, Kabupaten Buru Selatan terletak diantara $2^{\circ}25'$ - $3^{\circ}5'$ Lintang Selatan dan $121^{\circ}221'$ - $125^{\circ}21'$ Bujur Timur dan secara geografis dibatasi oleh Laut Seram di sebelah utara, Laut Banda disebelah Selatan dan Barat, serta selat Manipa dan Kabupaten Buru disebelah Timur.

Kabupaten Buru Selatan mempunyai luas sekitar 5.060 Km^2 dan wilayahnya hampir meliputi sebagian dari pulau Buru dan pulau-pulau lain disekitarnya, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni atau sekitar 4.754 km^2 atau 93,95% dari luas Kabupaten.

Adapun batas administrasi wilayah Kabupaten Buru Selatan adalah sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Kabupaten Buru dan Laut Seram
- Sebelah Timur: Kabupaten Buru dan Selat Manipa
- Sebelah Selatan : Laut Banda
- Sebelah Barat : Laut Banda

Gambar 1.1
Peta Kabupaten Buru Selatan



2. KONDISI DEMOGRAFI

Penduduk Kabupaten Buru Selatan menurut hasil registrasi penduduk (data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semester 2 Tahun 2023) mencapai 79.017 jiwa yang terdiri dari laki-laki 39.952 jiwa (50.56 %) dan perempuan 39.065 (49.44 %).

Sementara itu dari distribusi penduduk menurut kecamatan, memperlihatkan Kecamatan Namrole adalah yang paling banyak penduduknya yaitu sebesar 22.373 (28,31 %

dari total jumlah penduduk Kabupaten Buru Selatan) , diikuti Kecamatan Waesama sebesar 15.852 jiwa (20.06 %) kemudian Kecamatan Leksula sebesar 14.267 jiwa (18.05 %). Sedangkan yang berpenduduk paling sedikit adalah Kecamatan Fena Fafan, yaitu sebesar 4.309 jiwa (5,45 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Buru Selatan).

Gambar 2.1

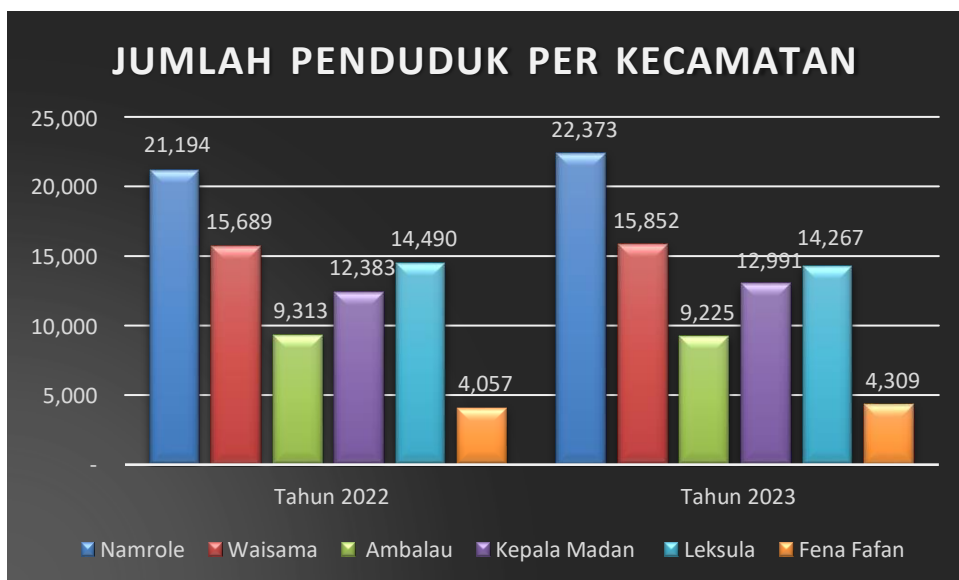
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin



Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

Gambar 2.2

Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2023



Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3. SDM PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN

Pemerintah Kabupaten Buru Selatan memiliki SDM yang beragam. Jumlah PNS tahun 2023 seluruhnya sebanyak 2910 orang yang terdiri dari PNS laki-laki sebanyak 1211 orang dan PNS perempuan sebanyak 1699 orang. Menurut tingkat pendidikan sebagian besar PNS berpendidikan DIV/S-1. Jumlah SDM di atas dapat di kategorikan sebagaimana tabe di bawah ini.

Diagram 3.1

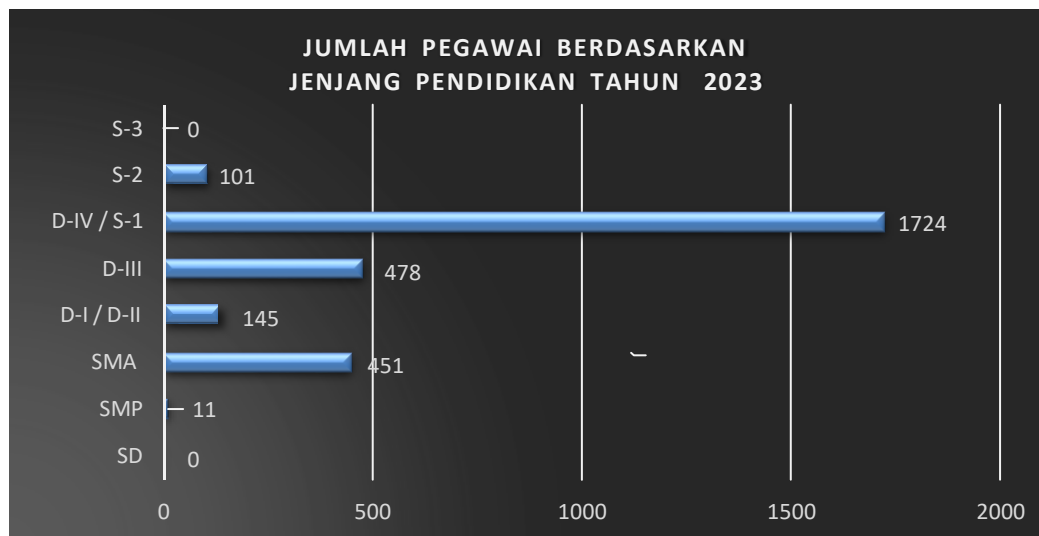
Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin



Sumber Data : BKPSDM

Diagram 3.2

Jumlah pegawai berdasarkan jenjang Pendidikan



Sumber Data : BKPSDM

Diagram 3.3
Jumlah pegawai berdasarkan

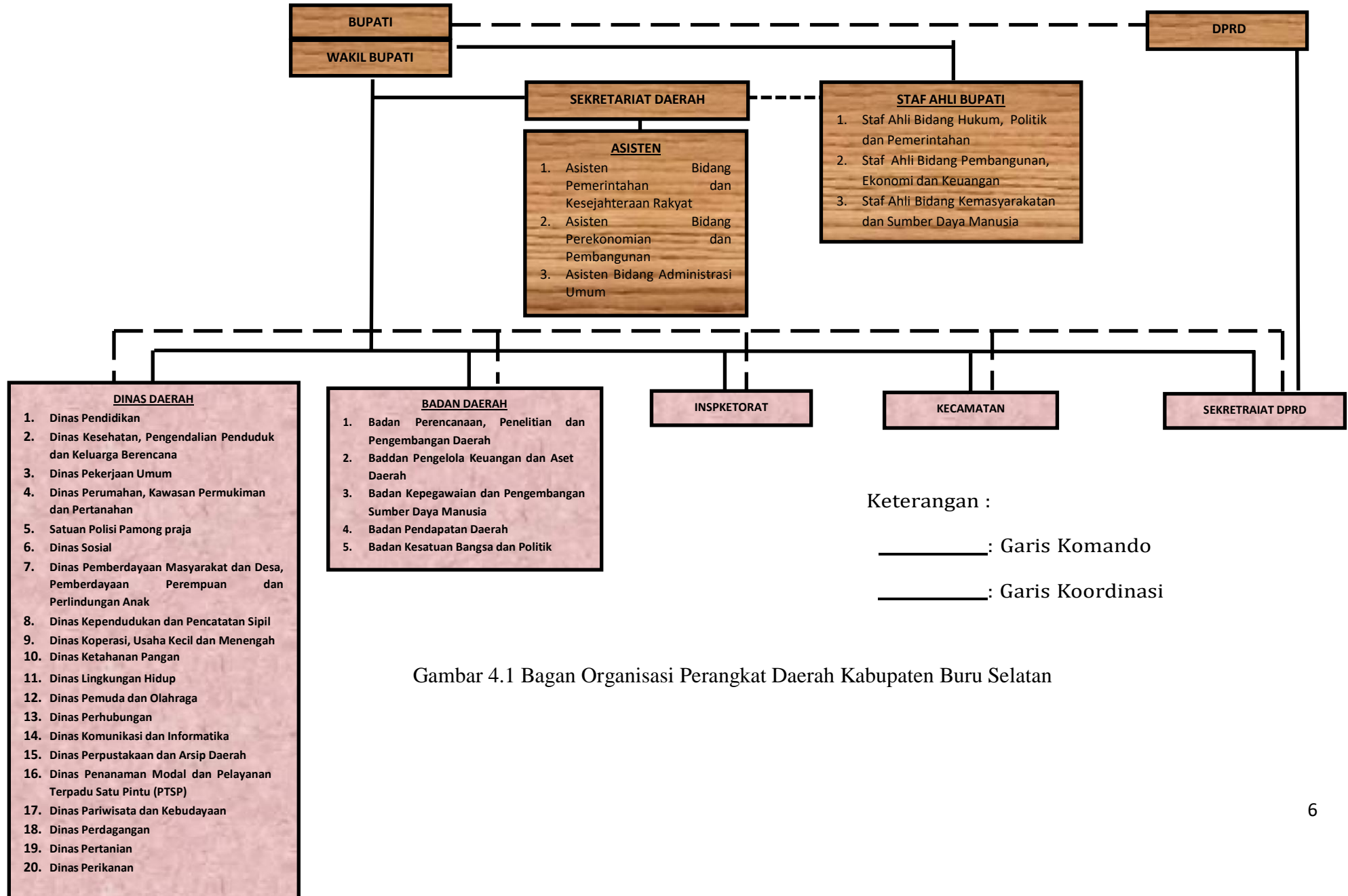


Sumber Data : BKPSDM

4. STRUKTUR ORGANISASI

Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875). Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dipimpin oleh seorang Bupati yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati. Adapun tugas wewenang, kewajiban dan hak Bupati sebagai Kepala Daerah diatur dalam ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diikuti dengan peraturan pelaksana lainnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Buru Selatan maka dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan terlihat sebagaimana bagan organisasi perangkat daerah kabupaten Buru Selatan sebagaimana Gambar 4.1.

BAGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN



Gambar 4.1 Bagan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023

adalah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Tujuan Penyusunan LAKIP Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023 sebagai alat untuk mendapatkan masukan demi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LAKIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LAKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayan publik.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Buru Selatan disusun dengan sistematika mengacu pada

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

■ BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

■ BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menyajikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

■ BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi dan Prestasi/ Penghargaan yang diraih.

■ BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam kerangka sistem pembangunan nasional, maka seluruh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Selain itu, Pemerintah Daerah juga harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 tahunan. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan telah menetapkan RPJPD Kabupaten Buru Selatan 2009-2029 dengan Perda Nomor 2 Tahun 2012 dan RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026 dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dimanifestasikan dalam bentuk dokumen RPJMD. RPJMD Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021, mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diuraikan dalam bab ini, sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2023 beserta program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan tersendiri dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023.

VISI

Visi adalah suatu pandangan yang terdapat pada organisasi atau lembaga yang mempunyai pandangan jauh tentang tujuan-tujuan dan apa yang harus dilakukan untuk menggapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menetapkan visi daerah :

“ MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN BURU SELATAN SECARA BERKELANJUTAN SEBAGAI KABUPATEN YANG RUKUN, ADIL DAN SEJAHTERA BERBASIS AGRO-MARINE “

MISI

Misi adalah mendeklarasikan tentang apa yang harus dikerjakan oleh organisasi atau lembaga dalam mewujudkan Visi. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan visi, maka ditetapkan misi Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan sebagai berikut:

1. Memperkuat sektor perhubungan untuk peningkatan aktifitas ekonomi produktif masyarakat.
2. Pembentukan pusat pengembangan produksi perikanan dan pertanian berbasis potensi unggulan wilayah.
3. Penguatan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan pusat pengembangan ekonomi kecamatan dengan mempertimbangkan geostrategis, geopolitik dan potensi sumber daya wilayah.
4. Pengembangan sektor pendidikan berbasis potensi/komoditas unggulan daerah.
5. Perluasan akses kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.
6. Penguatan adat, budaya dan nilai-nilai kearifan lokal sebagai modal sosial untuk mendorong akselerasi pembangunan pariwisata daerah.
7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan bersih dari KKN.

1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam rangka mencapai misi. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan dari suatu tujuan yang terukur formulasinya. Rumusan tujuan yang dijabarkan dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buru Selatan sebagaimana berikut.

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Kab Buru Selatan
Tahun 2021-2026 menurut Misi

Misi 1		Memperkuat sektor perhubungan untuk peningkatan aktifitas ekonomi produktif masyarakat.	
Tujuan		Sasaran	
1.1	Terkoneksinya system perhubungan sampai pada pusat aktifitas ekonomi masyarakat	1	Membangun dan memaksimalkan sarana dan prasarana transportasi laut maupun darat yang memadai dan terkoneksi di seluruh wilayah buru selatan
		2	Membangun infrastuktur perekonomian di pedesaan untuk mendorong kelancaran proses produksi, konsumsi dan distribusi secara integrative.
		3	Peningkatan produktifitas usaha perikanan rakyat, serta pemberdayaan masyarakat pesisir/pulau kecil
		4	Peningkatan kualitas dan keterampilan petani dan nelayan, baik pada aspek pengetahuan teknis, penguasaan teknologi maupun manajemen usaha.
		5	Pengembangan wisata bahari, wisata budaya dan wisata sejarah yang berbasis di pedesaan
Misi 2		Pembentukan pusat pengembangan produk perikanan dan pertanian berbasis potensi unggulan wilayah.	
Tujuan		Sasaran	
1.1	Terciptanya klaster produk unggulan daerah berbasis agro-marine	1	Perancangan master plan klaster pengembangan produk perikanan dan pertanian
		2	Membentuk sentra produk perikanan dan pertanian pada klaster-klaster pengembangan

		3	Membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran aktifitas pada klaster-klaster pengembangan sesuai dengan skala prioritas produk unggulan di setiap wilayah
		4	Penciptaan lapangan kerja dengan jalan meningkatkan keterampilan masyarakat dengan mendorong usaha-usaha kreatif sesuai potensi yang dimiliki di setiap desa
		5	Menjamin system pemasaran dan quality control bagi produk yang dikembangkan demi terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat dan tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat buru selatan, profesional dan keadilan.
Misi 3	Penguatan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan pusat pengembangan ekonomi kecamatan dengan mempertimbangkan geostrategis, geopolitik dan potensi sumber daya wilayah.		
Tujuan		Sasaran	
1.1	Tumbuhnya pusat usaha kecil, mikro dan menengah sesuai potensi wilayah	1	Membentuk klaster-klaster pengembangan ekonomi berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah yang berbasis pada pengembangan bisnis agro-marine
		2	Membangun mental dan kemampuan wirausaha di kalangan masyarakat, terutama generasi muda
		3	Memfasilitasi tersedianya akses modal yang memadai bagi perkembangannya UMKM terutama di sektor produktif

		4	Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi berkembangnya UMKM, meliputi infrastruktur, informasi pasar, kemudahan birokrasi serta keringanan fiscal.
		5	Mengkonsolidasi perencanaan tata ruang wilayah secara terpadu, sinergis dan komprehensif dalam menjamin keseimbangan ekosistem dan ekologis lingkungan hidup untuk menjamin penyelenggaraan pembangunan secara berkelanjutan, melalui pengusulan dokumen-dokumen perencanaan tata ruang meliputi : RTRW, RDTR, RTBL, dan master plan sector lainnya.
		6	Pengadaan tanah untuk sarana prasarana pembangunan, peningkatan pembangunan perumahan layak huni bagi masyarakat, melalui program perumahan swadaya dan perumahan khusus.
Misi 4	Pengembangan sektor Pendidikan mendorong peningkatan daya saing daerah		
Tujuan		Sasaran	
1.1	Terciptanya SDM berbasis potensi unggulan daerah	1	Pendidikan gratis dengan pola yang adil, professional berorientasi output
		2	Mengembangkan Pendidikan anak usia dini (PAUD) untuk mencetak landasan yang kokoh bagi penguatan SDM Buru Selatan di masa depan
		3	Penyediaan infrastruktur Pendidikan yang memadai, termasuk peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan

			pengembangan teknologi informasi di bidang pendidikan
		4	Membangun sekolah-sekolah kejuruan dari level sekolah lanjutan pertama sampai sekolah lanjutan atas, yang berbasis pada potensi wilayah buru selatan
		5	Membangun sistem Pendidikan tinggi secara fokus dan professional yang berorientasi pada potensi unggulan daerah melalui pengembangan konsep kemitraan segitiga antara pemerintah, pengusaha dan perguruan tinggi
Misi 5	Perluasan akses kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.		
	Tujuan	Sasaran	
1.1	Tersedianya akses Kesehatan bagi masyarakat	1	Pelayanan Kesehatan gratis disertai upaya penyediaan infrastruktur dan SDM Kesehatan yang memadai hingga ketingkat desa untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan yang berkualitas
		2	Optimalisasi riset dan development di bidang kesehatan untuk mengantisipasi isu-isu kesehatan dan perkembangan penyakit menular yang dihadapi masyarakat
		3	Meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan di seluruh wilayah buru selatan

Misi 6		Penguatan adat, budaya dan nilai-nilai kearifan lokal sebagai modal sosial untuk mendorong akselerasi pembangunan pariwisata daerah	
Tujuan		Sasaran	
1.1	Majunya pariwisata daerah berbasis kearifan lokal	1	Pengembangan potensi pariwisata daerah secara professional yang bersinergi dengan adat, budaya dan kearifan lokal masyarakat Buru Selatan
		2	Mengupayakan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengembangan budaya lokal guna terjaminnya eksistensi budaya buru selatan yang kaya dan beragam.
		3	Mendorong aktifitas keagamaan yang bersinergi dengan budaya lokal guna terbentuknya jati diri dan kearifan masyarakat.
		4	Memperkuat sistem kelembagaan adat
		5	Menggerakkan aktifitas kepemudaan di tingkat desa sesuai bakat dan kebutuhannya, baik pada bidang keagamaan, olahraga, sosial, maupun seni dan budaya
		6	Peningkatan harkat dan martabat serta kualitas hidup bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
		7	Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam membangun kesejahteraan sosial sebagai inverstasi modal sosial
		8	Memperkuat ketahanan sosial dalam upaya memperkecil kesenjangan sosial, dengan memberikan perhatian kepada warga masyarakat dalam pembinaan semangat kesetiakawanan sosial dan

			kemitraan semangat kepahlawanan serta wawasan kebangsaan
Misi 7	Reformasi birokrasi dan penerapan tata Kelola pemerintahan yang efektif, professional dan bersih dari KKN		
Tujuan		Sasaran	
1.1	Terwujudnya tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas KKN	1	Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah dalam menjalankan fungsinya secara efektif dan profesional
		2	Mengoptimalkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur serta kualitas layanan yang prima bagi masyarakat
		3	Menyederhanakan alur birokrasi dengan sistem satu atap guna meningkatkan pelayanan publik yang efisien dan efektif.
		4	Optimalisasi peran putra daerah yang berkualitas secara adil dan berimbang untuk mengisi posisi-posisi strategis di birokrasi, khususnya posisi yang berhubungan langsung dengan masyarakat
		5	Melakukan praktek pengelolaan keuangan daerah yang adil, transparan dan berpihak pada masyarakat

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap Lembaga atau Instansi Pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Memperkuat sektor perhubungan untuk peningkatan aktivitas ekonomi produktif Masyarakat (MISI 1)	Terkoneksinya sistim perhubungan sampai pada pusat aktifitas ekonomi masyarakat	Terkoneksinya sistim perhubungan	1. Membangun dan memaksimalkan sarana dan prasarana transportasi laut maupun darat yang memadai dan terkoneksi di seluruh wilayah Buru Selatan	Terbangunnya Jumlah pelabuhan laut (unit)
					Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (km)
				2. Membangun infrastruktur perekonomian di pedesaan untuk mendorong kelancaran proses produksi, konsumsi dan distribusi secara integrative	Peningkatan usaha mikro
				3. Peningkatan produktivitas usaha perikanan rakyat serta pemberdayaan Masyarakat pesisir/pulau kecil	Peningkatan Produksi Perikanan

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				4. Peningkatan kualitas dan keterampilan petani dan nelayan, baik pada aspek pengetahuan teknis, penguasaan teknologi maupun manajemen usaha.	Peningkatan Kegiatan pelatihan Perikanan
				5. Pengembangan wisata bahari, wisata budaya dan wisata sejarah yang berbasis di pedesaan	Meningkatnya Jumlah Kunjungan wisatawan
2	Pembentukan Pusat Pengembangan Produk Perikanan dan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Wilayah (MISI 2)	Terciptanya klaster produk unggulan daerah berbasis agro marine	Adanya pusat unggulan pertanian dan perikanan	1. Perancangan master plan cluster pengembangan produk perikanan dan pertanian 2. Membentuk sentra produk perikanan dan pertanian pada kluster-kluster pengembangan ekonomi kerakyatan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah 3. Membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran aktivitas pada kluster-kluster pengembangan sesuai dengan skala	Tersedianya master plan pengembangan produk perikanan dan pertanian Terbentuknya sentra produksi berbasis potensi sumberdaya alam wilayah Terbangunnya sarana prasarana penunjang potensi unggulan daerah

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				prioritas produk unggulan disetiap wilayah	
				4. Penciptaan lapangan kerja dengan jalan meningkatkan ketrampilan masyarakat dengan mendorong usaha-usaha kreatif sesuai dengan potensi yang dimiliki di setiap desa	Terciptanya SDM berbasis potensi unggulan daerah
				5. Menjamin sistem pemasaran dan quality control bagi produk yang dikembangkan demi terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat dan tercapainya Tingkat kesejahteraan masyarakat Buru Selatan secara professional dan berkeadilan	Terciptanya sistim dan quality control dalam pengembangan produk unggulan daerah

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
3	Penguatan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan pusat pengembangan ekonomi kecamatan dengan mempertimbangkan geostrategic, geopolitik, dan potensi sumberdaya wilayah (MISI 3)	Tumbuhnya pusat usaha kecil mikro dan menengah sesuai potensi wilayah	Terbentuknya kelompok usaha mikro kecil dan menengah	1. Membentuk kluster-kluster pengembangan ekonomi berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah yang berbasis pada pengembangan bisnis agro-marine.	Terbentuknya klaster usaha berbasis potensi wilayah
				2. Membangun mental dan kemampuan wirausaha di kalangan masyarakat, terutama generasi muda.	Terwujudnya jiwa kewirausahaan generasi muda

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				3. Memfasilitasi tersedianya akses modal yang memadai bagi berkembangnya UMKM terutama di sektor produktif.	Terbentuknya sistim dan standarisasi akses permodalan
				4. Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi berkembangnya UMKM, meliputi penyediaan infrastruktur, informasi pasar, kemudahan birokrasi serta keringanan fiscal.	

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				5. Mengkonsolidasi perencanaan tata ruang wilayah secara terpadu, sinergis dan komprehensif dalam menjamin keseimbangan ekosistem dan ekologis lingkungan hidup untuk menjamin penyelenggaraan pembangunan secara berkelanjutan, melalui pengusulan dokumen-dokumen perencanaan tata ruang meliputi: RTRW, RDTR, RTBL dan Master Plan sektor lainnya.	Tersedianya dokumen perencanaan spasial

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				6. Pengadaan tanah untuk sarana prasarana pembangunan, Peningkatan pembangunan perumahan layak huni bagi masyarakat, melalui program perumahan swadaya dan perumahan khusus	Tersedianya lahan untuk perumahan
4	Pengembangan sektor pendidikan mendorong peningkatan daya saing daerah (MISI 4)	Terciptanya SDM berbasis potensi unggulan daerah	Terkelolanya potensi unggulan daerah	<p>1. Pendidikan gratis dengan pola yang adil, profesional berorientasi output</p> <p>2. Mengembangkan pendidikan anak usia dini (PAUD) untuk mencetak landasan yang kokoh bagi penguatan SDM Buru Selatan di masa depan.</p>	<p>Tingginya angka partisipasi sekolah</p> <p>Tersedianya lembaga PAUD</p>

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				3. Penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai, termasuk peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan pengembangan teknologi informasi di bidang pendidikan	Tersedianya infrastruktur, SDM, dan pemanfaatan IT bidang pendidikan
				4. Membangun sekolah-sekolah kejuruan dari level sekolah lanjutan pertama sampai sekolah lanjutan atas, yang berbasis pada potensi wilayah Buru Selatan	Terbangunnya sekolah kejuruan berbasis potensi wilayah
				5. Membangun sistem pendidikan tinggi secara fokus dan profesional yang berorientasi pada potensi unggulan daerah melalui pengembangan konsep kemitraan segitiga antara pemerintah, pengusaha dan perguruan tinggi	Terselenggaranya sistim pendidikan tinggi di Buru Selatan

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
5	Perluasan akses kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat (MISI 5)	Tersedianya akses kesehatan bagi masyarakat	Terlayannya kebutuhan kesehatan masyarakat	1. Pelayanan kesehatan gratis, disertai upaya penyediaan infrastruktur dan SDM kesehatan yang memadai hingga ke tingkat desa untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.	Tersedianya infrastruktur, SDM dan pelayanan kesehatan memadai sampai ketingkat desa
				2. Optimalisasi riset dan development di bidang kesehatan untuk mengantisipasi isu-isu kesehatan dan perkembangan penyakit menular yang dihadapi masyarakat	Terciptanya mekanisme riset dan development di bidang kesehatan
				3. Meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan di seluruh wilayah Buru Selatan	Terciptanya Lingkungan bersih

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
6	Penguatan adat, budaya dan nilai-nilai kearifan lokal sebagai modal sosial untuk mendorong akselerasi pembangunan pariwisata daerah (MISI 6)	Majunya pariwisata daerah berbasis kearifan lokal	Terciptanya destinasi wisata berbasis kearifan lokal	1. Pengembangan potensi pariwisata daerah secara profesional yang bersinergi dengan adat, budaya dan kearifan lokal masyarakat Buru Selatan	Terkelolanya potensi wisata lokal secara profesional
				2. Mengupayakan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengembangan budaya lokal guna terjaminnya eksistensi budaya Buru Selatan yang kaya dan beragam	Adanya peraturan daerah tentang kearifan lokal dan aktifitas keagamaan
				3. Mendorong aktivitas keagamaan yang bersinergi dengan budaya lokal guna terbentuknya jatidiri dan kearifan masyarakat	
				4. Memperkuat sistem kelembagaan adat	

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				5. Menggerakkan aktivitas kepemudaan di tingkat desa sesuai bakat dan kebutuhannya, baik pada bidang keagamaan, olahraga, sosial, maupun seni dan budaya.	Meningkatnya minat pemuda di bidang olahrag, sosial seni, dan budaya
				6. Peningkatan harkat dan martabat serta kualitas hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Terpenuhinya sarana prasarana PMKS
				7. Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam membangun kesejahteraan sosial sebagai investasi modal sosial	Terciptanya kepedulian masyarakat dalam investasi modal sosial
				8. Memperkuat ketahanan sosial dalam upaya memperkecil kesenjangan sosial, dengan memberikan perhatian kepada warga masyarakat dalam pembinaan semangat	

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				kesetiakawanan sosial dan kemitraan semangat kepahlawanan serta wawasan kebangsaan	
7	Reformasi birokrasi dan penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional dan bersih dari KKN (MISI 7)	Terwujudnya tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas KKN	Adanya ASN Kabupaten Buru Selatan yang profesional	<p>1. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah dalam menjalankan fungsinya secara efektif dan profesional</p> <p>2. Mengoptimalkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur serta kualitas layanan yang prima bagi masyarakat</p> <p>3. Menyederhanakan alur birokrasi dengan sistem satu atap guna meningkatkan pelayanan publik yang efisien dan efektif</p> <p>4. Optimalisasi peran putra daerah yang berkualitas secara adil dan berimbang, untuk mengisi posisi-posisi</p>	<p>Tersedianya SDM ASN yang profesional</p> <p>Terciptanya sistim akuntabilitas pemerintah yang berkualitas</p> <p>Terciptanya sistim pelayanan satu atap</p> <p>Tersedianya SDM ASN berbasis kearifan lokal</p>

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				strategis di birokrasi, khususnya posisi yang berhubungan langsung dengan masyarakat	
				5. Melakukan praktek pengelolaan keuangan daerah yang adil, transparan dan berpihak pada masyarakat	Terciptanya sistim pengelolaan keuangan yang akuntabel
		Terciptanya klaster produk unggulan daerah berbasis agro marine	Adanya pusat unggulan pertanian dan perikanan	1. Perancangan master plan cluster pengembangan produk perikanan dan pertanian	Tersedianya master plan pengembangan produk perikanan dan pertanian
				2. Membentuk sentra produk perikanan dan pertanian pada kluster-kluster pengembangan ekonomi kerakyatan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah	Terbentuknya sentra produksi berbasis potensi sumberdaya alam wilayah
				3. Membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran aktivitas pada kluster-kluster pengembangan sesuai dengan skala prioritas produk unggulan disetiap	Terbangunnya sarana prasarana penunjang potensi unggulan daerah

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				wilayah	
				4. Penciptaan lapangan kerja dengan jalan meningkatkan ketrampilan masyarakat dengan mendorong usaha-usaha kreatif sesuai dengan potensi yang dimiliki di setiap desa	Terciptanya SDM berbasis potensi unggulan daerah
				5. Menjamin sistem pemasaran dan quality control bagi produk yang dikembangkan demi terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat dan tercapainya Tingkat kesejahteraan masyarakat Buru Selatan secara professional dan berkeadilan	Terciptanya sistim dan quality control dalam pengembangan produk unggulan daerah

2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Selatan secara efektif dan efisien, diperlukan strategi dan arah kebijakan sebagai rumusan perencanaan yang secara komprehensif dapat memberikan gambaran tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam 5 (lima) Tahun ke depan, mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan. Strategi dan kebijakan juga dapat merupakan bagian dari mekanisme melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja lingkup birokrasi pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk mencapai pemerintahan yang bersih (Good Governance), berwibawa dan berkelanjutan.

Strategi pembangunan dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
strategi pembangunan dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Buru Selatan
Tahun 2021-2026

Misi 1			
Memperkuat sektor perhubungan untuk peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat			
No	Srategi	Kebijakan	Program Kerja
1	Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai di seluruh wilayah buru selatan	1. Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara	1. Membangun dan memaksimalkan sarana dan prasarana transportasi laut maupun darat yang memadai di seluruh wilayah; 2. Membangun infrastruktur perekonomian di pedesaan untuk mendorong kelancaran produksi, konsumsi dan distribusi secara integratif;
2	Meningkatkan infrastruktur perekonomian di pedesaan untuk mendorong kelancaran proses produksi, konsumsi dan distribusi secara integrative	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas berbagai sarana dan prasarana penunjang transportasi, seperti jalan dan jembatan. 2. Peningkatan jangkauan dan kualitas sarana dan prasarana irigasi, air bersih, dan permukiman 3. Peningkatan jangkauan dan kualitas sarana dan prasarana energi listrik. 4. Peningkatan jangkauan dan kualitas sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi 5. Pengembangan kawasan strategis, kawasan rawan bencana dan kawasan tertinggal	3. Peningkatan produktivitas usaha perikanan rakyat serta pemberdayaan masyarakat pesisir/pulau; 4. Peningkatan kualitas dan keterampilan petani dan nelayan, baik pada aspek pengetahuan teknis, penguasaan teknologi maupun manajemen usaha; 5. Peningkatan kualitas dan keterampilan petani dan nelayan, baik pada aspek pengetahuan teknis, penguasaan teknologi maupun manajemen usaha 6. Pengembangan wisata bahari, wisata budaya dan wisata sejarah yang berbasis di pedesaan

Misi 2
Pembentukan pusat pengembangan produk perikanan dan pertanian berbasis potensi unggulan wilayah

No	Strategi	Kebijakan	Program Kerja
1	Strategi Membentuk sentral produk perikanan dan pertanian pada kluster-kluster pengembangan ekonomi kerakyatan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan nilai tambah dan pemasaran hasil perikanan 2. Peningkatan kesejahteraan nelayan 3. Peningkatan produksi dan produktivitas Perikanan 4. Peningkatan nilai tambah dan pemasaran hasil pertanian 5. Peningkatan kesejahteraan petani 6. Peningkatan produksi dan produktivitas pangan dan pertanian 7. Peningkatan nilai tambah dan pemasaran hasil Kehutanan 8. Peningkatan ketahanan, aksesibilitas dan konsumsi pangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perancangan master plan cluster pengembangan produk perikanan dan pertanian; 2. Membentuk sentral produk perikanan dan pertanian pada kluster-kluster pengembangan ekonomi kerakyatan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah; 3. Membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran aktivitas pada kluster-kluster pengembangan sesuai dengan skala prioritas produk unggulan disetiap wilayah; 4. Penciptaan lapangan kerja dengan jalan meningkatkan ketrampilan masyarakat dengan mendorong usaha-usaha kreatif sesuai dengan potensi yang dimiliki di setiap desa;
2	Membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran aktivitas pada kluster-kluster pengembangan sesuai dengan skala prioritas produk unggulan disetiap wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak 2. Penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan 3. Peningkatan penyesuaian pemanfaatan tanah sesuai dengan Tata Ruang 4. Penataan batas wilayah pemerintahan 5. Peningkatan rehabilitasi, konservasi, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Menjamin sistem pemasaran dan quality control bagi produk yang dikembangkan demi terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat dan tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Bursel secara professional dan berkeadilan.

		6. Penataan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi	
3	Penciptaan lapangan kerja dengan jalan meningkatkan ketrampilan masyarakat, mendorong usaha-usaha kreatif sesuai dengan potensi yang dimiliki di setiap desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja 2. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja 3. peningkatan kebijakan pembangunan yang responsif gender 4. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak 5. Peningkatan inovasi daerah, penelitian, pengembangan dan penerapan iptek 	
4	Meningkatkan sistem pemasaran dan quality control bagi produk yang dikembangkan demi terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat dan tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Bursel secara professional dan berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor 	

Misi 3			
Penguatan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan pusat pengembangan ekonomi kecamatan dengan mempertimbangkan geostrategis, geopolitik dan potensi sumber daya wilayah			
No	Strategi	Kebijakan	Program Kerja
1	Peningkatan daya saing dan menjaga stabilitas ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses dan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM 2. Penguatan kelembagaan dan peningkatan daya saing SDM koperasi dan UMKM 3. Pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM 4. Pengembangan dan penguatan lembaga keuangan non bank terutama lembaga keuangan mikro 5. Peningkatan industri kecil dan menengah (IKM) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk cluster-cluster pengembangan ekonomi berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah yang berbasis pada pengembangan bisnis agro-marine; 2. Membangun mental dan kemampuan wirausaha di kalangan masyarakat, terutama generasi muda; 3. Memfasilitasi tersedianya akses modal yang memadai bagi berkembangnya UMKM terutama di sektor produktif; 4. Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi berkembangnya UMKM, meliputi penyediaan infrastruktur, informasi pasar, kemudahan birokrasi serta keringanan fiskal.
2	Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kebijakan pembangunan yang responsif gender 	
3	Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin, usaha mikro kecil menengah dan koperasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang berpihak bagi masyarakat miskin 	

Misi 4
Pengembangan sector Pendidikan pendorong peningkatan daya saing daerah

No	Strategi	Kebijakan	Program Kerja
1	Peningkatan pelayanan pendidikan yang lebih merata dan bermutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 2. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dasar dan menengah 3. Beasiswa untuk siswa berprestasi terutama dari keluarga miskin 4. Penguatan dan Pengembangan SMP, SMU dan SMK unggulan 5. Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan 6. Peningkatan pendidikan non-formal dan pendidikan informal 7. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD) 8. Penataan sistem pendidikan, peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan pendidikan, dan penguatan tata kelola pendidikan 9. Peningkatan budaya gemar membaca dan layanan perpustakaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan gratis dengan pola yang adil, profesional berorientasi output; 2. Mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk mencetak landasan yang kokoh bagi penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Buru Selatan di masa depan; 3. Penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai, termasuk peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan pengembangan teknologi informasi di bidang pendidikan; 4. Membangun sekolah-sekolah kejuruan dari level sekolah lanjutan pertama sampai sekolah lanjutan atas, yang berbasis pada potensi wilayah Bursel; 5. Membangun sistem pendidikan tinggi secara fokus dan professional yang berorientasi pada potensi unggulan daerah melalui pengembangan konsep kemitraan segitiga antara pemerintah, pengusaha dan perguruan tinggi.

2	Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga serta partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan budaya dan prestasi olahraga 2. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang Pembangunan 	
Misi 5 Perluasan akses Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat			
No	Strategi	Kebijakan	Program Kerja
1	Meningkatkan layanan kesehatan yang merata dan lebih bermutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita dengan penekanan pada Revitalisasi Posyandu; 2. Perbaikan status gizi masyarakat 3. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan; 4. Pengembangan dan Peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan, medis dan dokter 5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan 6. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang murah dan terjangkau 7. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat. 8. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memaksimalkan Pelayanan kesehatan, disertai upaya penyediaa[n infrastruktur dan Sumber Daya Manusia kesehatan yang memadai hingga ke tingkat desa untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas; 2. Optimalisasi riset dan development di bidang kesehatan untuk mengantisipasi isu-isu kesehatan dan perkembangan penyakit menular yang dihadapi masyarakat; 3. Meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan di seluruh wilayah Buru Selatan.

		9. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pangan yang aman, sehat dan bermutu	
2	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak	
3	Meningkatkan pengendalian jumlah penduduk dan pemberdayaan keluarga	1. Peningkatan kesehatan keluarga dan reproduksi 2. Memperkuat kelembagaan dan Jejaring Keluarga Berencana	

Misi 6

Penguatan adat, budaya dan nilai-nilai kreatif local sebagai modal social untuk mendorong akselerasi pembangunan pariwisata daerah

No	Strategi	Kebijakan	Program Kerja
1	peningkatan hubungan dan toleransi antarumat beragama, penghargaan dan penghormatan terhadap kearifan budaya lokal	1. Teraktualisasinya nilai-nilai budaya lokal sebagai modal sosial pembangunan daerah dan terpeliharanya warisan budaya 2. Peningkatan daya tarik dan kunjungan wisata, yang didukung sumberdaya pariwisata yang lebih berkualitas	1. Mendorong dan memaksimalkan peran dan potensi perempuan dalam tata kelola pemerintahan, aktifitas sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga. 2. Pengembangan potensi pariwisata daerah secara professional yang bersinergi dengan adat, budaya dan kearifan lokal masyarakat Bursel;
2	Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat	1. Peningkatan akses bagi anak dan balita telantar, anak jalanan, anak cacat, dan lanjut usia telantar, serta penyandang cacat terhadap pelayanan, perlindungan, dan rehabilitasi social	3. Menerbitkan Perda yang berkaitan dengan pengembangan budaya lokal guna terjaminnya eksistensi budaya Bursel yang kaya dan beragam; 4. Mendorong aktivitas keagamaan yang bersinergi dengan budaya lokal guna

		2. Menekan kerentanan masyarakat miskin sebagai akibat dari perubahan iklim dan bencana alam	terbentuknya jati diri dan kearifan masyarakat; 5. Memperkuat sistem kelembagaan adat; 6. Menggerakkan aktivitas kepemudaan di tingkat desa sesuai bakat dan kebutuhannya, baik pada bidang keagamaan, olahraga, sosial, maupun seni dan budaya.
3	Memantapkan Kondisi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1. peningkatan layanan kehidupan beragama 2. Peningkatan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat 3. Menekan penyalahgunaan narkoba serta tertanganinya korban penyalahgunaan narkoba 4. Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana	
4	Peningkatan penegakkan dan Penghormatan Hukum dan HAM	1. peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat	
5	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas lembaga demokrasi dan meningkatkan kapasitas dan partisipasi politik masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada secara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil	1. Terwujudnya lembaga legislatif, partai politik, dan organisasi masyarakat yang profesional, maju, dan modern 2. Terlaksananya Pemilu dan Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.	

Misi 7

Reformasi birokrasi dan penyerapan tata Kelola pemerintahan yang efektif, professional dan bersih dari KKN

No	Strategi	Kebijakan	Program Kerja
1	Meningkatkan pengawasan dan integritas aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pengawasan Internal 2. Penegakkan disiplin dan penerapan pakta integritas 3. Pengembangan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah dalam menjalankan fungsinya secara efektif dan profesional; 2. Mengoptimalkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur serta kualitas layanan yang prima bagi masyarakat;
2	Memperbaiki kualitas pelayanan publik yang cepat dan murah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Standar Minimal Pelayanan Publik 2. Mengembangkan dan menerapkan pelayanan satu pintu untuk pelayanan utama dan investasi 3. Peningkatan layanan registrasi penduduk dan pencatatan sipil 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menyederhanakan alur birokrasi dengan sistem satu atap guna meningkatkan pelayanan publik yang efisien dan efektif; 4. Optimalisasi peran putra daerah yang berkualitas secara adil dan berimbang, untuk mengisi posisi-posisi strategis di birokrasi, khususnya posisi yang berhubungan langsung dengan masyarakat;
3	Menata kelembagaan daerah dan mengembangkan system ketatalaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Restruktur organisasi dan penataan kelembagaan melalui konsolidasi struktural dan analisis efisiensi serta efektifitas kelembagaan 2. Mengembangkan electronic government dan Standar Prosedur Kerja untuk mendukung efisiensi dan proses akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 3. Penguatan kelembagaan dan kapasitas pemerintahan Negeri 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Melakukan praktik pengelolaan keuangan daerah yang adil, transparan dan berpihak pada masyarakat.
4	Meningkatnya penerimaan daerah dan efisiensi belanja daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemanfaatan pengelolaan kekayaan daerah, pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan 2. Pengelolaan BUMD yang semakin 	

		<p>sehat dan kompetitif</p> <p>3. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengeluaran pemerintah daerah</p>	
5	Revitalisasi musrenbang dan penguatan perencanaan berbasis kinerja	<p>1. Mengkoordinasikan para pelaku pembangunan dalam perencanaan pembangunan daerah</p> <p>2. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan, dan evaluasi atau kajian kebijakan</p>	
6	Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan	<p>1. Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja SKPD dan kinerja aparatur</p>	
7	Menerapkan manajemen SDM yang berkualitas (transparan dan berbasis merit system/kompetensi)	<p>1. Penentuan formasi, rekrutmen, Promosi dan mutasi pegawai secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi</p> <p>2. Penyusunan standar kompetensi jabatan untuk mendukung sistem promosi dan mutasi berbasis kompetensi</p> <p>3. Sistem diklat berbasis kompetensi yang serasi dengan sistem promosi dan mutasi</p> <p>4. Penyempurnaan sistem pembayaran gaji yang layak, adil,</p>	

		<p>dan berbasis kinerja untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan mendorong motivasi, semangat berprestasi, dan integritas pegawai.</p> <p>5. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa.</p>	
--	--	---	--

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023 Perjanjian kinerja adalah pernyataan komitmen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja yang dijabarkan dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan yang dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023.

Tabel 2.3.
Target Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terkoneksinya sistim perhubungan sampai pada pusat aktifitas ekonomi masyarakat	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	438.61
		Panjang jalan dilalui roda 4	608.81
2	Membangun dan memaksimalkan sarana dan prasarana transportasi laut, darat secara memadai di Kabupaten Buru Selatan	Fasilitas sisi darat pelabuhan laut	5
3	Terciptanya klaster produk unggulan daerah berbasis agro marine	NTN	101.26
		NTP	135.74
4	Perancangan master plan cluster pengembangan produk perikanan dan pertanian	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	3.00
5	Peningkatan Kapasitas Petani, Nelayan (Pengetahuan Teknis, Teknologi, Manajemen Usaha)	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	1
		Cakupan Bina Kelompok Petani	1
6	Membentuk sentra produk perikanan dan pertanian Sesuai dengan kluster produk unggulan	Produksi perikanan tangkap	10.866,9
		Produksi perikanan budidaya	2.44
		Produksi Palawija	1342.52

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7	Membangun sarana dan prasarana secara proporsional dan berkelanjutan untuk mendukung klaster produk unggulan pengembangan di setiap wilayah	Tersedianya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	4
		Jumlah Bantuan Armada Tangkap dan Alat Penangkapan Ikan	65
		Jumlah Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan	5
8	Penciptaan lapangan kerja	Menurunya tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5.95
9	Pembentukan Dan Penguatan Tatakelola pusat usaha kecil mikro dan menengah sesuai potensi wilayah	Jumlah UMKM	587
10	Membentuk Klaster Pengembangan UMKM berdasarkan potensi wilayah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMDA) (Rp M)	16.44
11	Memfasilitasi tersedianya infrastruktur dan akses modal bagi pengembangan UMKM Produktif	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN%)	1.02
12	Pengadaan tanah untuk peningkatan sarana prasarana pembangunan, perumahan layak huni.	Rasio permukiman layak huni	89.21
13	Pendidikan gratis dengan pola yang adil, profesional berorientasi output	APM SD/MI	98.34
		APM SMP/MTs	93.32
14	Mengembangkan pendidikan anak usia dini (PAUD) untuk mencetak landasan yang kokoh bagi penguatan SDM	Jumlah siswa pada jenjang TK/RA	3222
15	Tersedianya akses kesehatan bagi masyarakat	Rasio Posyandu per satuan balita (/1.000)	12.71
		Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (/1.000).	0.02
		Rasio RS per satuan penduduk(/1.000)	0.02

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Rasio dokter per satuan penduduk (/1000)	0.24
16	Meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan di seluruh wilayah Buru Selatan	Jumlah rumah tangga bersanitasi	50.92
17	Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata	Pengembangan objek wisata unggulan	1
18	Pengembangan potensi pariwisata daerah secara professional.	Tersedianya SDM profesional dibidang pariwisata	5
25	Mendorong aktivitas keagamaan yang bersinergi dengan budaya lokal.	Rasio tempat ibadah per 1000 penduduk	1.68
26	Menggerakkan aktivitas kepemudaan di tingkat desa sesuai bakat dan kebutuhan, untuk mendukung pariwisata.	Jumlah kegiatan kepemudaan (Keg)	3
27	Peningkatan harkat dan martabat serta kualitas hidup bagi Penyandang Masalah	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit)	1
28	Terwujudnya tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas KKN	Indeks Reformasi Birokrasi (Skor) (N/A)	100
29	Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah dalam menjalankan fungsinya secara efektif dan profesional	Pesentase kinerja ASN	100
30	Mengoptimalkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur serta kualitas layanan yang prima.	Pesentase disiplin ASN	100
31	Menyederhanakan alur birokrasi dengan sistem satu atap guna meningkatkan pelayanan publik yang efisien dan efektif	Dokumen SOP pelayanan satu atap	100
32	Melakukan praktek pengelolaan keuangan daerah yang adil, transparan	Indeks persepsi korupsi (N/A)	tersedia

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :

- a. **Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya**
Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.
- b. **Arahan Operasional**
Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.
- c. **Akuntabilitas**
Membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.
- d. **Perencanaan**
Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.
- e. **Pengelolaan**
Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.
- f. **Penganggaran**
Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang obyektif mengenai alokasi dan redistribusi sumberdaya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.
- g. **Penyediaan pelayanan kepada pihak luar**
Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.

h. Pengawasan Kerja

Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

1. **CAPAIAN INDIKATOR UTAMA**

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No.54 tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.1

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori	KODE
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil	
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil	
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil	

50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil	Yellow
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil	Red

2. CAPAIAN KINERJA SASARAN

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok". Penyimpulan capaian sasaran setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :
 Nilai Mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Sangat Berhasil	:	95
Berhasil	:	82.5
Cukup Berhasil	:	70
Tidak Berhasil	:	57.5
Sangat Tidak Berhasil	:	25

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, tidak berhasil, dan sangat tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan rumus penghitungan :

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

3. CAPAIAN KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No.54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

B. EVALUASI DAN ANALISIS

1. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN

SASARAN 1	Terkoneksinya sistim perhubungan sampai pada pusat aktifitas ekonomi masyarakat
------------------	--

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran guna mencapai Misi Pertama yaitu “memperkuat sektor perhubungan untuk peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat”. Hasil pengukuran Sasaran Terkoneksinya sistim perhubungan sampai pada pusat aktifitas ekonomi masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Indikator Sasaran Terkoneksinya sistim perhubungan sampai pada pusat aktifitas ekonomi masyarakat

No	Indikator	2022		2023		Capaian	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	2022	2023
1	Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	417.36	465.95	438,61	384.23	100	87.59
2	Panjang jalan dilalui roda 4	587.56	465.95	608.81	384.228	79.30	63.11

Data Dinas PU dan BPS Kabupaten Buru Selatan

a. Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah indikator yang penting dalam mengukur kualitas infrastruktur jalan suatu negara. Jaringan jalan yang baik merupakan elemen vital dalam mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Untuk mengukur proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, biasanya dilakukan dengan membandingkan panjang jalan yang terjaga dengan baik dengan total panjang jaringan jalan.

Indikator ini pada Tahun 2023 di targetkan sebesar 436,61 Km jalan dalam kondisi baik Dimana realisasi dari indikator ini sebesar 384,23 Km sehingga capaian dari indikator ini 87.59 % dengan kategori capaian memuaskan.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah:

1. **Pemeliharaan Rutin:** Melakukan pemeliharaan rutin secara teratur untuk menjaga kondisi jalan tetap baik. Ini termasuk perbaikan lubang, perbaikan permukaan jalan yang rusak, dan pembersihan saluran air untuk mencegah genangan air.
2. **Pembangunan Jalan Baru:** Membangun jalan baru atau memperluas jaringan jalan untuk mengakomodasi pertumbuhan populasi dan permintaan mobilitas yang meningkat. Pembangunan jalan baru juga dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan yang sudah ada.
3. **Penerapan Standar Konstruksi yang Tepat:** Memastikan bahwa jalan-jalan yang dibangun atau diperbaiki sesuai dengan standar konstruksi yang tepat untuk menjamin keawetan dan daya tahan jalan.

4. Penggunaan Material Berkualitas: Menggunakan material konstruksi jalan yang berkualitas tinggi dan tahan lama untuk memastikan kekuatan dan ketahanan jalan terhadap beban lalu lintas dan cuaca ekstrem.
5. Penggunaan Teknologi Pemantauan dan Perawatan Jalan: Memanfaatkan teknologi pemantauan dan perawatan jalan seperti sensor untuk mendeteksi kerusakan jalan secara dini, sistem pemantauan kondisi jalan berbasis IoT, dan teknologi lainnya yang dapat membantu mengidentifikasi masalah dan meresponsnya dengan cepat.
6. Pendidikan dan Penegakan Hukum: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga jalan dan infrastruktur umum dengan tidak melakukan pelanggaran seperti membuang sampah sembarangan di jalan atau merusak infrastruktur jalan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran ini juga perlu ditingkatkan.

Dengan melakukan upaya-upaya ini secara terus-menerus dan terkoordinasi, diharapkan dapat meningkatkan proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan suatu negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta mobilitas masyarakat.

b. Panjang jalan dilalui roda 4

Panjang jalan yang dilalui roda 4 dapat menjadi ukuran penting dalam analisis transportasi dan perencanaan infrastruktur jalan. Namun, untuk memberikan jawaban yang lebih spesifik, perlu diketahui beberapa informasi tambahan, seperti lokasi geografis, jenis jalan (misalnya, jalan tol, jalan raya, jalan perkotaan), serta data terkait lalu lintas dan mobilitas di daerah tersebut.

Indikator ini mencapai capaian baik dimana indikator ini ditargetkan 608.81 km panjang jalan yang di lalui roda 4 dengan realisasi 384.228 km sehingga persentase realisasi sebesar 63,11 %.

Umumnya, panjang jalan yang dilalui roda 4 dapat diukur dengan menggunakan data lalu lintas dan analisis jaringan jalan. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan data pemantauan lalu lintas, survei lapangan, atau data satelit dan GIS (Sistem Informasi Geografis) untuk mengidentifikasi rute yang paling sering dilalui oleh kendaraan roda 4.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengukur atau memperkirakan panjang jalan yang dilalui roda 4 termasuk:

1. Analisis Lalu Lintas: Melakukan analisis lalu lintas untuk mengidentifikasi rute-rute utama yang sering dilalui oleh kendaraan roda 4. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan data pemantauan lalu lintas, seperti data sensor lalu lintas, atau data dari lembaga transportasi yang relevan.
2. Pemetaan Jaringan Jalan: Memetakan jaringan jalan dan mengidentifikasi rute-rute utama yang digunakan oleh kendaraan roda 4. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan data GIS dan peta jalan yang tersedia.
3. Survei Lapangan: Melakukan survei lapangan untuk mengidentifikasi jalan-jalan yang sering dilalui oleh kendaraan roda 4. Survei ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode penghitungan volume lalu lintas atau observasi langsung.
4. Kerjasama dengan Lembaga Transportasi: Berkerjasama dengan lembaga transportasi atau otoritas jalan untuk memperoleh data lalu lintas dan informasi terkait mobilitas kendaraan roda 4 di daerah tersebut.

Setelah panjang jalan yang dilalui roda 4 diidentifikasi, informasi ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk perencanaan infrastruktur jalan, analisis kepadatan lalu lintas, perencanaan transportasi, dan pengembangan kebijakan terkait mobilitas

kendaraan roda 4.

Tabel 3.3

Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Terkoneksinya sistim perhubungan sampai pada pusat aktifitas ekonomi Masyarakat

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyelenggaraan Jalan	22.992.287.750	19.640.534.098	85.42

SASARAN 2	Membangun dan memaksimalkan sarana dan prasarana transportasi laut, darat secara memadai di kabupaten buru selatan
------------------	---

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran guna mencapai Misi Pertama yaitu “memperkuat sektor perhubungan untuk peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat”. Hasil pengukuran Sasaran Membangun dan memaksimalkan sarana dan prasarana transportasi laut, darat secara memadai di kabupaten buru selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4

Indikator Sasaran Membangun dan memaksimalkan sarana dan prasarana transportasi laut, darat secara memadai di kabupaten buru selatan

No	Indikator	2022		2023		Capaian	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	2022	2023
1	Fasilitas sisi darat Pelabuhan laut	5	8	5	8	100	100

Sumber Data Dinas Perhubungan Kabupaten Buru Selatan

Fasilitas sisi darat Pelabuhan laut merupakan tempat yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di Sisi darat.

Realisasi indikator kinerja fasilitas sisi darat Pelabuhan laut pada awal tahun RPJMD telah mencapai target dan masuk dalam kategori berhasil. hal ini dapat dilihat dari target kinerja yang pada awal tahun RPJMD direncanakan sebanyak 5 Fasilitas terealisasi sebesar 8 Fasilitas Pelabuhan laut.

8 total fasilitas sisi darat pelabuhan laut berupa 4 dermaga pebahuan laut yang dikelola Daerah yaitu :

1. Dermaga Wasalai
2. Dermaga Tifu
3. Dermaga Wasasi/Waemulang
4. Dermaga Biloro

Dan 4 dermaga lainnya dikelola oleh Kementerian diantaranya :

1. Dermaga Ambalau
2. Dermaga Namrole
3. Dermaga Leksula
4. Dermaga Nanali

Untuk terus mempertahankan dan meningkatkan indikator di atas, perlu terus ditingkatkan kinerja antara lain perwujudan logistik maritim di dalam negeri, peningkatan

konektivitas terhadap jaringan pelayaran, pengembangan pelabuhan hub internasional dan pelabuhan pendukung tol laut, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana keselamatan, peningkatan compliance terhadap standar/regulasi internasional, peningkatan keterpaduan antarmoda dan antar wilayah, peningkatan teknologi informasi, pemanfaatan pembiayaan alternatif, peningkatan kualitas keselamatan dan pelayanan publik di pelabuhan, dan yang terakhir revitalisasi kelembagaan.

Tabel 3.5

Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Membangun dan memaksimalkan sarana dan prasarana transportasi laut, darat secara memadai di kabupaten buru selatan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.933.588.392	2.839.936.400	96.81
2	Pengelolaan Pelayaran	26.524.819.785	25.394.582.050	95.74

SASARAN 3	Terciptanya kluster produk unggulan daerah berbasis agro marine
------------------	--

Hasil pengukuran Sasaran Terciptanya kluster produk unggulan daerah berbasis agro marine dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6

Indikator Sasaran Terciptanya kluster produk unggulan daerah berbasis agro marine

No	Indikator	2022		2023		Capaian	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	2022	2023
1	NTN	101.16	118	101.26	122	100	100
2	NTP	136.64	141.02	135.774	104,85	100	77.22

a. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Realisasi Indikator nilai tukar nelayan mencapai hasil yang sangat memuaskan, hal ini dapat dilihat pada realisasi indikator melebihi target. Dengan tercapainya indikator tersebut, maka dapat dikatakan bahwa nilai tukar nelayan telah berhasil meningkat dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan nelayan. Namun, perlu diingat bahwa upaya meningkatkan nilai tukar nelayan juga harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan sektor perikanan.

Beberapa aspek yang harus terus diperhatikan guna terus meningkatkan nilai tukar nelayan adalah :

1. Peningkatan pendapatan nelayan: Keberhasilan nilai tukar nelayan dapat dilihat dari peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh nelayan dari hasil tangkapan mereka. Dengan meningkatnya nilai tukar, nelayan dapat memperoleh harga yang lebih baik untuk hasil tangkapan mereka, sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka.
2. Peningkatan volume penjualan: Keberhasilan nilai tukar nelayan juga dapat dilihat dari peningkatan volume penjualan hasil tangkapan mereka. Dengan meningkatnya harga dan permintaan atas hasil tangkapan, nelayan dapat meningkatkan volume penjualan yang mereka lakukan.

3. Peningkatan kualitas hasil tangkapan: Keberhasilan nilai tukar nelayan juga dapat dilihat dari peningkatan kualitas hasil tangkapan yang dihasilkan. Dengan meningkatnya nilai tukar, nelayan diharapkan dapat memperhatikan kebersihan dan sanitasi saat mengolah hasil tangkapan dan menjaga kualitas ikan yang dihasilkan.
4. Peningkatan efisiensi dalam pengelolaan hasil tangkapan: Keberhasilan nilai tukar nelayan juga dapat dilihat dari peningkatan efisiensi dalam pengelolaan hasil tangkapan. Dengan meningkatnya nilai tukar, nelayan diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan hasil tangkapan mereka dengan memperbaiki metode penangkapan dan pengolahan ikan.
5. Peningkatan akses ke pasar: Keberhasilan nilai tukar nelayan juga dapat dilihat dari peningkatan akses mereka ke pasar lokal maupun internasional. Dengan meningkatnya nilai tukar, nelayan diharapkan dapat memperluas jaringan perdagangan mereka dan meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas.

b. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga output pertanian dengan indeks harga input pertanian. NTP mengukur perbandingan antara harga-harga yang diterima oleh petani atas hasil panen dengan harga-harga yang dibayarkan oleh petani untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan dalam proses produksi pertanian. Dengan kata lain, NTP mengukur daya beli petani terhadap input pertanian dengan output pertanian.

NTP memiliki peranan penting dalam mengukur kesejahteraan petani dan keberlanjutan pertanian. Dengan memperhitungkan perbedaan antara harga input dan output pertanian, NTP membantu petani dalam memperkirakan keuntungan yang dapat diperoleh dari hasil panen dan membantu pemerintah dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan pertanian yang berkelanjutan.

Target Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 135.774 dengan realisasi sebesar 104,85 sehingga capaian dari indikator sebesar 77,22 dengan kategori capaian sangat baik.

Upaya meningkatkan nilai tukar petani (NTP) dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Meningkatkan produktivitas pertanian: Dengan meningkatkan produktivitas pertanian, petani dapat meningkatkan produksi dan kualitas produk pertanian mereka, sehingga dapat memperoleh harga jual yang lebih baik.
2. Diversifikasi produksi: Diversifikasi produksi pertanian dapat membantu petani untuk menghasilkan produk yang lebih bernilai tambah, seperti produk olahan atau produk organik, yang memiliki harga jual yang lebih tinggi.
3. Peningkatan akses ke pasar: Dengan meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas, petani dapat memperoleh harga jual yang lebih baik karena produk mereka dapat dijual ke konsumen yang lebih banyak.
4. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan petani: Peningkatan keterampilan dan pengetahuan petani tentang teknik pertanian yang baik, pengelolaan usaha pertanian, dan manajemen keuangan dapat membantu petani dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses produksi.
5. Peningkatan kualitas infrastruktur: Peningkatan kualitas infrastruktur, seperti jalan raya, irigasi, dan listrik, dapat membantu petani dalam mengurangi biaya produksi dan memperoleh akses yang lebih baik ke pasar.
6. Peningkatan kebijakan publik: Pemerintah dapat memperbaiki kebijakan publik dalam

bidang pertanian, seperti memberikan insentif atau subsidi pada petani, mengatur pasar, dan membuka akses ke pasar internasional.

Tabel 3.7

Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Terciptanya klaster produk unggulan daerah berbasis agro marine

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.352.146.000	2.333.486.485	99,21
2	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	51.176.000	48.476.000	94,72
3	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	206.495.000	206.405.000	99,96
4	Penyuluhan Pertanian	366.484.900	362.292.900	98,86
5	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.213.305.915	2.168.283.513	97,97
6	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	79.996.000	79.996.000	100

SASARAN 4

Perancangan master plan cluster pengembangan produk perikanan dan pertanian

Hasil pengukuran Sasaran Perancangan master plan cluster pengembangan produk perikanan dan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8

Indikator Sasaran Perancangan master plan cluster pengembangan produk perikanan dan pertanian

No	Indikator	2022		2023		Capaian	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	2022	2023
1	Peta lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B	3.00	5.168,56	3.00	5.168,56	100	100

Sumber Data Dinas Pertanian Kabupaten Buru Selatan

a. Peta lahan pertanian pangan berkelanjutan / LP2B

Peta lahan pertanian adalah peta yang menunjukkan lokasi, jenis, dan penggunaan lahan pertanian pada suatu wilayah atau daerah. Peta ini biasanya digunakan untuk membantu mengelola lahan pertanian dan merencanakan kegiatan pertanian di daerah tersebut.

Peta lahan pertanian juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan pertanian, seperti menentukan jenis tanaman yang paling cocok untuk ditanam di suatu daerah, menentukan pola tanam yang tepat, serta menentukan teknologi dan praktik pertanian yang sesuai dengan kondisi lahan.

Tabel 3.9

Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Perancangan master plan cluster pengembangan produk perikanan dan pertanian

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.352.146.000	2.333.486.485	99.21
2	Penyuluhan Pertanian	366.484.900	362.292.900	98,86

SASARAN 5

Peningkatan Kapasitas Petani, Nelayan (Pengetahuan Teknis, Teknologi, Manajemen Usaha)

Hasil pengukuran Sasaran Terciptanya Peningkatan Kapasitas Petani, Nelayan (Pengetahuan Teknis, Teknologi, Manajemen Usaha) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10

Indikator Sasaran Peningkatan Kapasitas Petani, Nelayan (Pengetahuan Teknis, Teknologi, Manajemen Usaha)

No	Indikator	2022		2023		Capaian	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	2022	2023
1	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	68,00	56	63.38	80	82.35	100
2	Cakupan Bina Kelompok Petani	55,04	56.01	63.38	17.78	100	28.25

Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian Kabupaten Buru Selatan

a. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

keberhasilan cakupan bina kelompok nelayan dapat dilihat dari berbagai faktor seperti jumlah kelompok Nelayan yang terbentuk, partisipasi nelayan, peningkatan produktivitas, peningkatan kesejahteraan nelayan berkelanjutan, dukungan pemerintah dan masyarakat, peningkatan akses pasar, peningkatan akses teknologi, peningkatan keterampilan nelayan, dan peningkatan keberlanjutan lingkungan. Semua faktor tersebut harus diperhatikan dan terus dimonitor agar program bina kelompok nelayan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi petani dan masyarakat.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk terus meningkatkan cakupan bina kelompok nelayan adalah :

1. Jumlah kelompok nelayan yang terbentuk: Jika program bina kelompok nelayan berhasil, maka jumlah kelompok nelayan yang terbentuk akan semakin banyak.
2. Partisipasi nelayan: Keberhasilan program bina kelompok nelayan dapat dilihat dari partisipasi nelayan dalam kegiatan kelompok nelayan. Jika nelayan terlibat aktif dalam kegiatan kelompok nelayan, maka program bina kelompok nelayan dianggap berhasil.
3. Peningkatan produktivitas: Tujuan utama dari program bina kelompok nelayan adalah meningkatkan produktivitas nelayan. Keberhasilan program dapat dilihat dari peningkatan produktivitas nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan.

4. Peningkatan kesejahteraan nelayan: Program bina kelompok nelayan juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Keberhasilan program dapat dilihat dari peningkatan kesejahteraan nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan.
 5. Berkelanjutan: Keberhasilan program bina kelompok nelayan juga dapat dilihat dari kelangsungan program tersebut. Jika program dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang nyata bagi nelayan, maka program dapat dianggap berhasil.
 6. Dukungan pemerintah dan masyarakat: Program bina kelompok nelayan membutuhkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan program dapat dilihat dari dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan kelompok nelayan.
 7. Peningkatan akses pasar: Keberhasilan program bina kelompok nelayan dapat dilihat dari peningkatan akses pasar bagi produk-produk perikanan nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan. Program bina kelompok nelayan seharusnya memberikan pelatihan dan bimbingan untuk memperbaiki kualitas produk dan meningkatkan pemasaran produk nelayan.
 8. Peningkatan akses teknologi: Program bina kelompok nelayan juga harus memberikan akses teknologi yang terkini dan inovatif untuk meningkatkan produktivitas nelayan. Dengan adanya akses teknologi yang lebih baik, nelayan dapat mengoptimalkan produksi dan mengurangi biaya produksi.
 9. Peningkatan keterampilan nelayan: Program bina kelompok nelayan harus memberikan pelatihan dan bimbingan kepada nelayan untuk meningkatkan keterampilan dalam mengelola usaha perikanan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup nelayan dan memperbaiki produktivitas mereka.
- b. Cakupan bina kelompok petani

Bina Kelompok Petani (BKP) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan modal usaha. Program ini bertujuan untuk membantu petani mengelola usaha pertanian mereka secara lebih baik dan berkelanjutan, serta meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka.

Capaian indikator ini sebesar 28.25 %. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan memiliki berbagai upaya dalam meningkatkan cakupan Bina Kelompok Petani (BKP) di seluruh wilayah Buru Selatan. Beberapa upaya tersebut antara lain:

1. Peningkatan jumlah penyuluh pertanian: Pemerintah meningkatkan jumlah penyuluh pertanian yang bertugas untuk membina kelompok tani di wilayah-wilayah pertanian. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan cakupan BKP di seluruh wilayah Indonesia.
2. Peningkatan alokasi anggaran: Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk program BKP dalam APBN setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk memperluas program BKP dan memberikan dukungan yang lebih besar bagi petani.
3. Pelatihan bagi penyuluh dan petani: Pemerintah juga memberikan pelatihan bagi penyuluh dan petani dalam berbagai aspek terkait pertanian, seperti manajemen usaha, produksi, dan pemasaran hasil pertanian. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani dalam mengelola usaha pertanian mereka.
4. Penyediaan fasilitas dan peralatan pertanian: Pemerintah juga memberikan bantuan fasilitas dan peralatan pertanian, seperti traktor, alat pengolah tanah, pupuk, dan benih kepada kelompok tani. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan

efisiensi usaha pertanian petani.

- Kolaborasi dengan sektor swasta: Pemerintah juga menjalin kerja sama dengan sektor swasta, termasuk perusahaan agribisnis dan lembaga keuangan, untuk memperluas program BKP. Hal ini dapat meningkatkan akses petani terhadap modal usaha dan pasar yang lebih besar.

Upaya pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan cakupan Bina Kelompok Petani di seluruh wilayah Indonesia dan membantu petani meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.

Tabel 3.11

Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Perancangan master plan cluster pengembangan produk perikanan dan pertanian

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.352.146.000	2.333.486.485	99,21
2	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	51.176.000	48.476.000	94,72
3	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	206.495.000	206.405.000	99,96
4	Penyuluhan Pertanian	366.484.900	362.292.900	98,86
5	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.213.305.915	2.168.283.513	97,97
6	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	79.996.000	79.996.000	100

SASARAN 6

Membentuk sentra produk perikanan dan pertanian Sesuai dengan kluster produk unggulan

Hasil pengukuran Sasaran Membentuk sentra produk perikanan dan pertanian Sesuai dengan kluster produk unggulan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12

Indikator Sasaran Membentuk sentra produk perikanan dan pertanian Sesuai dengan kluster produk unggulan

No	Indikator	2022		2023		Capaian	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	2022	2023
1	Produksi Perikanan Tangkap	10.689,5	13,103	10.866,9	12.407.2	100	100
2	Produksi Perikanan Budidaya	2.21	1,25	2.44	1.241	56.56	50.81
3	Produksi Palawija	1.320,01	5.728.8	1.342,52	7.197.79	100	100

Sumber Data Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian Kabupaten Buru Selatan

- Produksi Perikanan Tangkap

Indikator Produksi perikanan tangkap mencapai target dan dikategorikan sangat

memuaskan, hal ini dapat dilihat dari hasil capaian indikator ini sebesar 100 %.

Upaya-upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan indikator ini dengan dukungan pemerintah dan masyarakat serta dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan. Upaya-upaya ini antara lain :

1. Pemantauan sumber daya ikan: Pemantauan sumber daya ikan perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan jumlah ikan yang tersedia dan meminimalkan risiko overfishing. Pemantauan ini dapat dilakukan melalui pengukuran stok ikan, tingkat reproduksi, dan kelimpahan ikan di suatu wilayah.
2. Penyediaan peralatan tangkap yang efektif: Pemilihan peralatan tangkap yang efektif seperti jaring, pukat, dan jala yang sesuai dengan jenis ikan yang ditangkap dan lingkungan perairan dapat meningkatkan produktivitas tangkapan ikan.
3. Peningkatan keahlian nelayan: Nelayan perlu diberikan pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan keterampilan dalam menggunakan peralatan tangkap yang tepat, teknik penangkapan yang efektif, dan cara mengelola hasil tangkapan ikan yang baik.
4. Pengembangan teknologi perikanan: Pengembangan teknologi seperti penggunaan GPS dan radar untuk memetakan lokasi ikan, penggunaan kapal tangkap yang lebih modern dan efisien, serta pengembangan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penangkapan ikan.
5. Pembangunan infrastruktur: Pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, dermaga, dan pasar ikan dapat meningkatkan akses nelayan ke wilayah perikanan dan memperbaiki akses ke pasar ikan yang lebih luas.
6. Pengembangan sistem pemasaran: Pengembangan sistem pemasaran yang efektif seperti penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memasarkan hasil tangkapan ikan, serta membentuk kemitraan dengan produsen, pengepul, dan pedagang ikan dapat meningkatkan keuntungan nelayan dan mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap.

Pengaturan peraturan perikanan yang baik: Pengaturan peraturan perikanan yang baik seperti pengaturan kuota penangkapan, zona penangkapan ikan, dan musim penangkapan ikan dapat menjaga keberlangsungan sumber daya ikan dan mendorong peningkatan produktivitas perikanan tangkap secara berkelanjutan.

b. Produksi Perikanan Budidaya

Pada indikator ini dapat dilihat realisasinya masuk dalam kategori cukup, hal ini dapat dilihat dari produksi perikanan tangkap yang ditargetkan sebesar 2.44 ton hanya mampu terealisasi sebesar 1,241 ton dengan capaian hanya mencapai 50.81 %.

Beberapa factor yang mempengaruhi ketidak berhasilan indikator ini adalah :

1. Kualitas air yang buruk: Kualitas air yang buruk seperti kandungan zat polutan, pH, suhu, oksigen, dan salinitas yang tidak sesuai dapat memengaruhi pertumbuhan ikan dan menyebabkan kematian ikan.
2. Penyakit ikan: Penyakit ikan yang menyerang budidaya ikan dapat menyebar dengan cepat dan menyebabkan kematian massal ikan. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya kebersihan kolam, pakan yang tidak sehat, atau kontaminasi air.
3. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan peternak: Kurangnya keterampilan dan pengetahuan peternak dalam mengelola kolam ikan, mengatur kualitas air, memberikan pakan yang tepat, dan mencegah penyakit ikan dapat menyebabkan kegagalan produksi.
4. Keterbatasan pasokan pakan: Keterbatasan pasokan pakan yang berkualitas dapat memengaruhi pertumbuhan ikan dan mengurangi produktivitas budidaya.

5. Ketergantungan pada satu jenis ikan: Ketergantungan pada satu jenis ikan dapat menyebabkan kerentanan terhadap penyakit dan penurunan harga jual ikan jika pasar jenuh.
6. Bencana alam: Bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan topan dapat merusak infrastruktur kolam ikan dan mengganggu keberlangsungan produksi.
7. Kurangnya dukungan pemerintah dan pasar yang kurang berkembang: Kurangnya dukungan pemerintah dalam hal bantuan teknis dan pasar yang kurang berkembang dapat menyebabkan peternak sulit memperoleh informasi dan menghasilkan keuntungan yang memadai dari usaha budidaya ikan.

c. Produksi Palawija

Sektor pertanian palawija memiliki kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia. Palawija merupakan jenis tanaman pangan yang tumbuh setelah musim hujan dan sebelum musim panas, seperti jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan lain sebagainya.

Indikator ini ditargetkan berkontribusi sebesar 1.342,52 ton dengan realisasi sebesar 7.197.79 sehingga capaian dari indikator ini sebesar 100.00 %;

Pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan sektor pertanian palawija. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kontribusi sektor pertanian palawija antara lain:

1. Memberikan bantuan dan dukungan teknis: Pemerintah dapat memberikan bantuan teknis dalam bentuk pelatihan dan pengembangan teknologi pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian palawija.
2. Peningkatan akses ke pasar: Pemerintah dapat membantu meningkatkan akses petani ke pasar dengan membangun jaringan distribusi dan memfasilitasi perdagangan antar daerah. Selain itu, pemerintah juga dapat membuka peluang untuk ekspor produk pertanian palawija.
3. Meningkatkan akses ke modal dan pembiayaan: Pemerintah dapat memberikan dukungan finansial dan pembiayaan melalui lembaga keuangan, seperti bank dan koperasi, untuk membantu petani meningkatkan produksi dan memperluas usaha pertanian palawija.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia: Pemerintah dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian dengan memberikan pendidikan dan pelatihan dalam bidang pertanian dan bisnis pertanian.
5. Peningkatan pengembangan infrastruktur: Pemerintah dapat membangun dan memperbaiki infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan irigasi, untuk mendukung kegiatan pertanian dan mempermudah akses petani ke pasar dan sumber daya lainnya.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor pertanian palawija dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, dan khususnya wilayah buru selatan.

Tabel 3.13

Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Membentuk sentra produk perikanan dan pertanian Sesuai dengan dengan kluster produk unggulan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.352.146.000	2.333.486.485	99.21

2	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	206.495.000	206.405.000	99,96
3	Penyuluhan Pertanian	366.484.900	362.292.900	98,86
4	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.213.305.915	2.168.283.513	97,97
5	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	79.996.000	79.996.000	100

SASARAN 7

Membangun sarana dan prasarana secara proporsional dan berkelanjutan untuk mendukung kluster produk unggulan pengembangan di setiap wilayah

Hasil pengukuran Sasaran Membangun sarana dan prasarana secara proporsional dan berkelanjutan untuk mendukung kluster produk unggulan pengembangan di setiap wilayah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14

Indikator Sasaran Membangun sarana dan prasarana secara proporsional dan berkelanjutan untuk mendukung kluster produk unggulan pengembangan di setiap wilayah

No	Indikator	2022		2023		Capaian %	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	2022	2023
1	Jumlah Bantuan Armada Tangkap dan Alat Penangkapan Ikan	60	74	65	74	100	100
2	Jumlah Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan	5	2	5	1	40	20

Sumber data Dinas Perikanan Kabupaten Buru Selatan

a. Jumlah Bantuan Armada Tangkap dan Alat Penangkapan Ikan

Pada indikator ini dikategorikan sangat berhasil, dengan capaian sebesar 100 %. Program bantuan armada tangkap dan alat penangkapan ikan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas nelayan dalam menangkap ikan dan meningkatkan produksi perikanan tangkap.

Bantuan armada tangkap dan alat penangkapan ikan ini biasanya diberikan oleh pemerintah melalui dinas perikanan dan kelautan setempat. Selain itu, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, organisasi nelayan, dan perusahaan perikanan untuk memberikan bantuan armada tangkap dan alat penangkapan ikan. Namun, pemberian bantuan armada tangkap dan alat penangkapan ikan harus dilakukan secara selektif dan tepat sasaran, dengan mempertimbangkan kondisi perikanan dan lingkungan laut serta kebutuhan nelayan yang bersangkutan.

b. Jumlah Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan

Indikator ini dikategorikan sangat tidak berhasil karena dari target penyediaan prasarana pembudidayaan ikan 5 paket, hanya bisa terealisasi sebanyak 1 dengan capaian dari indikator ini hanya mencapai 20 %.

Tidak berhasilnya jumlah penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

1. Kurangnya anggaran: Pemerintah mungkin tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menyediakan prasarana pembudidayaan ikan yang memadai bagi para pembudidaya ikan. Sebagai akibatnya, pembudidaya ikan mungkin tidak dapat memperoleh fasilitas seperti kolam pembesaran, aerasi, alat tangkap, dan perlengkapan lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan produksi ikan.
2. Kurangnya infrastruktur: Infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pembudidayaan ikan, seperti jalan raya, jembatan, dan saluran air, mungkin belum memadai atau bahkan tidak ada di daerah tertentu. Hal ini dapat mempersulit transportasi dan distribusi produk perikanan, serta menghambat pertumbuhan sektor perikanan.
3. Kurangnya ketersediaan tenaga ahli: Pembudidaya ikan mungkin tidak memiliki akses ke tenaga ahli yang diperlukan untuk meningkatkan produksi ikan. Misalnya, mereka mungkin tidak memiliki akses ke ahli pakan ikan, ahli pengolahan ikan, atau ahli manajemen budidaya ikan yang dapat membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pembudidayaan ikan.
4. Kurangnya kesadaran dan pemahaman: Pembudidaya ikan mungkin tidak memahami potensi dan manfaat pembudidayaan ikan, sehingga kurang tertarik atau tidak memiliki motivasi untuk mengembangkan usaha pembudidayaan ikan. Selain itu, mereka mungkin juga tidak memahami prinsip-prinsip dasar manajemen budidaya ikan dan teknik-teknik modern yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pembudidayaan ikan.
5. Faktor lingkungan: Pembudidaya ikan mungkin menghadapi masalah lingkungan yang dapat mempengaruhi produksi ikan, seperti pencemaran air dan kekeringan. Hal ini dapat menyebabkan kematian ikan, penyakit, atau pertumbuhan yang buruk, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas produksi ikan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan jumlah penyediaan prasarana pembudidayaan ikan yang memadai, termasuk melalui peningkatan anggaran, pembangunan infrastruktur, penyediaan tenaga ahli, edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat, dan pengelolaan lingkungan yang baik.

Tabel 3.15

Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Membangun sarana dan prasarana secara proporsional dan berkelanjutan untuk mendukung kluster produk unggulan pengembangan di setiap wilayah

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	206.495.000	206.405.000	99,96
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.213.305.915	2.168.283.513	97,97
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	79.996.000	79.996.000	100

SASARAN 8

Penciptaan lapangan kerja

Hasil pengukuran Sasaran Penciptaan lapangan kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16

Indikator Sasaran Membangun sarana Penciptaan lapangan kerja

No	Indikator	2022		2023		Capaian	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	2022	2023
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6.02	0.97	5.95	0.97	Berhasil	Berhasil

Dinas Koperasi Kabupaten Buru Selatan dan BPS

a. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase dari angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan aktif mencari pekerjaan. Ini mencakup orang-orang yang tidak bekerja, tetapi aktif mencari pekerjaan dan siap untuk bekerja. Tingkat pengangguran terbuka sering kali dianggap sebagai indikator penting dari kondisi pasar tenaga kerja suatu negara dan tingkat keberhasilan kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja.

Tingkat pengangguran terbuka dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat investasi, kebijakan fiskal dan moneter, serta faktor-faktor struktural seperti demografi, pendidikan, dan tingkat keterampilan tenaga kerja.

Pemerintah sering menggunakan data tingkat pengangguran terbuka untuk memantau kesehatan ekonomi dan merancang kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran, seperti program pelatihan kerja, insentif untuk penciptaan lapangan kerja, atau kebijakan fiskal dan moneter untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menangani tingkat pengangguran terbuka dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan sumber daya yang tersedia. Berikut adalah beberapa contoh upaya yang biasa dilakukan:

1. Program Pelatihan dan Pendidikan: Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan program pelatihan keterampilan dan pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing angkatan kerja lokal. Program ini dapat membantu mengurangi kesenjangan antara kebutuhan pasar tenaga kerja dan keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja.
2. Pembangunan Infrastruktur: Investasi dalam pembangunan infrastruktur lokal, seperti jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya, dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
3. Pendukung Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dan insentif kepada UKM lokal untuk membantu mereka berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru.
4. Promosi Investasi dan Pariwisata: Melalui promosi investasi dan pariwisata, pemerintah daerah dapat menarik investasi baru dan menciptakan peluang kerja di sektor-sektor terkait.
5. Kemitraan dengan Sektor Swasta: Pemerintah daerah dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk menyelenggarakan program pelatihan, magang, atau rekrutmen yang ditujukan untuk mengurangi pengangguran.
6. Pembangunan Ekonomi Lokal: Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lokal yang berpotensi, seperti pertanian, industri kreatif, atau pariwisata berbasis budaya, dapat

membantu menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu.

7. Program Pemberdayaan Masyarakat: Program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk memberikan dukungan kepada kelompok rentan seperti pemuda, perempuan, atau penyandang disabilitas dapat membantu meningkatkan inklusi sosial dan ekonomi serta mengurangi tingkat pengangguran di kalangan kelompok tersebut.

Pemerintah daerah juga dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat, organisasi non-pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk meningkatkan efektivitas upaya mereka dalam menangani tingkat pengangguran terbuka.

Tabel 3.17

Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Penciptaan lapangan kerja

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	86.230.000	86.000.000	99,73
2	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	50.000.000	48.986.000	97,97
3	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	40.296.500	39.122.000	97,09
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	145.417.000	143.503.000	98,68
5	Program Hubungan Industrial	694.735.200	651.836.282	93,83
6	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	273.777.400	273.656.000	99,96
7	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	3.380.150.000	3.380.045.000	100
8	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha Kecil, dan usaha mikro (UMKM)	1.512.228.000	1.512.105.000	99,99
9	Program Promosi Penanaman Modal	658.261.000	652.032.500	99,05
10	Program Pelayanan Penanaman Modal	315.868.000	308.271.400	97,60
11	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	511.300.000	510.519.800	99,85
12	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	17.088.000	17.088.000	100
13	Program Penataan Desa	136.875.000	136.300.000	99,58
14	Program Perlindungan Perempuan	177.499.000	176.973.000	99,70
15	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	20.000.000	20.000.000	100

16	Program Administrasi Pemerintahan Desa	398.371.000	392.989.000	98,65
17	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	286.046.000	285.099.000	99,67

SASARAN 9

Pembentukan Dan Penguatan Tatakelola pusat usaha kecil mikro dan menengah sesuai potensi wilayah

Hasil pengukuran Sasaran Pembentukan Dan Penguatan Tatakelola pusat usaha kecil mikro dan menengah sesuai potensi wilayah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18

Indikator Sasaran Pembentukan Dan Penguatan Tatakelola pusat usaha kecil mikro dan menengah sesuai potensi wilayah

	Indikator	2022		2023		Capaian	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	2022	2023
1	Jumlah UMKM	557	3303	587	2339	100	100

Sumber Data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Buru Selatan

a. Jumlah UMKMJumlah UMKM

UMKM mengacu pada bisnis dengan modal dan tenaga kerja terbatas yang dimiliki dan dioperasikan secara swasta, seperti toko kecil, warung makan, pengrajin, dan penyedia jasa. UMKM memainkan peran penting dalam ekonomi banyak negara, termasuk Indonesia, dengan memberikan kontribusi terhadap lapangan kerja, inovasi, dan pembangunan ekonomi lokal.

Indicator Jumlah dikategorikan sangat memuaskan, hal ini dapat dilihat pada persentase target indicator sebesar 587 dan realisasinya 2339 sehingga capaian dari indikator ini sebesar 100 %.

Pada indikator ini hanya jumlah Usaha Mikro yang dinilai, karena untuk usaha menengah telah menjadi kewenangan Pererintah Provinsi.

Tabel 3.19

Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Pembentukan Dan Penguatan Tatakelola pusat usaha kecil mikro dan menengah sesuai potensi wilayah

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	86.230.000	86.000.000	99,73
2	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	50.000.000	48.986.000	97,97
3	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	40.296.500	39.122.000	97,09
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	145.417.000	143.503.000	98,68
5	Program Hubungan Industrial	694.735.200	651.836.282	93,83

6	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	273.777.400	273.656.000	99,96
7	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	3.380.150.000	3.380.045.000	100
8	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha Kecil, dan usaha mikro (UMKM)	1.512.228.000	1.512.105.000	99,99

SASARAN 10

Membentuk Klaster Pengembangan UMKM berdasarkan potensi wilayah

Hasil pengukuran Sasaran Membentuk Klaster Pengembangan UMKM berdasarkan potensi wilayah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20

Indikator Sasaran Membentuk Klaster Pengembangan UMKM berdasarkan potensi wilayah

No	Indikator	2022		2023		Capaian	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	2022	2023
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMDA) (Rp M)	16.21	198.137	16.66	61.64	100	100

Sumber Data Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buru Selatan

a. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMDA)

Untuk meningkatkan jumlah nilai investasi berskala nasional dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Penyediaan Infrastruktur yang Memadai: Infrastruktur yang baik merupakan faktor penting yang menarik bagi investor. Pemerintah perlu berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, dan energi yang memadai untuk mendukung kegiatan bisnis.
2. Perbaikan Iklim Investasi: Meningkatkan iklim investasi dengan menyederhanakan prosedur perizinan, memperbaiki regulasi, mengurangi birokrasi, dan memastikan perlindungan hukum bagi investor. Langkah-langkah ini akan memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi investor.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia akan meningkatkan kualitas tenaga kerja dan membuat pasar tenaga kerja lebih menarik bagi investor. Program pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri juga dapat meningkatkan daya saing investasi nasional.
4. Promosi Investasi: Melakukan promosi aktif untuk menarik investasi baik di dalam maupun luar negeri. Pemerintah dapat melakukan promosi melalui berbagai saluran seperti konferensi investasi, pameran perdagangan internasional, dan kampanye pemasaran.
5. Pemberian Insentif: Memberikan insentif fiskal dan non-fiskal kepada investor yang melakukan PMDN dan PMA. Insentif ini dapat berupa pembebasan pajak, keringanan tarif impor, subsidi bunga pinjaman, atau fasilitas lainnya yang menarik bagi investor.

6. **Kemitraan Publik-Privat:** Membangun kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk mengembangkan proyek-proyek investasi yang besar dan kompleks. Kemitraan ini dapat membantu mengurangi risiko investasi dan mempercepat implementasi proyek.
7. **Pengembangan Kawasan Industri dan Ekonomi:** Mengembangkan kawasan industri dan ekonomi khusus yang menyediakan fasilitas dan layanan pendukung bagi investor. Hal ini akan memudahkan proses investasi dan meminimalisir risiko yang dihadapi oleh investor.
8. **Perbaikan Tata Kelola:** Meningkatkan tata kelola perusahaan dan transparansi dalam pengelolaan investasi untuk meningkatkan kepercayaan investor.

Dengan melaksanakan upaya-upaya ini secara konsisten dan efektif, diharapkan dapat meningkatkan jumlah nilai investasi berskala nasional baik dalam bentuk PMDN maupun PMA, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Tabel 3.21

Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Membentuk Klaster Pengembangan UMKM berdasarkan potensi wilayah

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Promosi Penanaman Modal	658.261.000	652.032.500	99,05
2	Program Pelayanan Penanaman Modal	315.868.000	308.271.400	97,60
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	511.300.000	510.519.800	99,85
4	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	17.088.000	17.088.000	100

SASARAN 11

Memfasilitasi tersedianya infrastruktur dan akses modal bagi pengembangan UMKM Produktif

Hasil pengukuran Sasaran Memfasilitasi tersedianya infrastruktur dan akses modal bagi pengembangan UMKM Produktif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22

Indikator Sasaran Memfasilitasi tersedianya infrastruktur dan akses modal bagi pengembangan UMKM Produktif

No	Indikator	2022		2023		Capaian	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	2022	2023
1	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN)	1.00	6.08	1.02	3.57	100	100

Sumber Data Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buru Selatan

- a. Rasio daya serap tenaga kerja

Rasio daya serap tenaga kerja (Employment Absorption Ratio) mengacu pada kemampuan

suatu perekonomian atau sektor untuk menyerap atau menampung jumlah tenaga kerja yang tersedia. Ini adalah ukuran penting dalam mengevaluasi kesehatan ekonomi suatu negara atau sektor tertentu. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah pekerjaan yang tersedia dengan jumlah pencari kerja yang aktif.

Peningkatan rasio tenaga kerja bisa menjadi tujuan penting dalam upaya untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara atau wilayah. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasio tenaga kerja:

1. Pendidikan dan Pelatihan: Investasi dalam pendidikan dan pelatihan dapat membantu meningkatkan keterampilan dan kualifikasi tenaga kerja, sehingga membuat mereka lebih sesuai dengan permintaan pasar kerja.
2. Pengembangan Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur dapat menciptakan peluang pekerjaan langsung dan tidak langsung, seperti konstruksi jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.
3. Pengembangan Sektor Ekonomi: Mendukung pertumbuhan sektor ekonomi yang menawarkan banyak kesempatan kerja, seperti sektor jasa, teknologi, kesehatan, pariwisata, dan manufaktur.
4. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Dukungan terhadap UKM dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja lokal, sementara juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
5. Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti insentif pajak untuk perusahaan yang menciptakan lapangan kerja atau kebijakan moneter yang merangsang investasi, dapat membantu meningkatkan rasio tenaga kerja.
6. Promosi Investasi Asing: Memperkenalkan kebijakan yang menarik bagi investor asing dapat membuka peluang kerja baru dan memperluas basis ekonomi suatu negara.
7. Program Pekerja Migran: Pengelolaan program pekerja migran dengan baik dapat membantu mengisi kekosongan di sektor-sektor tertentu yang mungkin sulit diisi oleh tenaga kerja lokal.
8. Kebijakan Fleksibilitas Tenaga Kerja: Menciptakan kebijakan yang mendukung fleksibilitas dalam kontrak kerja dapat membantu menyesuaikan permintaan dan penawaran tenaga kerja.
9. Peluang Kewirausahaan: Mendorong kewirausahaan dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bisnis baru dapat membuka lapangan kerja tambahan.
10. Peningkatan Akses dan Ketersediaan Data Pasar Tenaga Kerja: Memfasilitasi akses yang lebih mudah ke informasi pasar tenaga kerja, seperti data tentang lowongan pekerjaan dan kebutuhan keterampilan, dapat membantu mengurangi kesenjangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja.

Kombinasi dari berbagai strategi ini dapat membantu meningkatkan rasio tenaga kerja dan menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih inklusif dan produktif.

Tabel 3.23

Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Memfasilitasi tersedianya infrastruktur dan akses modal bagi pengembangan UMKM Produktif

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
----	---------	------------------	-------------------	---

1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	86.230.000	86.000.000	99,73
2	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	50.000.000	48.986.000	97,97
3	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	40.296.500	39.122.000	97,09
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	145.417.000	143.503.000	98,68
5	Program Hubungan Industrial	694.735.200	651.836.282	93,83
6	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	273.777.400	273.656.000	99,96
7	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	3.380.150.000	3.380.045.000	100
8	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha Kecil, dan usaha mikro (UMKM)	1.512.228.000	1.512.105.000	99,99
9	Program Promosi Penanaman Modal	658.261.000	652.032.500	99,05
10	Program Pelayanan Penanaman Modal	315.868.000	308.271.400	97,60
11	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	511.300.000	510.519.800	99,85
12	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	17.088.000	17.088.000	100
13	Program Penataan Desa	136.875.000	136.300.000	99,58
14	Program Perlindungan Perempuan	177.499.000	176.973.000	99,70
15	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	20.000.000	20.000.000	100
16	Program Administrasi Pemerintahan Desa	398.371.000	392.989.000	98,65
17	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	286.046.000	285.099.000	99,67

SASARAN 12

Pengadaan tanah untuk peningkatan sarana prasarana pembangunan, perumahan layak huni.

Hasil pengukuran Sasaran Pengadaan tanah untuk peningkatan sarana prasarana pembangunan, perumahan layak huni dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.24**Indikator Sasaran Pengadaan tanah untuk peningkatan sarana prasarana pembangunan, perumahan layak huni.**

No	Indikator	2022		2023		Capaian	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	2022	2023
1	Rasio Pemukiman Layak Huni	87,66	91.78	89,21	91.78	100	100

Sumber Data Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buru Selatan

a. Rasio Pemukiman Layak huni

Rasio pemukiman layak huni adalah ukuran yang menggambarkan seberapa besar persentase dari total jumlah pemukiman atau hunian yang memenuhi standar tertentu untuk dihuni dengan nyaman dan aman. Standar ini dapat mencakup berbagai faktor, seperti ketersediaan air bersih, sanitasi yang memadai, aksesibilitas ke layanan kesehatan dan pendidikan, serta infrastruktur dasar lainnya.

Peningkatan rasio pemukiman layak huni adalah tujuan penting dalam upaya pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasio pemukiman layak huni:

- a. Pembangunan Infrastruktur: Membangun atau meningkatkan infrastruktur dasar seperti akses jalan yang baik, sistem air bersih, sanitasi, dan listrik dapat meningkatkan kualitas pemukiman.
- b. Program Perumahan Sehat: Mendorong program perumahan yang sehat dan terjangkau, termasuk subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dapat membantu meningkatkan akses terhadap rumah yang layak huni.
- c. Pengembangan Kawasan Perkotaan: Merencanakan dan mengembangkan kawasan perkotaan dengan cara yang berkelanjutan dan terencana dapat menciptakan lingkungan yang lebih layak huni.
- d. Regulasi dan Penegakan Hukum: Menetapkan dan menegakkan peraturan-peraturan terkait kualitas bangunan, keamanan struktural, dan standar hidup minimum dapat membantu meningkatkan kualitas pemukiman.
- e. Pemberdayaan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan pemukiman mereka sendiri dapat meningkatkan tanggung jawab dan keberlanjutan lingkungan tempat tinggal.
- f. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tinggal di tempat yang layak huni dan mempromosikan praktik-praktik sehat dalam pemukiman mereka.
- g. Program Rehabilitasi Pemukiman: Meluncurkan program rehabilitasi untuk memperbaiki pemukiman yang sudah ada dan tidak memenuhi standar dapat membantu meningkatkan rasio pemukiman layak huni.
- h. Kemitraan Publik-Swasta: Menggalang kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam pembangunan pemukiman yang layak huni dapat mempercepat pencapaian tujuan tersebut.

Meningkatkan rasio pemukiman layak huni memerlukan komitmen dari berbagai pihak dan integrasi berbagai strategi pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.

Tabel 3.25

Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Pengadaan tanah untuk peningkatan sarana prasarana pembangunan, perumahan layak huni.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pengembangan Perumahan	43.008.000	42.338.000	98,44
2	Program Kawasan Permukiman	151.559.000	149.279.000	98,50
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	224.522.000	215.346.500	95,91
4	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	3.521.484.000	3.489.110.900	99,08
5	Program Pengelolaan Tanah Kosong	163.950.000	98.870.000	60,30
6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.851.269.376	1.861.239.726	65,28
7	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.010.796.100	1.561.103.000	77,64
8	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	778.360.500	681.320.500	87,53
9	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	4.012.557.845	3.493.588.450	87,07
10	Program Pengembangan Permukiman	1.695.524.000	1.559.318.300	91,97
11	Program Penataan Bangunan Gedung	11.776.996.933	9.559.494.350	81,17
12	Program Penyelenggaraan Jalan	22.992.287.750	19.640.534.098	85,42
13	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	4.816.949.000	4.441.309.988	92,20

SASARAN 13

Pendidikan Gratis Dengan pola yang adil, professional berorientasi output

Hasil pengukuran Sasaran Pendidikan Gratis Dengan pola yang adil, professional berorientasi output dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.26**Indikator Sasaran Pendidikan Gratis Dengan pola yang adil, professional berorientasi output**

No	Indikator	2022		2023		Capaian	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	2022	2023
1	APM SD/MI	98,32	96.96	98,34	96.99	98,61	98,62
2	APM SMP/MTs	93,32	79.97	93,32	82.31	85,69	88,20

Sumber Data BPS Kabupaten Buru Selatan

a. APM SD/MI

Dalam konteks pengukuran partisipasi sekolah, idealnya, APM SD/MI harus tinggi untuk menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia sekolah telah terdaftar dan bersekolah. Namun, angka ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti aksesibilitas sekolah, ketersediaan fasilitas pendidikan, kondisi sosial-ekonomi keluarga, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi partisipasi anak-anak dalam pendidikan.

Peningkatan angka partisipasi Murni, khususnya di tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), memerlukan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan:

1. Aksesibilitas Pendidikan: Memastikan bahwa semua anak memiliki akses yang setara dan mudah ke institusi pendidikan. Ini termasuk pembangunan sekolah di daerah terpencil, transportasi yang terjangkau, dan fasilitas pendukung lainnya.
2. Program Penghapusannya Biaya Pendidikan: Menyediakan program penghapusannya biaya pendidikan untuk membantu keluarga yang tidak mampu agar dapat mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah tanpa biaya yang memberatkan.
3. Kampanye Kesadaran: Melakukan kampanye kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan dampak positifnya bagi masa depan anak-anak. Hal ini dapat dilakukan melalui media massa, pertemuan komunitas, dan program-program informasi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau LSM.
4. Peningkatan Kualitas Sekolah: Meningkatkan kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh sekolah dengan memperbaiki kurikulum, meningkatkan kualitas pengajaran, dan menyediakan fasilitas pendukung yang memadai.
5. Bantuan Khusus untuk Anak-anak Rentan: Memberikan bantuan khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin, anak-anak dengan disabilitas, anak-anak yang tinggal di daerah konflik atau bencana, dan kelompok-kelompok rentan lainnya untuk memastikan bahwa mereka dapat mengakses pendidikan.
6. Program Inklusi Pendidikan: Menerapkan program inklusi pendidikan yang memungkinkan anak-anak dengan kebutuhan khusus atau anak-anak dari kelompok minoritas untuk mendapatkan akses yang sama ke pendidikan.
7. Partnership dengan Komunitas dan LSM: Bekerja sama dengan organisasi masyarakat lokal dan LSM untuk mendukung upaya peningkatan partisipasi sekolah, termasuk penyediaan bantuan finansial, bantuan logistik, dan dukungan sosial bagi keluarga yang membutuhkan.
8. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap program-program peningkatan partisipasi sekolah untuk memastikan efektivitasnya dan membuat perbaikan jika diperlukan.

Melalui upaya-upaya ini, diharapkan angka partisipasi sekolah dapat ditingkatkan sehingga semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan

yang berkualitas dan memenuhi potensi mereka.

b. APM SMP/MTs

Angka Partisipasi Sekolah (APM) untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) adalah persentase jumlah siswa yang terdaftar di SMP atau MTs dalam satu tahun akademik tertentu, dibandingkan dengan jumlah total populasi usia sekolah menengah pertama di suatu daerah atau negara pada periode waktu yang sama.

Di Indonesia, untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah SMP/MTs, beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah:

1. Aksesibilitas Sekolah: Meningkatkan aksesibilitas sekolah dengan membangun lebih banyak sekolah SMP/MTs di daerah-daerah terpencil atau di wilayah yang jauh dari pusat perkotaan.
2. Program Beasiswa dan Bantuan Keuangan: Menyediakan program beasiswa dan bantuan keuangan bagi keluarga yang kurang mampu agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTs.
3. Kampanye Kesadaran: Melakukan kampanye kesadaran tentang pentingnya pendidikan menengah pertama bagi anak-anak dan keluarga mereka. Kampanye ini dapat dilakukan melalui berbagai media sosial, acara komunitas, dan pertemuan orang tua.
4. Program Pendidikan Gratis: Menerapkan program pendidikan gratis untuk sekolah-sekolah SMP/MTs untuk mengurangi beban biaya pendidikan bagi keluarga.
5. Peningkatan Kualitas Pendidikan: Meningkatkan kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh SMP/MTs melalui penyediaan kurikulum yang relevan dan menarik, serta pelatihan bagi guru-guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka.
6. Bantuan Transportasi: Menyediakan bantuan transportasi bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah untuk memudahkan mereka dalam mengakses pendidikan.
7. Pendekatan Inklusi: Menerapkan pendekatan inklusi dalam pendidikan untuk memastikan bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus juga dapat mengakses pendidikan di sekolah SMP/MTs.
8. Kerjasama dengan Pihak Swasta dan LSM: Bermitra dengan perusahaan swasta dan LSM untuk mendukung program-program peningkatan partisipasi sekolah SMP/MTs, seperti memberikan beasiswa atau bantuan lainnya kepada siswa yang membutuhkan.

Dengan melakukan upaya-upaya ini secara berkelanjutan dan terkoordinasi, diharapkan angka partisipasi sekolah SMP/MTs dapat ditingkatkan, sehingga semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang menengah pertama.

Tabel 3.27

Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Pendidikan Gratis Dengan pola yang adil, professional berorientasi output

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pengelolaan Pendidikan	57.410.288.000	49.822.264.360	86,78
2	Program Pembinaan Perpustakaan	383.843.000	383.179.000	99,83

SASARAN 14**Membangun Pendidikan anak usia dini (PAUD) untuk mencetak landasan yang kokoh bagi penguatan SDM**

Hasil pengukuran Sasaran Membangun Pendidikan anak usia dini (PAUD) untuk mencetak landasan yang kokoh bagi penguatan SDM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.28**Indikator Sasaran Membangun Pendidikan anak usia dini (PAUD) untuk mencetak landasan yang kokoh bagi penguatan SDM**

No	Indikator	2022		2023		Capaian	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	2022	2023
1	Jumlah siswa pada jenjang TK/RA	3152	1873	3222	2246	59.42	69.70

Sumber Data Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan

a. Jumlah siswa pada jenjang TK/RA

Jumlah siswa pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA) merupakan data penting dalam mengevaluasi akses dan partisipasi anak-anak pra-sekolah terhadap pendidikan formal. Data ini memberikan informasi tentang seberapa banyak anak-anak yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di institusi TK/RA dalam suatu wilayah atau negara.

Pengumpulan data jumlah siswa pada jenjang TK/RA dilakukan melalui registrasi atau sensus yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau lembaga pendidikan setempat. Setiap institusi TK/RA berkewajiban untuk melaporkan jumlah siswa yang terdaftar pada setiap tahun akademik kepada otoritas pendidikan terkait.

Data jumlah siswa TK/RA digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk:

1. Perencanaan Pendidikan: Data ini membantu dalam perencanaan kapasitas sekolah, alokasi sumber daya, dan pengembangan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak pra-sekolah.
2. Evaluasi Kebijakan: Data jumlah siswa TK/RA digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pendidikan pra-sekolah, seperti program-program pemerintah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak-anak usia dini.
3. Pengambilan Keputusan: Informasi ini membantu dalam pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran, pembangunan infrastruktur, dan program-program dukungan pendidikan bagi anak-anak pra-sekolah.
4. Monitoring dan Evaluasi: Data jumlah siswa TK/RA juga digunakan untuk memantau tren partisipasi anak-anak pra-sekolah dalam pendidikan formal dari waktu ke waktu dan mengevaluasi pencapaian target-target pendidikan.
5. Dengan memantau dan mengumpulkan data jumlah siswa pada jenjang TK/RA secara teratur, pemerintah dan lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa anak-anak pra-sekolah memiliki akses yang cukup dan setara terhadap pendidikan yang berkualitas dan relevan.

Tabel 3.29**Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Membangun Pendidikan anak usia dini (PAUD) untuk mencetak landasan yang kokoh bagi penguatan SDM**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
----	---------	---------------	----------------	---

1	Program Pengelolaan Pendidikan	57.410.288.000	49.822.264.360	86,78
---	--------------------------------	----------------	----------------	-------

SASARAN 15	Tersedianya akses Kesehatan bagi masyarakat
-------------------	--

Hasil pengukuran Sasaran Penciptaan lapangan kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.30

Indikator Sasaran Tersedianya akses Kesehatan bagi masyarakat

No	Indikator	2022		2023		Capaian	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	2022	2023
1	Rasio posyandu persatuan balita (/1000)	12.52	13.8	12.71	17.34	100	100
2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk (/1000)	0.02	0.59	0.02	0.67	100	100
3	Rasio RS persatuan penduduk (/1000)	0.02	0.02	0.02	0.025	100	100
4	Rasio Dokter persatuan penduduk (/1000)	0.23	0.02	0.24	0.27	100	100

Sumber Data Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Buru Selatan

a. Rasio posyandu persatuan balita (/1000)

Rasio Posyandu Persatuan Balita adalah perbandingan antara jumlah Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) dengan jumlah balita di suatu wilayah atau daerah. Posyandu merupakan salah satu sarana kesehatan yang berperan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, terutama untuk balita dan ibu hamil.

Untuk menjaga kesehatan balita dan memantau perkembangan mereka, setiap balita diharapkan mendapat layanan kesehatan secara rutin di Posyandu. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio Posyandu Persatuan Balita, semakin baik pula akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pemantauan pertumbuhan balita.

Penyediaan Posyandu yang memadai dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Posyandu merupakan faktor penting dalam meningkatkan rasio Posyandu Persatuan Balita. Dengan demikian, kesehatan balita dapat dipantau dengan lebih baik dan upaya pencegahan serta penanganan penyakit pada balita dapat dilakukan secara efektif.

b. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk (/1000)

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatuan Penduduk adalah perbandingan antara jumlah Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), Poliklinik (klinik yang menyediakan pelayanan medis), atau Pustu (Pusat Kesehatan Desa atau Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu) dengan jumlah penduduk di suatu wilayah atau daerah. Rasio ini membantu dalam mengevaluasi ketersediaan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan di tingkat masyarakat.

Puskesmas merupakan unit teknis pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan disatu atau

sebagian wilayah kecamatan yang mempunyai fungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama.

dalam rangka pencapaian keberhasilan fungsi puskesmas sebagai ujung tombak pembangunan bidang kesehatan. Sedangkan poliklinik merupakan balai pengobatan umum (tidak untuk perawatan atau pasien menginap).

Indicator rasio puskesmas, poliklinik, pusat persatuan penduduk walaupun mencapai target dan dikategorikan sangat memuaskan, hal ini dapat dilihat dari target kinerja indicator sebesar 0.02 realisasinya 0.67 sehingga capaian dari indicator ini sebesar 100 % atau dalam kategori sangat memuaskan.

Permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. keterbatasan alokasi anggaran dalam pembangunan puskesmas dan pusat di desa-desa yang jauh jangkauannya ke kecamatan.
2. kurangnya penyebaran pusat di desa-desa yang jauh jangkauannya dengan kecamatan dimana puskesmas berada.
3. Masih belum tersedianya sarana prasarana poliklinik di Kabupaten Buru Selatan.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk pencapaian target yaitu :

1. Dinas Kesehatan buru selatan terus berupaya dalam mengusulkan anggaran untuk pembangunan pusat dan puskesmas, agar penyebaran puskesmas dan pusat de seluruh kecamatan merata.
2. Perencanaan pembangunan poliklinik di kecamatan namrole kabupaten buru selatan.

c. Rasio RS persatuan penduduk (/1000)

Rumah sakit merupakan tempat dimana orang sakit mencari dan menerima pelayanan kedokteran serta tempat dimana pendidikan klinik untuk mahasiswa kedokteran, perawat dan berbagai tenaga profesi kesehatan lainnya diselenggarakan.

Fungsi rumah sakit memberikan pelayanan rujukan medik spesialistik dan subspecialis menyediakan dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan pasien sarana pendidikan dan pelatihan di bidang kedokteran dan kedokteran gigi jenjang diploma, dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis konsultan, magister, doktor dan pendidikan berkelanjutan bidang kedokteran.

Capaian indicator Rasio Rumah Sakit persatuan Penduduk dikategorikan cukup berhasil, dari target indicator 0.02 % realisasinya 0,025 % dengan capaian 100 %.

Untuk meningkatkan indicator ini maka ada beberapa upaya yang dilakukan diantaranya :

1. Terus meningkatkan pemanfaatan dan mutu pelayanan rumah sakit.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan Rumah Sakit.
3. Menyediakan peralatan, obat dan perbekalan Kesehatan sesuai standar kebutuhan.
4. Mengembangkan SDM pegawai agar dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan rumah sakit.

d. Rasio Dokter persatuan penduduk (/1000)

Dimensi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sangat ditentukan oleh jumlah tenaga kesehatan. Kecukupan keterbandingan antara tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani akan memberikan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Tentunya kondisi tersebut memerlukan dukungan faktor lainnya misalkan kelengkapan sarana pelayanan kesehatan, birokrasi yang sederhana dan perilaku lingkungan pelayanan kesehatan,

Tenaga kesehatan yang ada terdiri dari berbagai spesialisasi diantaranya dokter.

Pada Tahun 2023 rasio tenaga dokter ditargetkan sebesar 0,24 dengan realisasi sebesar 0,27 dengan capaian sebesar 100 %.

kesehatan bergantung pada sumber daya manusia dalam semua aspek agar bisa berjalan secara efektif, Tenaga Dokter dengan jumlah dan kualitas yang memadai sangat penting untuk mencapai indikator kesehatan yang optimal karena secara langsung mempengaruhi kualitas layanan kesehatan yang diberikan. Untuk itu Tenaga dokter sangat penting untuk memastikan pelayanan kesehatan berfungsi dengan semestinya. Kekurangan dan maldistribusi tenaga dokter merupakan masalah umum yang dihadapi banyak daerah dan menjadi tantangan dalam peningkatan derajat Kesehatan. Untuk itu perlu adanya perencanaan dan pemerataan pembagian tenaga dokter yang merata ke seluruh wilayah kabupaten buru selatan.

Tabel 3.31

Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Tersedianya akses Kesehatan bagi masyarakat

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	40.361.810.504	36.084.330.792	89,40
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	670.000.000	500.000.000	74,63
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	106.938.000	106.906.000	99,97

SASARAN 16

Meningkatkan kebersihan dan Kesehatan lingkungan di seluruh wilayah buru selatan

Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan kebersihan dan Kesehatan lingkungan di seluruh wilayah buru selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.32

Indikator Sasaran Meningkatkan kebersihan dan Kesehatan lingkungan di seluruh wilayah buru selatan

No	Indikator	2022		2023		Capaian	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	2022	2023
1	Jumlah rumah tangga bersanitasi	49.1	73.67	50.92	57.81	100	100

Sumber Data Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Buru Selatan

Alasan menghitung rumah tangga bersanitasi adalah untuk memonitor dan mengevaluasi tingkat keberhasilan program sanitasi dan higiene yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi kesehatan dalam meningkatkan akses dan praktik sanitasi dan higiene di masyarakat. Dengan mengetahui jumlah rumah tangga yang memenuhi indikator sanitasi dan higiene, maka pemerintah atau organisasi kesehatan dapat menentukan prioritas dan strategi untuk meningkatkan akses dan praktik sanitasi dan higiene di masyarakat secara lebih efektif.

Indikator jumlah rumah tangga bersanitasi targetnya sebesar 50,92 dengan realisasi sebesar 57.81 sehingga capaian dari indikator ini sebesar 100 % atau dikategorikan sangat berhasil.

Keberhasilan dari indikator ini dapat terlihat pada praktik-praktik yang dilakukan diantaranya :

1. Akses terhadap toilet yang aman dan layak: Toilet yang aman dan layak adalah toilet yang dilengkapi dengan sistem pembuangan limbah, memiliki akses yang memadai, serta memiliki fasilitas yang memadai untuk membersihkan toilet dan mencuci tangan. Sebuah rumah tangga dianggap memiliki akses terhadap toilet yang aman dan layak jika memiliki akses ke toilet yang memenuhi kriteria tersebut.
2. Akses terhadap air bersih: Rumah tangga dianggap memiliki akses terhadap air bersih jika memiliki akses ke sumber air yang bersih dan aman untuk dikonsumsi.
3. Praktik higiene pribadi yang baik: Praktik higiene pribadi yang baik meliputi mencuci tangan dengan sabun sebelum makan atau setelah buang air kecil atau besar, serta menjaga kebersihan gigi dan kuku. Sebuah rumah tangga dianggap memiliki praktik higiene pribadi yang baik jika seluruh anggota rumah tangga melakukan praktik ini secara teratur.
4. Penanganan sampah yang baik: Penanganan sampah yang baik meliputi membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah organik dan anorganik, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah. Sebuah rumah tangga dianggap memiliki penanganan sampah yang baik jika memenuhi kriteria tersebut.

Tabel 3.33

Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Meningkatkan kebersihan dan Kesehatan lingkungan di seluruh wilayah buru selatan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	40.361.810.504	36.084.330.792	89,40
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	670.000.000	500.000.000	74,63
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	106.938.000	106.906.000	99,97
4	Program Pengembangan Perumahan	43.008.000	42.338.000	98,44
5	Program Kawasan Permukiman	151.559.000	149.279.000	98,50
6	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	224.522.000	215.346.500	95,91
7	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	3.521.484.000	3.489.110.900	99,08
8	Program Pengelolaan Tanah Kosong	163.950.000	98.870.000	60,30
9	Program Pengelolaan Sumber	2.851.269.376	1.861.239.726	65,28

	Daya Air (SDA)			
10	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.010.796.100	1.561.103.000	77,64
11	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	778.360.500	681.320.500	87,53
12	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	4.012.557.845	3.493.588.450	87,07
13	Program Pengembangan Permukiman	1.695.524.000	1.559.318.300	91,97
14	Program Penataan Bangunan Gedung	11.776.996.933	9.559.494.350	81,17
15	Program Penyelenggaraan Jalan	22.992.287.750	19.640.534.098	85,42
16	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	4.816.949.000	4.441.309.988	92,20
17	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.086.583.000	1.086.582.480	100
18	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	2.780.433.365	2.530.838.980	91,02
19	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	432.958.200	432.958.020	100
20	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	161.235.035	161.235.035	100
21	Program Pengelolaan Persampahan	434.888.600	423.937.500	97,48

SASARAN 17

Pembentukan dan pengembangan desa wisata

Hasil pengukuran Sasaran Pembentukan dan pengembangan desa wisata dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.34

Indikator Sasaran Pembentukan dan pengembangan desa wisata

No	Indikator	2022		2023		Capaian	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	2022	2023
1	Pengembangan objek wisata unggulan	1	2	1	3	100	100

Pengembangan objek wisata unggulan merupakan strategi penting dalam meningkatkan daya tarik pariwisata suatu daerah.

Indikator ini pada tahun 2023 ditargetkan 1 pengembangan objek wisata unggulan dan realisasinya terdapat 3 destinasi wisata yang dikembangkan oleh Pemerintah di antaranya destinasi Pantai wamsoba, destinasi wisata desa namrinat dan destinasi wisata Pantai mangrove dusun lepe, diantara 3 destinasi di atas yang dikelola Pemerintah ada juga 3 destinasi wisata yang di Kelola oleh pihak swasta diantaranya Pantai wali, Pantai air babunyi kecamatan leksula dan Pantai masnana.

Pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan objek wisata unggulan melalui berbagai upaya yang terencana dan terintegrasi. Berikut adalah beberapa upaya yang biasanya dilakukan pemerintah:

1. Pengembangan Infrastruktur: Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur yang mendukung objek wisata unggulan, seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan wisatawan.
2. Pemberian Insentif dan Dukungan Keuangan: Pemerintah dapat memberikan insentif, bantuan, atau pinjaman kepada pengusaha dan investor yang berinvestasi dalam pengembangan objek wisata unggulan. Insentif ini bisa berupa keringanan pajak, subsidi, atau bantuan modal.
3. Pengembangan Kapasitas: Pemerintah dapat mengembangkan kapasitas sumber daya manusia terkait industri pariwisata, seperti pelatihan untuk pemandu wisata, petugas kebersihan, pengelola destinasi, dan lain sebagainya. Dengan memiliki SDM yang berkualitas, layanan terhadap wisatawan dapat ditingkatkan.
4. Promosi dan Pemasaran: Pemerintah dapat melakukan promosi dan pemasaran secara aktif untuk memperkenalkan objek wisata unggulan kepada pasar wisatawan potensial, baik di dalam maupun di luar negeri. Promosi bisa dilakukan melalui kampanye promosi, partisipasi dalam pameran pariwisata, media sosial, dan situs web pariwisata.
5. Pengelolaan Lingkungan dan Kebersihan: Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar objek wisata unggulan. Ini termasuk pengelolaan sampah, pemeliharaan taman, konservasi alam, dan perlindungan hewan atau tumbuhan langka.
6. Penyediaan Informasi dan Pelayanan: Pemerintah dapat menyediakan informasi yang lengkap dan akurat tentang objek wisata unggulan melalui brosur, papan informasi, dan pusat informasi wisata. Selain itu, pelayanan kepada wisatawan seperti pemandu wisata, petugas kebersihan, dan petugas keamanan juga harus ditingkatkan.
7. Pengaturan dan Penegakan Peraturan: Pemerintah perlu mengatur dan menegakkan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan objek wisata unggulan, seperti peraturan tentang pariwisata, kebersihan, keamanan, dan perlindungan lingkungan. Hal ini penting untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan wisatawan.
8. Pengembangan Produk dan Atraksi Wisata: Pemerintah dapat mendorong pengembangan produk wisata dan atraksi baru di sekitar objek wisata unggulan untuk menarik minat wisatawan yang lebih luas. Ini bisa berupa pengembangan taman rekreasi, tempat wisata belanja, restoran, galeri seni, atau wahana permainan.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut secara berkelanjutan dan terkoordinasi, diharapkan objek wisata unggulan dapat menjadi destinasi yang lebih menarik, berdaya saing, dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah.

Tabel 3.35**Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Pembentukan dan pengembangan desa wisata**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pengembangan Kebudayaan	552.790.000	537.827.700	97,29
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	602.426.200	438.745.767	72,83
3	Program Pemasaran Pariwisata	410.806.000	395.325.537	96,23

SASARAN 18**Pengembangan potensi pariwisata daerah secara profesional**

Hasil pengukuran Sasaran Pengembangan potensi pariwisata daerah secara profesional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.36**Indikator Sasaran Pengembangan potensi pariwisata daerah secara profesional**

No	Indikator	2022		2023		Capaian %	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	2022	2023
1	Tersedianya SDM profesional di bidang pariwisata	5	16	5	25	100	100

Dinas Pariwisata Kabupaten Buru Selatan

SDM (Sumber Daya Manusia) profesional di bidang pariwisata memiliki kemampuan untuk mengelola dan mempromosikan destinasi wisata secara efektif. Mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang sejarah, budaya, geografi, dan keunikan destinasi wisata.

Indikator ini ditargetkan sebesar 5 orang dengan realisasi sebanyak 25 orang sehingga capaian dari indikator ini sebesar 100 %.

Tenaga kerja pariwisata yang bersertifikat merujuk kepada individu yang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan formal dalam bidang pariwisata dan telah memperoleh sertifikasi yang menunjukkan bahwa mereka memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang relevan untuk bekerja dalam industri pariwisata.

Keberadaan tenaga kerja profesional di bidang pariwisata yang bersertifikat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan profesionalisme dalam industri pariwisata. Mereka memberikan jaminan kepada pelanggan bahwa mereka akan menerima layanan yang baik dan berkualitas dari individu yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang terbukti dalam bidang pariwisata. Selain itu, memiliki sertifikasi juga dapat meningkatkan peluang karir dan mobilitas kerja bagi tenaga kerja pariwisata.

Tabel 3.37

Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Pengembangan potensi pariwisata daerah secara profesional

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pengembangan Kebudayaan	552.790.000	537.827.700	97,29
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	602.426.200	438.745.767	72,83
3	Program Pemasaran Pariwisata	410.806.000	395.325.537	96,23

SASARAN 19	Mendorong aktifitas keagamaan yang bersinergi dengan budaya lokal
-------------------	--

Hasil pengukuran Sasaran Mendorong aktifitas keagamaan yang bersinergi dengan budaya lokal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.38

Indikator Sasaran Mendorong aktifitas keagamaan yang bersinergi dengan budaya lokal

No	Indikator	2022		2023		Capaian	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	2022	2023
1	Rasio tempat ibadah per 1000 penduduk	1.73	2.44	1.68	2.44	100	100

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan

Rasio tempat ibadah persatuan penduduk mengacu pada perbandingan jumlah tempat ibadah yang tersedia dengan jumlah penduduk dalam suatu daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan tempat ibadah yang memadai bagi masyarakat setempat untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya. Adapun beberapa tujuan dari memiliki rasio tempat ibadah persatuan penduduk yang memadai antara lain:

1. Pengakuan dan Perlindungan Kebebasan Beragama: Memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menjalankan keyakinan dan agamanya sesuai dengan kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara.
2. Mendorong Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama: Dengan tersedianya tempat ibadah yang memadai bagi semua agama dan kepercayaan, diharapkan dapat mendorong toleransi, penghargaan, dan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat.
3. Kesejahteraan Spiritual dan Psikologis: Tempat ibadah memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan spiritual dan psikologis masyarakat. Dengan memiliki akses yang mudah ke tempat ibadah, masyarakat dapat lebih mudah menjalankan praktik keagamaannya dan mencari kedamaian batin.

4. PEMBERDAYAAN KOMUNITAS AGAMA: Dengan tersedianya tempat ibadah yang memadai, komunitas agama dapat lebih mudah menyelenggarakan kegiatan keagamaan, pendidikan agama, dan berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.
5. Pentingnya sebagai Pusat Kegiatan Sosial: Tempat ibadah juga sering menjadi pusat kegiatan sosial, seperti acara sosial, pertemuan masyarakat, dan kegiatan kemanusiaan. Keberadaan tempat ibadah yang memadai dapat memfasilitasi berbagai kegiatan sosial tersebut.
6. Membangun Identitas dan Karakter Lokal: Tempat ibadah sering menjadi simbol identitas dan karakter suatu komunitas atau daerah. Dengan memiliki tempat ibadah yang beragam dan unik, sebuah daerah dapat memperkuat identitas budaya dan karakter lokalnya.

Pada indikator ini ditargetkan rasio tempat ibadah di kabupaten buru selatan sebesar 1.68 dengan realisasi sebesar 2.44, hal ini dapat dilihat pada total tempat ibadah di kabupaten buru Selatan sebanyak 193 unit yang tersebar di semua kecamatan, dengan jumlah penduduk Kabupaten Buru Selatan pada Tahun 2023 sebesar 79.017 jiwa.

Dalam prakteknya, rasio tempat ibadah persatuan penduduk yang memadai sering kali menjadi indikator penting dalam mengukur kesejahteraan sosial dan keberagaman agama dalam suatu masyarakat. Upaya untuk meningkatkan rasio tempat ibadah persatuan penduduk biasanya melibatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat setempat untuk memastikan kebutuhan keagamaan masyarakat terpenuhi dengan baik.

Tabel 3.39

Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Mendorong aktifitas keagamaan yang bersinergi dengan budaya lokal

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	10.147.821.000	9.913.963.000	97,70

SASARAN 20

Peningkatan harkat dan martabat serta kualitas hidup bagi penyandang masalah

Hasil pengukuran Sasaran Peningkatan harkat dan martabat serta kualitas hidup bagi penyandang masalah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.40

Indikator Sasaran Peningkatan harkat dan martabat serta kualitas hidup bagi penyandang masalah

No	Indikator	2022		2023		Capaian	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	2022	2023
1	Sarana social seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	1	1	1	1	100	100

Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan

perlindungan, perawatan, dan rehabilitasi bagi individu yang membutuhkan.

Sarana social memberikan perlindungan, perawatan, dan bantuan kepada individu yang membutuhkan, namun sasaran dan fokus pelayanan mereka berbeda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kelompok yang dilayani. Melalui sarana sosial ini, diharapkan individu yang kurang beruntung atau rentan dapat mendapatkan perawatan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Tabel 3.41

Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Peningkatan harkat dan martabat serta kualitas hidup bagi penyandang masalah

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pemberdayaan Sosial	126.365.000	126.325.000	99,97
2	Program Rehabilitasi Sosial	88.069.000	87.990.000	99,91
3	Program perlindungan dan jaminan sosial	664.354.000	664.314.000	99,99

SASARAN 21	Terwujudnya tata Pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas KKN
-------------------	--

Hasil pengukuran Sasaran Terwujudnya tata Pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas KKN dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.42

Indikator Sasaran Terwujudnya tata Pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas KKN

No	Indikator	2022		2023		Capaian	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	2022	2023
1	Indeks Reformasi Birokras	100	-	100	36.52	-	36.52

Sumber Data Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) adalah salah satu indikator atau alat pengukuran yang digunakan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dan kemajuan dalam upaya reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah serangkaian upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik di sektor birokrasi atau administrasi pemerintahan.

Meningkatkan nilai reformasi birokrasi memerlukan upaya yang terencana dan berkelanjutan dari pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan terkait. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai reformasi birokrasi:

1. Penguatan Kebijakan dan Peraturan: Menguatkan kebijakan dan peraturan yang mendukung reformasi birokrasi, termasuk regulasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Peningkatan Keterbukaan dan Partisipasi Publik: Mendorong keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dengan menyediakan mekanisme untuk pengawasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi.
3. Peningkatan Keterampilan Pegawai: Memberikan pelatihan dan pengembangan

keterampilan kepada pegawai birokrasi agar mereka memiliki kemampuan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

4. Penggunaan Teknologi Informasi: Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses administrasi dan pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas informasi serta layanan.
5. Pengukuran Kinerja dan Evaluasi: Menetapkan indikator kinerja dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja birokrasi, serta menggunakan hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan dan inovasi dalam sistem birokrasi.
6. Pemberdayaan Masyarakat: Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penilaian kinerja birokrasi, serta memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.
7. Kolaborasi antarinstansi dan Swasta: Mendorong kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan pelayanan publik, termasuk dengan mengembangkan kemitraan publik-swasta (KPS) dalam pengelolaan infrastruktur dan pelayanan publik.
8. Penerapan Good Governance: Mendorong penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
9. Promosi Budaya Organisasi yang Positif: Membangun budaya organisasi yang positif dan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang inklusif, berorientasi pada pelayanan, dan menghargai inovasi dan kreativitas.
10. Monitoring dan Pengawasan Independen: Memperkuat mekanisme monitoring dan pengawasan independen terhadap kinerja birokrasi, termasuk dengan melibatkan lembaga pengawas eksternal dan auditor independen.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut secara serius dan berkesinambungan, diharapkan nilai reformasi birokrasi dapat terus meningkat, sehingga pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan memenuhi harapan masyarakat.

Indikator RB berfokus pada 13 OPD diantaranya Bappeda, Inspektorat, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPKAD, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Sosial, BKPSDM, Bagian Hukum, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perpustakaan dan Dinas Koperasi.

Tabel 3.43

Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Terwujudnya tata Pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas KKN

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	81.636.776.139	67.170.567.388	82
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.728.946.900	2.706.031.924	99,16
3	Program Penelitian Dan	970.829.000	965.740.731	99,48

	Pengembangan Daerah			
4	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.090.432.900	1.073.027.828	98,40
5	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.009.345.500	1.008.394.616	99,91
6	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	500.341.000	500.340.956	100
7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	40.361.810.504	36.084.330.792	89,40
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	670.000.000	500.000.000	74,63
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	106.938.000	106.906.000	99,97
10	Program Promosi Penanaman Modal	658.261.000	652.032.500	99,05
11	Program Pelayanan Penanaman Modal	315.868.000	308.271.400	97,60
12	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	511.300.000	510.519.800	99,85
13	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	17.088.000	17.088.000	100
14	Program Pendaftaran Penduduk	482.126.400	480.951.700	99,76
15	Program Pencatatan Sipil	79.319.000	78.991.000	99,59
16	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	3.203.744.300	3.182.848.728	99,35
17	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	620.524.000	619.422.646	99,82
18	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	793.809.000	764.029.620	96,25
19	Program Pemberdayaan Sosial	126.365.000	126.325.000	99,97
20	Program Rehabilitasi Sosial	88.069.000	87.990.000	99,91
21	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	664.354.000	664.314.000	99,99
22	Program Penanganan Bencana	88.288.000	88.220.000	99,92
23	Program Kepegawaian Daerah	6.112.986.000	6.112.650.000	99,99
24	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.014.535.000	969.653.000	95,58
25	Program Informasi Dan	440.050.000	439.910.000	99,97

	Komunikasi Publik			
26	Program Aplikasi Informatika	146.367.000	143.496.850	98,04
27	Program Pembinaan Perpustakaan	383.843.000	383.179.000	99,83
28	Program Pengelolaan Arsip	6.051.000	6.051.000	100
29	Program Perencanaan Tenaga Kerja	86.230.000	86.000.000	99,73
30	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	50.000.000	48.986.000	97,97
31	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	40.296.500	39.122.000	97,09
32	Program Penempatan Tenaga Kerja	145.417.000	143.503.000	98,68
33	Program Hubungan Industrial	694.735.200	651.836.282	93,83
34	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	273.777.400	273.656.000	99,96
35	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	3.380.150.000	3.380.045.000	100
36	Program pemberdayaan usaha menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.512.228.000	1.512.105.000	99,99
37	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	289.514.000	267.120.000	92,26

SASARAN 22

Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah dalam menjalankan fungsinya secara efektif dan profesional

Hasil pengukuran Sasaran Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah dalam menjalankan fungsinya secara efektif dan profesional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.44

Indikator Sasaran Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah dalam menjalankan fungsinya secara efektif dan profesional

No	Indikator	2022		2023		Capaian	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	2022	2023
1	Persentase kinerja ASN	100	70	100	70	70	70

Sumber Data BKPSDM Kabupaten Buru Selatan

Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) merujuk pada seberapa baik individu ASN menjalankan tugas-tugas mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh instansi pemerintah tempat mereka bekerja. Berikut adalah beberapa aspek yang penting dalam penjelasan tentang kinerja ASN:

1. Pencapaian Tujuan dan Target: Kinerja ASN dinilai berdasarkan kemampuannya untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja atau kebijakan organisasi. Ini dapat mencakup pencapaian target kuantitatif maupun kualitatif yang relevan dengan bidang tugas masing-masing ASN.

2. **Kualitas Pelayanan:** Sebagian besar ASN berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kinerja mereka juga dinilai berdasarkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada publik. Hal ini mencakup responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efisiensi dalam memberikan pelayanan, dan kepuasan pelanggan.
3. **Kedisiplinan:** Kinerja ASN juga mencakup kedisiplinan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Ini termasuk kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang berlaku, serta kepatuhan terhadap jadwal kerja dan etika kerja yang baik.
4. **Kemampuan Kerja:** Kemampuan ASN dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan juga menjadi faktor penting dalam penilaian kinerja. Ini mencakup kemampuan teknis dan profesional yang relevan dengan bidang tugas masing-masing ASN.
5. **Kreativitas dan Inovasi:** ASN juga dinilai berdasarkan kemampuan mereka untuk memberikan kontribusi baru atau solusi inovatif terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi atau masyarakat. Kreativitas dan inovasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.
6. **Komitmen dan Motivasi:** Kinerja ASN juga dipengaruhi oleh tingkat komitmen dan motivasi mereka terhadap pekerjaan. ASN yang memiliki komitmen tinggi cenderung lebih bersemangat dan berdedikasi dalam menjalankan tugas-tugas mereka.
7. **Evaluasi Diri dan Pengembangan Diri:** Seorang ASN juga diharapkan untuk melakukan evaluasi diri secara teratur, mengidentifikasi area-area di mana mereka perlu meningkatkan kinerja, dan mengembangkan diri melalui pelatihan dan pengembangan profesional.

Penilaian kinerja ASN biasanya dilakukan secara teratur oleh atasan langsung atau oleh tim penilai yang ditunjuk oleh organisasi. Hasil penilaian kinerja dapat digunakan untuk memberikan umpan balik kepada ASN, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, dan mengambil keputusan terkait promosi, penghargaan, atau pengembangan karir.

Tabel 3.45

Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah dalam menjalankan fungsinya secara efektif dan profesional

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Kepegawaian Daerah	6.112.986.000	6.112.650.000	99,99
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.014.535.000	969.653.000	95,58

SASARAN 23

Mengoptimalkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur serta kualitas layanan yang prima

Hasil pengukuran Sasaran Penciptaan lapangan kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.46

Indikator Sasaran Mengoptimalkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur serta kualitas layanan yang prima

No	Indikator	2022	2023	Capaian
----	-----------	------	------	---------

		Target	Realisasi	Target	Realisasi	2022	2023
1	Persentase disiplin ASN	100	98.08	100	98.72	98.08	98.72

Sumber Data BKPSDM Kabupaten Buru Selatan

Implementasi disiplin dalam kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) memerlukan pendekatan yang terencana dan komprehensif. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk menerapkan disiplin ASN:

1. Penyusunan Peraturan dan Kode Etik: Langkah pertama dalam implementasi disiplin adalah menyusun peraturan dan kode etik yang jelas dan komprehensif. Peraturan ini harus mencakup berbagai aspek seperti jadwal kerja, tata tertib, etika kerja, konflik kepentingan, dan tindakan disiplin yang akan diambil dalam kasus pelanggaran.
2. Sosialisasi Peraturan: Setelah peraturan dan kode etik disusun, penting untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh ASN. Sosialisasi dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, atau pertemuan internal untuk memastikan bahwa semua ASN memahami dengan jelas aturan dan harapan yang diterapkan.
3. Penerapan Keterbukaan dan Transparansi: Proses penegakan disiplin harus dilakukan dengan keterbukaan dan transparansi. ASN harus diberikan pemahaman yang jelas tentang prosedur penegakan disiplin serta hak-hak mereka dalam proses tersebut.
4. Penegakan Aturan secara Konsisten: Penting untuk menegakkan aturan dengan konsisten tanpa memandang status atau jabatan ASN tersebut. Ini membantu mencegah adanya favoritisme atau diskriminasi dalam penegakan disiplin.
5. Pemberian Sanksi yang Proporsional: Dalam kasus pelanggaran, sanksi yang diberikan harus proporsional dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi bisa berupa peringatan tertulis, penundaan kenaikan gaji, penurunan pangkat, atau pemecatan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.
6. Penguatan Budaya Organisasi: Membangun budaya organisasi yang menghargai disiplin dan integritas adalah kunci dalam implementasi disiplin yang efektif. Ini dapat dilakukan melalui pembinaan nilai-nilai organisasi, penghargaan bagi ASN yang mematuhi aturan, dan penghargaan bagi individu atau tim yang menunjukkan kinerja yang baik.
7. Evaluasi dan Penyempurnaan: Implementasi disiplin perlu dievaluasi secara berkala untuk mengevaluasi efektivitasnya. Jika diperlukan, peraturan dan prosedur dapat disempurnakan atau diperbarui sesuai dengan perubahan dalam lingkungan kerja atau kebutuhan organisasi.

Melalui langkah-langkah ini, implementasi disiplin dalam kalangan ASN dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif pada kinerja organisasi serta pelayanan publik yang disediakan.

Tabel 3.47

Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah dalam menjalankan fungsinya secara efektif dan profesional

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Kepegawaian Daerah	6.112.986.000	6.112.650.000	99,99

2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.014.535.000	969.653.000	95,58
---	--	---------------	-------------	-------

SASARAN 24	Menyederhanakan alur birokrasi dengan system satu atap guna meningkatkan pelayanan public yang efisien dan efektif
-------------------	---

Hasil pengukuran Sasaran Penciptaan lapangan kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.48

Indikator Sasaran Menyederhanakan alur birokrasi dengan system satu atap guna meningkatkan pelayanan public yang efisien dan efektif

No	Indikator	2022		2023		Capaian	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	2022	2023
1	Dokumen SOP pelayanan satu atap	100	100	100	100	100	100

Sumber Data Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buru Selatan

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian langkah-langkah atau prosedur tertulis yang menggambarkan bagaimana suatu tugas atau pekerjaan harus dilakukan dalam suatu organisasi.

SOP memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan operasi organisasi dengan efisien dan efektif. Hal ini membantu organisasi untuk mencapai tujuan mereka dengan lebih baik dan memberikan panduan yang jelas bagi anggota tim tentang cara menjalankan tugas-tugas mereka dengan benar.

Ada sebanyak 28 Produk Layanan administrasi yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Buru Selatan dan semuanya sudah memiliki SOP dalam pelayanan.

1. Produk Layanan yang Memenuhi Kebutuhan Pelanggan: Produk layanan yang "sudah sesuai" adalah produk yang memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan dengan baik. Hal ini berarti bahwa layanan yang ditawarkan secara efektif mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan yang dimiliki oleh pelanggan.
2. Kualitas yang Tinggi: Produk layanan yang sesuai harus memiliki standar kualitas yang tinggi. Ini berarti bahwa layanan tersebut diharapkan memberikan hasil atau manfaat yang konsisten dan memuaskan bagi pengguna.
3. Kepuasan Pelanggan: Produk layanan yang "sudah sesuai" sering kali dapat diidentifikasi melalui tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi. Jika pelanggan merasa puas dengan layanan yang mereka terima, maka kemungkinan besar produk tersebut dianggap "sudah sesuai".
4. Ketepatan Waktu dan Biaya: Produk layanan yang sesuai juga seringkali memenuhi kriteria ketepatan waktu dan biaya. Artinya, layanan tersebut disediakan dalam batas waktu yang dijanjikan dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
5. Inovatif dan Relevan: Produk layanan yang "sudah sesuai" mungkin juga memiliki unsur inovasi yang memungkinkannya tetap relevan dan bersaing di pasar. Hal ini dapat mencakup penerapan teknologi terbaru, strategi pemasaran yang cerdas, atau perbaikan terus-menerus berdasarkan umpan balik pelanggan.
6. Kepatuhan Hukum dan Etika: Produk layanan yang sesuai harus mematuhi semua regulasi dan standar etika yang berlaku. Ini termasuk aspek hukum, privasi data, serta kepatuhan terhadap norma etika bisnis yang berlaku.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan pelayanan terkait investasi dan perizinan di suatu daerah. Berikut adalah peran keduanya dalam melaksanakan pelayanan:

- a. Mendorong Investasi: Dinas Penanaman Modal bertanggung jawab untuk mendorong investasi di daerahnya. Mereka melakukan promosi investasi, memberikan informasi tentang peluang investasi, dan membantu investor dalam proses perizinan dan investasi.
- b. Memfasilitasi Proses Perizinan: Dinas Penanaman Modal membantu investor dalam proses perizinan dengan memberikan panduan tentang persyaratan perizinan, mengkoordinasikan antara berbagai instansi terkait, dan mempercepat proses perizinan.
- c. Menyediakan Informasi: Dinas ini juga menyediakan informasi tentang regulasi investasi, insentif pajak, infrastruktur, dan potensi pasar bagi para investor. Hal ini membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang lebih baik.
- d. Mempercepat Proses Perizinan: PTSP bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan dengan menyediakan satu loket layanan yang memadukan berbagai prosedur perizinan dari berbagai instansi terkait.
- e. Meminimalkan Birokrasi: PTSP membantu mengurangi birokrasi dengan menyederhanakan formulir, proses, dan persyaratan perizinan. Hal ini membantu mengurangi hambatan administratif bagi investor dan pengusaha.
- f. Meningkatkan Kepuasan Pengguna: PTSP berfokus pada pelayanan yang efisien dan ramah, dengan memberikan layanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Hal ini meningkatkan kepuasan pengguna layanan perizinan.
- g. Pengawasan dan Evaluasi: PTSP bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja layanan perizinan. Mereka mengidentifikasi potensi perbaikan dalam proses pelayanan dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan.

Secara keseluruhan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung investasi dan pengembangan bisnis di suatu daerah. Dengan kerja sama yang baik antara keduanya, diharapkan dapat menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Tabel 3.49

Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Menyederhanakan alur birokrasi dengan system satu atap guna meningkatkan pelayanan public yang efisien dan efektif

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Promosi Penanaman Modal	658.261.000	652.032.500	99,05
2	Program Pelayanan Penanaman Modal	315.868.000	308.271.400	97,60
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	511.300.000	510.519.800	99,85
4	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	17.088.000	17.088.000	100

SASARAN 25**Melakukan praktek pengelolaan keuangan daerah yang adil, transparan**

Hasil pengukuran Sasaran Penciptaan lapangan kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.50**Indikator Sasaran Melakukan praktek pengelolaan keuangan daerah yang adil, transparan**

No	Indikator	2022		2023		Capaian	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	2022	2023
1	Indeks persepsi korupsi (IEPK)	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

Sumber Data Inspektorat Kabupaten Buru Selatan

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu daerah berhasil dalam mengendalikan korupsi.

Pada Tahun 2023 Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi di rilis oleh BPKP dengan nilai 2680 dan berada di kategori Level 2 (Belajar)

Untuk meningkatkan IEPK dan mengurangi tingkat korupsi, ada beberapa langkah yang dapat diambil:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Meningkatkan transparansi dalam semua proses pemerintahan dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan akuntabilitas lembaga-lembaga publik. Ini dapat dilakukan dengan mendorong penerbitan laporan keuangan yang jelas dan terbuka, serta mendorong lembaga-lembaga pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan mereka.
2. **Penguatan Hukum dan Penegakan Hukum:** Memastikan bahwa hukum yang ada cukup kuat dan efektif dalam menangani kasus-kasus korupsi. Ini termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, tanpa pandang bulu terhadap posisi atau kekuasaan mereka.
3. **Pendidikan dan Pelatihan:** Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pejabat pemerintah, pegawai negeri, dan masyarakat umum tentang etika dan integritas dalam pelayanan publik, serta tentang risiko dan konsekuensi dari tindakan korupsi.
4. **Penguatan Institusi Anti-Korupsi:** Mempertegas dan memperkuat institusi-institusi anti-korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau lembaga serupa di negara-negara lain. Institusi-institusi ini harus diberikan kewenangan yang cukup, termasuk dalam penyelidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi.
5. **Partisipasi Masyarakat Sipil:** Mendorong partisipasi aktif masyarakat sipil dalam pengawasan terhadap kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan dan pemberdayaan LSM yang peduli terhadap anti-korupsi, serta melalui kampanye publik dan advokasi.
6. **Transparansi dalam Pengadaan Publik:** Memastikan proses pengadaan publik dilakukan secara transparan dan adil, tanpa adanya praktik korupsi seperti suap atau nepotisme. Penggunaan teknologi informasi dan media sosial dapat membantu meningkatkan transparansi dalam pengadaan publik.
7. **Peningkatan Gaji dan Kesejahteraan Pegawai:** Meningkatkan gaji dan kesejahteraan pegawai negeri serta memastikan bahwa mereka memiliki insentif yang cukup untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan integritas. Gaji yang rendah seringkali menjadi faktor risiko terjadinya korupsi di kalangan birokrasi.

Kombinasi dari langkah-langkah ini, bersama dengan komitmen kuat dari pemerintah dan masyarakat, dapat membantu meningkatkan efektivitas pengendalian korupsi dan mengurangi tingkat korupsi dalam daerah.

Tabel 3.51

Anggaran dan Program Penunjang Sasaran Melakukan praktek pengelolaan keuangan daerah yang adil, transparan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.009.345.500	1.008.394.616	99,91
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	500.341.000	500.340.956	100

C. Akuntabilitas Capaian Keuangan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN	690.785.135.171	663.623.297.313	96,07
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	42.150.264.171	21.866.283.741	51,88
Pendapatan Pajak Daerah	6.700.096.800	4.788.569.430	71,47
Pendapatan Retribusi Daerah	5.331.250.000	4.149.761.083	77,84
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.400.517.371	5.400.517.371	100,00
Lain-Lain PAD yang Sah	24.718.400.000	7.527.435.857	30,45
PENDAPATAN TRANSFER	648.634.871.000	641.757.013.572	98,94
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	550.172.004.000	546.581.978.238	99,35
Dana Bagi Hasil	13.995.599.000	15.784.004.288	112,78
Dana Alokasi Umum (DAU)	418.817.378.000	418.817.378.000	100,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	117.359.027.000	111.980.595.950	95,42
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	81.108.867.000	81.108.867.000	100,00
Dana Insentif Daerah	11.542.629.000	11.542.629.000	100,00
Dana Desa	69.566.238.000	69.566.238.000	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	17.354.000.000	14.066.168.334	81,05
Pendapatan Bagi Hasil	17.354.000.000	14.066.168.334	81,05
BELANJA	707.353.659.628	639.050.674.079	90,34
BELANJA OPERASI	506.880.831.886	454.087.302.728	89,58
Belanja Pegawai	226.374.588.000	189.477.981.150	83,70

Belanja Barang dan Jasa	227.771.361.982	218.297.058.753	95,84
Belanja Subsidi	1.490.000.000	1.490.000.000	100,00
Belanja Hibah	38.683.473.200	32.332.117.200	83,58
Belanja Bantuan Sosial	12.561.408.704	12.490.145.625	99,43
BELANJA MODAL	90.661.448.002	77.658.778.723	85,66
Belanja Modal Tanah	3.239.005.500	3.239.005.500	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.374.443.961	12.534.699.901	93,72
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.042.125.493	32.236.769.546	89,44
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	37.848.373.048	29.490.826.576	77,92
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	157.500.000	157.477.200	99,99
BELANJA TAK TERDUGA	2.000.000.000	1.991.837.000	99,59
Belanja Tak Terduga	2.000.000.000	1.991.837.000	99,59
TRANSFER	107.811.379.740	105.312.755.628	97,68
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	107.811.379.740	105.312.755.628	97,68
Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah	107.811.379.740	105.312.755.628	97,68
SURPLUS / (DEFISIT)	- 16.568.524.457	24.572.623.234	- 148,31
PEMBIAYAAN	38.005.048.914	38.005.048.914	100,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	19.002.524.457	19.002.524.457	100,00
Penggunaan SILPA	19.002.524.457	19.002.524.457	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000	500.000.000	20,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.500.000.000	500.000.000	20,00
PEMBIAYAAN NETTO	16.502.524.457	18.502.524.457	112,12
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	43.075.147.691	-

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Buru Selatan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya.

Keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja telah dilakukan analisis dan evaluasi, sehingga diketahui langkah-langkah strategis yang dilaksanakan dalam meningkatkan pencapaian kinerja ditahun berikutnya. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Buru Selatan sesuai hasil evaluasi atas LAKIP Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB melalui Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB nomor B/609/AA.05/2023 tanggal 27 Nopember 2023 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 direkomendasikan :

1. Menyusun dokumen PK sesuai format pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
2. Mereviu kembali perencanaan kinerja secara menyeluruh untuk memastikan sasaran strategis berorientasi hasil (outcome) dan indikator kinerja memenuhi kriteria SMART dan cukup untuk mengukur ketercapaian kinerja;
3. Memperbaiki kualitas dokumen IKU dengan menyampaikan formulasi perhitungan, definisi operasional, dan sumber data;
4. Melakukan pengukuran dan pengumpulan data kinerja menggunakan Renaksi secara berkala, meningkatkan kualitasnya dengan melengkapi informasi analisis pencapaian kinerja, dan memanfaatkan hasil analisis tersebut untuk perbaikan pelaksanaan program kegiatan pendukung kinerja pada tahun berikutnya;
5. Menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penentuan strategi dan target kinerja ke depan pada level Pemda dan PD;
6. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam melakukan pengukuran dan pengumpulan data kinerja, agar dapat dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian kinerja secara berkala dan real time pada level Pemda maupun PD;
7. Menyusun Laporan Kinerja pada Pemda dan PD dengan lebih komprehensif dan memberikan informasi yang memadai sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Selain itu, perlu Upaya peningkatan pemahaman dalam penyusunan Laporan Kinerja kepada seluruh PD agar tidak terdapat kesenjangan kualitas antara Laporan Kinerja Tingkat Pemda dan PD;

8. Mempublikasikan Laporan Kinerja pada website milik Pemda dan PD sehingga proses transparansi atas informasi kinerja yang telah dilakukan dapat berjalan optimal;
9. Memastikan bahwa Laporan Kinerja yang telah disusun dapat dimanfaatkan untuk penetapan target kinerja mendatang dan menjadi bahan reviu dokumen perencanaan kinerja tahun berikutnya;
10. Menyusun pedoman pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
11. Inspektorat selaku yang melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar melakukan evaluasi secara menyeluruh kepada setiap PD dan memberikan temuan serta rekomendasi yang mendalam, sesuai dengan akar permasalahan, dan menjadi solusi dalam perbaikan implementasi SAKIP dari setiap unit kerja.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja Pemerintah Kabupaten Buru Selatan telah melakukan upaya tindak lanjut sesuai rekomendasi Kemendagri dan RB , dan upaya ini akan terus kami lakukan pada tahun berikutnya sebagai perwujudan komitmen Pimpinan Daerah bersama perangkat daerah dalam memperbaiki system manajemen atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Buru Selatan.
2. Menggunakan aplikasi e-SAKIP sebagai media dalam mewujudkan pengumpulan data kinerja yang lebih baik sehingga meningkatkan kualitas laporan kinerja. Di dalam aplikasi e-SAKIP sudah terdapat informasi keuangan dan kinerja yang dimonitor setiap bulan bahkan tingkat efisiensi anggaran dalam pencapaian kinerja setiap bulan.
3. Meningkatkan peran Inspektorat Kabupaten dalam bidang pengawasan dan pengendalian.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, pelaksanaan program dan kegiatan serta berbagai kebijakan hasil pencapaian pelaksanaan program pembangunan bidang kesehatan yang dilaksanakan dari

tahun ke tahun diharapkan selalu sesuai dengan rencana strategis dan dokumen perencanaan lainnya. LKIP Kab. Buru Selatan Tahun 2023.

Keberhasilan yang dicapai dan kekurangan selama tahun 2023 diharapkan dapat menjadi parameter dan acuan penetapan tujuan tahun berikutnya sehingga dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Adapun tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah belum optimalnya pemanfaatan tindak lanjut hasil evaluasi tahun berjalan dan tahun sebelumnya untuk perencanaan tahun berikutnya.



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN

INSPEKTORAT

Alamat: Jalan Tagop S. Soufisa

NAMROLE

LAPORAN HASIL REVIU (LHR)

Nomor: 700/50/INSP-BS/IIII/2024

PADA	:	BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BURU SELATAN
TENTANG	:	LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH (LAKIP)
TAHUN ANGGARAN	:	2023

MARET 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
INSPEKTORAT
Jalan Tagop S. Soulissa - Namrole

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja dengan substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Kinerja yang telah disajikan, tanggungjawab kami terbatas pada hasil reviu berdasarkan atas data/dokumen Laporan Kinerja yang disampaikan.

Namrole, 21 Maret 2023

INSPEKTUR
KABUPATEN BURU SELATAN

Drs. ISMID THIO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19640319 199503 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
INSPEKTORAT
Jalan Tagop S. Soulissa – Namrole

BAB I
SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 700/26 Tahun 2024, tanggal 8 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Riviur Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024, Tim Riviur LAKIP telah melakukan reviur atas Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2023. Riviur dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil Riviur terhadap LAKIP Tahun Anggaran 2023 yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100 dan capaian diperoleh dengan nilai sebesar 85,24 %, (hasil dari KKR- Kertas Kerja Riviur). Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen Kinerja yang direviur dilingkungan Pemerintah Daerah, yang meliputi 5 (lima) komponen manajemen kinerja yaitu : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja.

Dari hasil reviur diketahui terdapat beberapa hal yang perlu mendapat penyempurnaan, yaitu :

- a. Perencanaan Kinerja
 - Dokumen Renstra belum dipublikasikan.
 - Dokumen Perjanjian Kinerja belum dipublikasikan
 - Rencana kinerja tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.
- b. Pengukuran Kinerja
 - Indikator Kinerja Utama belum dipublikasikan.
 - Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi belum dilakukan secara berkala.
- c. Pelaporan Kinerja
 - Laporan Kinerja belum diupload kedalam website.
 - Laporan Kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya hanya berupa info tentang upaya efisiensi yang dilakukan.
- d. Evaluasi Internal
 - Pemenuhan dan Kualitas evaluasi telah dilakukan dengan baik
- e. Capaian Kinerja
 - Capaian Kinerja yang dilaporkan pada *outcome* belum relevan terhadap capaian kinerja yang dilaporkan pada *output*.

B. REKOMENDASI

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, kami merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Buru Selatan beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kinerja
 - Dokumen Renstra perlu dipublikasikan.
 - Dokumen Perjanjian Kinerja perlu dipublikasikan
 - Rencana kinerja tahunan perlu dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran
- b. Pengukuran Kinerja
 - Indikator Kinerja Utama perlu dipublikasikan.
 - Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi perlu dilakukan secara berkala (bulan, triwulan, semesteran).
- c. Pelaporan Kinerja
 - Laporan Kinerja perlu diupload kedalam website
 - Laporan Kinerja perlu dioptimalkan dalam menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
- d. Evaluasi Internal
 - Pemenuhan dan kualitas evaluasi telah dilakukan dengan baik.
- e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi
 - Perlu meningkatkan kinerja yang dilaporkan pada *outcome* agar relevan terhadap capaian kinerja yang dilaporkan pada *output*.

BAB II

URAIAN HASIL REVIU

A. DATA UMUM

1. Dasar Pelaksanaan Reviu.
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 - d. Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 700/26 Tahun 2024, tanggal 8 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024.
2. Waktu pelaksanaan Reviu
Reviu dilaksanakan dari tanggal 18 Maret sampai dengan 21 Maret 2024.
3. Tujuan Reviu
Tujuan reviu adalah untuk memberikan penilaian dan sasaran perbaikan terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan.
4. Sasaran Reviu
Sasaran reviu adalah memperoleh keyakinan bahwa LAKIP telah disusun, disajikan dan diterapkan sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Ruang Lingkup Reviu
Ruang lingkup reviu adalah kegiatan reviu terhadap dokumen perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran capaian kinerja serta pelaporan kinerja yang digunakan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.

B. HASIL REVIU

1. Aspek yang direviu
Reviu dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2023 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (RENSTRA), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

2. Penilaian Hasil Reviu

Hasil reviu yang dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100, dan capaian yang diperoleh Pemerintah Daerah dengan nilai sebesar 86,24 % (dilihat dari LKE-Lembar Kriteria Evaluasi). Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk tahun anggaran 2023 yang terdiri dari :

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Hasil evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30	26,13
2	Pengukuran Kinerja	25	18,75
3	Pelaporan Kinerja	15	13,11
4	Evaluasi Internal	10	10,00
5	Pencapaian Kinerja	20	17,25
Jumlah		100	85,24

(Poin 1 s/d 5 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Instansi).

Dari hasil reviu diketahui terdapat beberapa hal yang perlu mendapat penyempurnaan, yaitu : Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi oleh Inspektorat dengan rincian sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja dengan nilai (26,13) yang terdiri dari sub komponen :

I. Perencanaan Strategi dengan nilai (9,53) terdiri dari :

a. Pemenuhan RPJMD/Renstra memperoleh nilai (1,78)

Dokumen RPJMD/Renstra OPD telah disusun memenuhi standar penyajian dan telah menyajikan IKU, akan tetapi belum dipublikasikan.

b. Kualitas RPJMD/Renstra memperoleh nilai (5)

Tujuan dan sasaran dalam Renstra telah berorientasi dan dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.

c. Implementasi RPJMD/Renstra memperoleh nilai (2,75)

Dokumen Renstra telah selaras dengan dokumen perencanaan lainnya (RKT dan PK) dan telah direviu secara berkala, akan tetapi dokumen RPJMD/Renstra belum digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, serta belum digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

II. Perencanaan Kinerja Tahunan dengan nilai (16,60)

a. Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai (3)

Dokumen perencanaan kinerja tahunan SKPD telah ada, dan telah dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan. Dokumen PK disusun segera setelah anggaran disetujui, dokumen PK telah memuat sasaran, program, indikator kinerja dan target jangka pendek namun PK belum dipublikasikan.

b. Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai (10)

Indikator kinerja sasaran telah berorientasi hasil dan rencana aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.

- c. Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai (3,60)
Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, namun rencana kinerja tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.
- B. Pengukuran Kinerja dengan nilai (18,75) yang terdiri dari sub komponen :
 - I. Pemenuhan Pengukuran memperoleh nilai (3,75)
IKU OPD telah digunakan sebagai ukuran kinerja formal akan tetapi belum dipublikasikan.
 - II. Kualitas Pengukuran memperoleh nilai (10,31)
IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik, namun pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala (bulan/triwulan/semester).
 - III. Implementasi Pengukuran memperoleh nilai (4,69)
IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan, telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja dan telah digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala, namun semua itu belum dilakukan secara dimaksimal.
- C. Pelaporan Kinerja dengan nilai (12,36) yang terdiri dari sub komponen :
 - I. Pemenuhan Pelaporan memperoleh nilai (2,25)
LAKIP OPD telah disusun dan LAKIP telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU namun belum di upload kedalam website.
 - II. Penyajian Informasi Kinerja memperoleh nilai (6,51)
LAKIP menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome. Namun LAKIP belum optimal dalam menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
 - III. Pemanfaatan Informasi Kinerja memperoleh nilai (3,60)
Informasi yang disajikan belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program, dan peningkatan kinerja, sehingga belum dipergunakan untuk pengambilan keputusan pimpinan serta pemberian reward atau punishment kepada pegawai.
- D. Evaluasi Internal dengan nilai (10) yang terdiri dari sub komponen :
 - I. Pemenuhan Evaluasi memperoleh nilai (2)
Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dan telah diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
 - II. Kualitas Evaluasi memperoleh nilai (5)
Pelaksanaan evaluasi program telah disupervisi melalui pembahasan-pembahasan namun belum terdokumen-tasikan secara maksimal dan belum memberikan rekomendasi terhadap perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
 - III. Pemanfaatan Evaluasi memperoleh nilai (3)
Hasil Evaluasi program telah ditindaklanjuti dengan perbaikan perencanaan dan perbaikan kinerja.
- E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai (17,25) Target dapat dicapai dan informasi mengenai kinerja dapat diandalkan.
 - Kinerja yang dilaporkan (output) (7,10)
 - Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10,15)

3. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, kami merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Buru Selatan beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. *Perencanaan Kinerja*
 - Dokumen Renstra perlu dipublikasikan.
 - Dokumen Perjanjian Kinerja perlu dipublikasikan
 - Rencana kinerja tahunan perlu dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.
- b. *Pengukuran Kinerja*
 - Indikator Kinerja Utama perlu dipublikasikan.
 - Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi perlu dilakukan secara berkala (bulan, triwulan, semesteran).
- c. *Pelaporan Kinerja*
 - Laporan Kinerja perlu diupload kedalam website
 - Laporan Kinerja belum Optimal dalam menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
- d. *Evaluasi Internal*
 - Pemenuhan dan kualitas evaluasi telah dilakukan dengan baik.
- e. *Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi*

Perlu meningkatkan kinerja yang dilaporkan pada *outcome* agar relevan terhadap capaian kinerja yang dilaporkan pada *output*.

Inspektorat menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan atas kesediaannya memberi data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Reviu Laporan Kinerja tahun 2023. Demikian disampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan tahun 2022

Namrole, 21 Maret 2024

Inspektur
Kabupaten Buru Selatan



Drs. Ismid Thid, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19640319 199503 1 002

KERTAS KERJA REVIU
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SATUAN KERJA		KONTROL KERANGKA LOGIS
			Y	NILAI	
1	2		3	4	5
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30,00	87,09%	26,13	
I.	PERENCANAAN STRATEGIS (10%)	10,00	95,28%	9,53	
a.	PEMENUHAN RENSTRA (2%)	2,00	88,89%	1,78	
1	Renstra Unit Kerja telah disusun		Y	1,00	
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1,00	OK
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		A	1,00	OK
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1,00	OK
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1,00	OK
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1,00	OK
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1,00	OK
8	Renstra telah menyajikan IKU		A	1,00	OK
9	Renstra telah dipublikasikan		T	-	OK
b.	KUALITAS RENSTRA (5%)	5,00	100,00%	5,00	
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1,00	OK
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1,00	OK
12	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00	OK
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00	OK
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00	OK
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		A	1,00	OK
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD		A	1,00	OK
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		A	1,00	OK
c.	IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)	3,00	91,67%	2,75	
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		B	0,75	OK
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		A	1,00	OK
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala		A	1,00	OK
II.	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)	20,00	83,00%	16,60	
a.	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	4,00	75,00%	3,00	
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1,00	
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1,00	OK
3	PK telah menyajikan IKU		A	1,00	OK
4	PK telah dipublikasikan		T	-	OK

b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	10,00	100,00%	10,00	
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00	OK
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00	OK
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00	OK
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		A	1,00	OK
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		A	1,00	OK
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		A	1,00	OK
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		A	1,00	OK
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1,00	OK
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A	1,00	OK
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1,00	OK
c.	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)	6,00	60,00%	3,60	
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		T	-	OK
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		B	0,75	OK
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		B	0,75	OK
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan		B	0,75	OK
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		B	0,75	OK
B.	PENGUKURAN KINERJA (25%)	25,00	75,00%	18,75	
I.	PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	5,00	75,00%	3,75	
1	Telah terdapat <i>indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal</i>		Y	1,00	
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1,00	
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1,00	OK
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		T	-	OK
II.	KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)	12,50	82,50%	10,31	
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1,00	OK
6	IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja		B	0,75	OK
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		A	1,00	OK
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00	OK
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		A	1,00	OK
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		B	0,75	OK
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		B	0,75	OK
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		A	1,00	OK
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		T	-	OK
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		Y	1,00	OK

III.	IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)	7,50	62,50%	4,69	
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		B	0,75	OK
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0,50	OK
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0,50	OK
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward & punishment</i>		B	0,75	OK
19	IKU telah <i>direviu secara berkala</i>		B	0,75	OK
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0,50	OK
	C. PELAPORAN KINERJA (15%)	15,00	82,43%	12,36	
	I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)	3,00	75,00%	2,25	
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,00	
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00	OK
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		T	-	OK
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		A	1,00	OK
	II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)	7,50	86,86%	6,51	
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		A	1,00	OK
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		A	1,00	OK
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		A	1,00	OK
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		A	1,00	OK
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		C	0,33	OK
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		A	1,00	OK
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		B	0,75	OK
	III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)	4,50	80,00%	3,60	
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1,00	OK
13	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>		B	0,75	OK
14	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>		B	0,75	OK
15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>		B	0,75	OK
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		B	0,75	OK

D. EVALUASI INTERNAL (10%)		10,00	100,00%	10,00	
L	PEMENUHAN EVALUASI (2%)	2,00	100,00%	2,00	
1	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya		Y	1,00	
2	Evaluasi program telah dilakukan		Y	1,00	
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		A	1,00	OK
4	Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan		A	1,00	OK
M	KUALITAS EVALUASI (5%)	5,00	100,00%	5,00	
5	Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		A	1,00	OK
6	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		A	1,00	OK
7	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		A	1,00	OK
8	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		A	1,00	OK
9	Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		A	1,00	OK
10	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode		A	1,00	OK
N	PEMANFAATAN EVALUASI (3%)	3,00	100,00%	3,00	
11	Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		A	1,00	OK
12	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		A	1,00	OK
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20,00	90,03%	18,01	
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)		7,50	94,67%	7,10	
1	Target dapat dicapai		B	2,00	
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		A	2,10	
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		A	3,00	
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)		12,50	218,11%	10,91	
4	Target dapat dicapai			3,38	
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			3,16	
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			4,38	
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100,00	85,25%	85,25	



BUPATI BURU SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : SAFITRI MALIK SOULISA, S.IP, M.Si

JABATAN : BUPATI BURU SELATAN

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Namrole, Maret 2024

BUPATI BURU SELATAN

SAFITRI MALIK SOLISA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KABUPATEN BURU SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akses pendidikan	APK SDMI	100
		APK SMP/MTS	89.37
		APK PAUD	3.466
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adfministrasi dan Pencatatan Sipil	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Layanan Administrasi Pencatatan Sipil	79.36
		Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	96.16
3	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Presentasi Peningkatan Koperasi yang berkualitas	74.26
4	Meningkatnya Kualistas Akses Kesehatan Masyarakat	Angka kematian ibu	3 Jiwa
		Angka kematian bayi	14 Jiwa
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Puskesmas dengan tingkat akreditasi	70.25
5	Meningkatnya Produksi Perikanan	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	3.069
		Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dan Pesisir	15.158
	Meningkatnya Pendapatan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	119
6	Meningkatnya Produksi Pertanian	Presentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian	37,15
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Petani	Nilai Tukar Petani	141,69
		Jumlah Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan	5
8	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	7,71
9	Meningkatnya Integritas Kompetensi dan	Presentase Tenaga Pemeriksa dan	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Profesionalisme APIP	Aparat pengawasan yang mengikuti diklat dan lulus serta memiliki Sertifikat Pengembangan Profesi	
	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah	Level APIP	2,03
		Televel maturitas SPIP	2,34
		Terwujudnya Opini BPK	WTP
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah	Presentase SAKIP OPD Minimal B	75
10	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	319
	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,36
11	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan	Presentase Peningkatan Produksi Tanamana Pangan	1,74
	Meningkatnya Ketersediaan dan Ketahanan Pangan	Sektor PPH Konsumsi	75,05
12	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Bagi Penduduk Miskin	Presentase Penduduk Miskin yang sejahtera	68,81
	Menurunnya Jumlah PMKS	Presentase PMKS yang telah dipulihkan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat	68,81
	Meningkatnya Kesejahteraan PPKS	Presentase layanan kesejahteraan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	68,81
13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Presentase pengelola sampahs secara terpadu	72,01
14	Menurunnya luas kawasan kumuh	Presentase penurunan luas kawasan kumuh	3,89
	Meningkatnya perumahan yang layak huni	Presentase rumah layak huni	0,16
16	Meningkatnya pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarkat	Nilai Indeks Pembangunan literasi masyarakat (Satuan Target Skala 1 – 100)	2,60
	Meningkatnya kinerja pengelola arsip	Nilai pengawasan kearsipan (Satuan	68,98

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		target skala 1 – 100)	
17	Meningkatnya partisipasi Olahraga	Presentase atlet berprestasi Nasional dan Internasional	1,01
18	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan Kabupaten Buru Selatan	Cakupan wirausaha muda mandiri	47,84

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp. 33.130.063.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp. 2.193.226.793
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp. 204.720.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp. 604.450.000
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp. 2.438.056.932
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Rp. 640.130.000
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp. 9.545.444.914
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp. 732.976.561
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp. 1.927.920.000
10	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rp. 8.773.250.585
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp. 4.086.480.000
12	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp. 420.770.000
13	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp. 194.793.000
14	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp. 2.101.640.000
15	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rp. 2.058.116.000
16	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp. 128.746.000
17	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rp. 46.747.820
18	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp. 29.400.000
19	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp. 728.215.200
20	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp. 1.861.200.000
21	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp. 53.768.000
22	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp. 80.241.000
23	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp. 1.909.656.100
24	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rp. 500.000.000
25	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp. 1.101.888.000
26	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp. 87.289.000
27	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp. 339.239.500
28	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp. 120.604.000
29	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp. 74.410.000
30	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK	Rp. 160.810.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
	DAN BARANG PENTING	
31	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp. 15.920.500
32	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp. 1.058.850.000
33	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp. 88.400.000
34	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp. 301.600.000
35	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp. 130.000.000
36	PROGRAM PENATAAN DESA	Rp. 111.390.000
37	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp. 623.322.000
38	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp. 384.896.000
39	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp. 76.206.000
40	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SATUAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Rp. 2.000.000.000
41	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Rp. 45.450.000
42	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp. 46.727.489.410
43	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp. 79.439.120.012
44	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp. 1.510.755.000
45	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp. 96.000.000
46	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp. 951.851.000
47	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp. 23.438.550.000
48	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp. 864.550.000
49	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp. 36.350.000
50	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp. 359.305.000
51	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp. 247.850.000
52	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp. 9.754.300.000
53	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 61.970.000
54	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 48.140.000
55	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp. 952.192.700
56	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 80.424.000
57	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 2.794.984.800
58	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 574.589.200
59	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp. 409.629.000
60	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp. 580.691.500
61	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp. 194.619.000
62	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp. 332.825.000
63	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp. 78.700.000
64	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp. 15.940.000
65	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 133.732.495.146
66	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp. 662.409.000
67	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp. 4.389.980.000
68	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp. 1.670.000.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
69	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp. 316.022.100
70	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp. 141.050.000
71	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp. 155.815.000
72	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp. 110.764.000
73	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rp. 10.992.739.696
74	PRGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Rp. 94.150.000
75	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Rp. 86.402.541.853



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran	Defenisi Operasional	Sumber Data
1	Terkoneksinya sistim perhubungan sampai pada pusat aktifitas ekonomi masyarakat	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}} \times 100 \%$	Mengukur panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dengan menggunakan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh otoritas terkait, seperti Departemen Pekerjaan Umum atau lembaga pengelola infrastruktur. Kriteria ini dapat mencakup parameter seperti kehalusan permukaan jalan, keberadaan lubang atau retak, kepadatan lalu lintas, dan keamanan jalan.	Dinas PU
		Panjang jalan dilalui roda 4	<i>total panjang jalan di Kabupaten Buru Selatan baik dalam kondisi baik, sedang dan rusak menurut kondisi dan status Jalan</i>	mengukur panjang jalan yang dilalui oleh kendaraan dengan empat roda sesuai dengan parameter-parameter yang telah ditetapkan	
	Membangun dan memaksimalkan sarana dan prasarana transportasi laut, darat secara memadai di Kabupaten Buru Selatan	Fasilitas sisi darat pelabuhan laut	<i>Jumlah Total Pelabuhan laut</i>	memahami pelabuhan laut sebagai suatu entitas fisik dan operasional yang memfasilitasi berbagai aktivitas pelayaran dan perdagangan laut.	Dinas Perhubungan
2	Terciptanya klaster produk unggulan	NTN	$NTN = \frac{IT}{JB} \times 100$	mengukur dan memahami nilai tukar nelayan sebagai indikator	Dinas Pertanian

daerah berbasis agro marine			ekonomi penting dalam sektor perikanan dan kelautan		
	NTP		$NTP = \frac{IT}{IB} \times 100$	mengukur dan memahami nilai tukar nelayan sebagai indikator ekonomi penting dalam sektor pertanian dan perkebunan	
Perancangan master plan cluster pengembangan produk perikanan dan pertanian	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B		<i>Total lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B</i>	peta lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat digunakan sebagai alat penting dalam mengelola sumber daya pertanian secara berkelanjutan dan mempromosikan pertanian yang ramah lingkungan dan produktif.	Dinas Perikanan
Peningkatan Kapasitas Petani, Nelayan (Pengetahuan Teknis, Teknologi, Manajemen Usaha)	Cakupan Bina Kelompok Nelayan		<i>Jumlah total kegiatan pelatihan bagi nelayan yang dilaksanakan</i>	kegiatan pelatihan dan Bimtek bagi nelayan dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan lebih efektif untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan bagi komunitas nelayan.	
	Cakupan Bina Kelompok Petani		<i>Jumlah total kegiatan pelatihan bagi petani yang dilaksanakan</i>	kegiatan pelatihan dan Bimtek bagi petani dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan lebih efektif untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan bagi komunitas petani	Dinas Pertanian
Membentuk sentra produk perikanan dan pertanian Sesuai dengan kluster produk unggulan	Produksi perikanan tangkap		<i>Produksi Perikanan Tangkap=Total Tangkapan–Pemulihan Kembali–Buang Tangkap</i>	produksi perikanan tangkap dapat diukur dan dipahami dengan lebih baik sebagai indikator penting dalam mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan dan memantau kesehatan ekosistem laut.	Dinas Perikanan
	Produksi perikanan budidaya		<i>Produksi Perikanan Budidaya=Jumlah Organisme yang Dipanen × Rata-rata Berat atau Ukuran Organisme</i>	produksi perikanan budidaya dapat diukur, dipahami, dan dikelola dengan lebih baik sebagai bagian dari usaha untuk memenuhi kebutuhan pangan	

				dan meningkatkan keberlanjutan sektor perikanan.	
		produktivitas palawija	$\text{Produksi Palawija} = \text{Luas Lahan Tanam} \times \text{Hasil Panen per Hektar}$	produktivitas palawija dapat diukur dan dipahami dengan lebih baik sebagai indikator penting dalam meningkatkan produksi pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.	
Membangun sarana dan prasarana secara proporsional dan berkelanjutan untuk mendukung kluster produk unggulan pengembangan di setiap wilayah		Tersedianya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	$\text{Unit Jaringan Irigasi} = \frac{\text{panjang jaringan irigasi}}{\text{panjang standar jaringan irigasi}}$	Jaringan irigasi usaha tani adalah sistem infrastruktur yang dirancang dan digunakan untuk mengalirkan air irigasi ke lahan pertanian yang dimiliki atau dikelola oleh petani. Ini dapat mencakup saluran air, kanal, pipa, pompa, bendung, embung, dan berbagai struktur lain yang digunakan untuk mengatur aliran dan distribusi air irigasi.	Dinas Pertanian
		Jumlah Bantuan Armada Tangkap dan Alat Penangkapan Ikan	$\text{Jumlah total bantuan armada tangkap dan alat penangkapan ikan}$	Armada tangkap adalah kumpulan kapal atau perahu yang digunakan untuk aktivitas penangkapan ikan di perairan tertentu. Armada ini bisa terdiri dari berbagai jenis kapal, termasuk perahu nelayan tradisional, kapal pukat, kapal tuna, kapal trawl, kapal penangkap ikan purse seine, dan berbagai jenis kapal penangkap ikan lainnya.	Dinas Perikanan
		Jumlah Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan	$\text{Jumlah total prasarana pembudidayaan ikan yang dibangun}$	Prasarana pembudidayaan ikan merujuk pada infrastruktur fisik yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan budidaya ikan. Ini dapat mencakup kolam budidaya, keramba jaring apung, tangki pembenihan, pompa air, saluran air, sistem filtrasi, sistem	

				aerasi, serta infrastruktur pendukung lainnya seperti jaringan listrik dan jalan akses.	
	Penciptaan lapangan kerja	Menurunya tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran Terbuka}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100$	Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase dari jumlah individu yang mencari pekerjaan tetapi belum berhasil menemukannya dalam jumlah tertentu dari angkatan kerja. Pengangguran terbuka diukur dengan membagi jumlah individu yang menganggur oleh jumlah total angkatan kerja, kemudian dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase.	Dinas Koperasi
3	Pembentukan Dan Penguatan Tatakelola pusat usaha kecil mikro dan menengah sesuai potensi wilayah	Jumlah UMKM	$\text{Jumlah UMKM} = \text{Jumlah Usaha Mikro} + \text{Jumlah Usaha Kecil} + \text{Jumlah Usaha Menengah}$	UMKM merupakan kelompok usaha yang dikelompokkan berdasarkan kriteria ukuran, yang meliputi jumlah tenaga kerja, nilai aset, atau omzet tahunan. Klasifikasi ukuran usaha UMKM dapat bervariasi antara negara, namun seringkali didasarkan pada kriteria tertentu seperti jumlah karyawan atau nilai omzet.	Dinas Koperasi
	Membentuk Klaster Pengembangan UMKM berdasarkan potensi wilayah	Jumlah nilai investasi berskala nasional	$\text{Nilai Investasi Berskala Nasional} = \text{Nilai Investasi PMDN} + \text{Nilai Investasi PMDA}$	Nilai investasi PMDN dan PMDA dapat dijumlahkan untuk mendapatkan total nilai investasi yang masuk ke suatu negara atau wilayah. Penjumlahan ini mencerminkan total investasi yang dilakukan oleh investor dalam dan luar negeri dalam mengembangkan kegiatan usaha di wilayah tersebut.	Badan Pendapatan Daerah
	Memfasilitasi tersedianya infrastruktur dan akses modal bagi pengembangan UMKM Produktif	Rasio daya serap tenaga kerja	$\frac{\text{Jumlah Tenaga kerja terserap (PMDN)}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja (PMDN)}} \times 100 \%$	Rasio daya serap tenaga kerja mengacu pada perbandingan antara jumlah pekerjaan yang diciptakan oleh suatu perekonomian atau sektor tertentu dengan jumlah tenaga	Dinas Koperasi

				kerja yang tersedia di pasar tenaga kerja.	
	Pengadaan tanah untuk peningkatan sarana prasarana pembangunan, perumahan layak huni.	Rasio permukiman layak huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak huni}}{\text{Jumlah Total Rumah}} \times 100 \%$	asio permukiman layak huni mengacu pada perbandingan antara jumlah unit hunian yang dianggap layak huni dengan jumlah total unit hunian dalam suatu wilayah, kota, atau negara.	Dinas Perumahan
4	Pendidikan gratis dengan pola yang adil, profesional berorientasi output	APM SD/MI	$APM = \frac{\text{Jumlah siswa di tingkat tertentu}}{\text{Jumlah Siswa pada Rentang Usia Sekolah yang Sesuai}} \times 100 \%$	APS SD/MI mengacu pada persentase jumlah peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI) yang seharusnya bersekolah pada usia yang sesuai dengan total jumlah anak dalam kelompok usia tersebut	Dinas Pendidikan
		APM SMP/MTs	$APM = \frac{\text{Jumlah siswa di tingkat tertentu}}{\text{Jumlah Siswa pada Rentang Usia Sekolah yang Sesuai}} \times 100 \%$	APS SMP/MTs mengacu pada persentase jumlah peserta didik pada tingkat pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTs) yang seharusnya bersekolah pada usia yang sesuai dengan total jumlah anak dalam kelompok usia tersebut	
	Mengembangkan pendidikan anak usia dini (PAUD) untuk mencetak landasan yang kokoh bagi penguatan SDM	Jumlah siswa pada jenjang TK/RA	$\text{Jumlah Siswa TK} = \text{Jumlah Siswa TK Negeri} + \text{Jumlah Siswa TK Swasta}$	Jumlah siswa pada jenjang TK/RA Merujuk pada jenjang pendidikan awal yang diperuntukkan bagi anak usia pra-sekolah sebelum memasuki pendidikan dasar. TK/RA adalah institusi pendidikan formal untuk anak usia 4-6 tahun di banyak negara.	Dinas Pendidikan
5	Tersedianya akses kesehatan bagi masyarakat	Rasio Posyandu per satuan balita (/1.000)	$\frac{\text{Jumlah balita yang di akses oleh posyandu}}{\text{Total jumlah balita di wilayah tersebut}} \times 100 \%$	Rasio ini mengacu pada jumlah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang tersedia dalam suatu wilayah atau komunitas. Posyandu adalah pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang menyediakan layanan kesehatan dasar, terutama untuk	Dinas Kesehatan

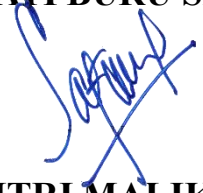
				balita (anak usia 0-59 bulan) dan ibu hamil.	
	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (/1.000).		$\frac{\text{Jumlah Unit layanan kesehatan}}{\text{jumlah penduduk}} \times 1000$	Rasio ini mengacu pada jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), poliklinik, atau Pos Pelayanan Terpadu (Pustu) yang tersedia dalam suatu wilayah atau komunitas.	
	Rasio RS per satuan penduduk(/1.000)		$\frac{\text{Jumlah Rumah Sakit}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	Rasio ini mengacu pada jumlah rumah sakit yang tersedia dalam suatu wilayah atau komunitas pada periode waktu tertentu.	
	Rasio dokter per satuan penduduk (/1000)		$\frac{\text{Jumlah Dokter}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	Rasio ini mengacu pada jumlah dokter yang aktif dalam praktik medis di suatu wilayah atau komunitas pada periode waktu tertentu. Dokter dalam hal ini dapat mencakup dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi.	
Meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan di seluruh wilayah Buru Selatan	Jumlah rumah tangga bersanitasi		$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang bersanitasi baik}}{\text{Total jumlah rumah tangga}} \times 100 \%$	Rumah tangga dianggap "bersanitasi" jika mereka memiliki akses yang memadai dan menggunakan fasilitas sanitasi yang layak. Ini mencakup penggunaan toilet yang higienis dan aman, pembuangan sampah yang tepat, serta praktik kebersihan yang baik dalam pengelolaan air bersih dan air limbah.	Dinas Kesehatan/Dinas PU/Dinas Perumahan
Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata	Pengembangan objek wisata unggulan		$\text{Jumlah Total Destinasi Pariwisata}$	Objek wisata unggulan adalah destinasi atau atraksi wisata yang memiliki potensi untuk menarik jumlah kunjungan yang signifikan dan memberikan pengalaman yang menarik bagi wisatawan. Identifikasi dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, seperti keunikan, keindahan alam, nilai sejarah dan budaya, atau aktivitas wisata yang tersedia.	Dinas Pariwisata

	Pengembangan potensi pariwisata daerah secara profesional.	Tersedianya SDM profesional dibidang pariwisata	<i>Total jumlah SDM profesional di bidang pariwisata</i>	Pengukuran tersedianya SDM profesional dilakukan dengan mengidentifikasi jumlah tenaga kerja yang tersedia di berbagai profesi pariwisata serta mengevaluasi kualifikasi, pendidikan, dan keterampilan yang dimiliki oleh SDM tersebut	
	Mendorong aktivitas keagamaan yang bersinergi dengan budaya lokal.	Rasio tempat ibadah per 1000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah Tempat ibadah}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	Rasio tempat ibadah kemudian dihitung dengan membagi jumlah tempat ibadah dengan jumlah populasi atau luas wilayah yang diukur. Contohnya, rasio tempat ibadah per 1.000 penduduk atau per kilometer persegi.	Bagian Kesra
	Peningkatan harkat dan martabat serta kualitas hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	<i>Jumlah total sarana sosial</i>	Sarana sosial biasanya melayani individu atau kelompok yang memenuhi kriteria tertentu, seperti usia, kondisi kesehatan, status sosial-ekonomi, atau masalah spesifik yang membutuhkan perhatian dan dukungan khusus.	Dinas Sosial
6	Terwujudnya tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas KKN	Indeks Reformasi Birokrasi	<i>Rumus umum untuk menghitung Indeks Reformasi Birokrasi mungkin melibatkan normalisasi atau pembobotan dari masing-masing komponen yang disebutkan di atas, dan kemudian menggabungkan nilai-nilai tersebut menjadi sebuah indeks tunggal</i>	Indeks Reformasi Birokrasi dapat terdiri dari berbagai parameter atau indikator yang mencerminkan aspek-aspek penting dari reformasi birokrasi, seperti efisiensi, transparansi, akuntabilitas, pelayanan publik, kualitas regulasi, dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	
	Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah dalam menjalankan fungsinya secara efektif dan profesional	Pesentase kinerja ASN	$\text{Persentase Kinerja ASN} = \frac{\text{Pencapaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$	Kinerja ASN dapat diukur berdasarkan tingkat pemenuhan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam jabatan atau posisi masing-masing. Ini mencakup pencapaian target kerja, penyelesaian tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan,	BKPSDM

				dan kualitas hasil pekerjaan yang dihasilkan	
Mengoptimalkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur serta kualitas layanan yang prima.	Pesentase disiplin ASN		$\text{Persentase Disiplin ASN} = \frac{\text{Jumlah Pelanggaran}}{\text{jumlah hari kerja}} \times 100\%$	Kepatuhan Terhadap Aturan dan Regulasi: Disiplin ASN mencakup tingkat kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, lembaga, atau instansi tempat ASN tersebut bekerja. Ini mencakup kepatuhan terhadap kode etik, peraturan perundang-undangan, kebijakan organisasi, dan prosedur operasional.	BKPSDM
Menyederhanakan alur birokrasi dengan sistem satu atap guna meningkatkan pelayanan publik yang efisien dan efektif	Dokumen SOP pelayanan satu atap		Jumlah total dokumen SOP pelayanan	Dokumen SOP Pelayanan mencakup identifikasi dan deskripsi lengkap dari setiap prosedur yang harus diikuti dalam penyediaan pelayanan publik tertentu. Ini mencakup langkah-langkah konkret, urutan tindakan, dan kriteria kinerja yang harus dipenuhi oleh petugas atau staf yang terlibat.	Seluruh OPD
Melakukan praktek pengelolaan keuangan daerah yang adil, transparan	Indeks persepsi korupsi	<p><i>Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada tingkat Pemerintah Daerah (Pemda) dapat dihitung dengan beberapa langkah yang melibatkan survei atau penilaian terhadap persepsi korupsi di dalam lingkungan Pemda tersebut. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk menghitung IPK untuk Pemda:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Indikator Manipulasi Peraturan</i> 2. <i>Indikator Penyalahgunaan Jabatan</i> 3. <i>Indikator Menjual Pengaruh</i> 4. <i>Indikator Transparansi Biaya</i> 5. <i>Indikator Biaya Tambahan</i> 6. <i>Indikator Hadiah</i> 7. <i>Indikator Transparansi pembayaran</i> 8. <i>Indikator Percaloan</i> 9. <i>Indikator Perbuatan Curang</i> 10. <i>Indikator Transaksi Rahasia</i> 	IPK dikumpulkan melalui survei atau penilaian yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga terkait, seperti Transparency International. Metode pengumpulan data biasanya melibatkan wawancara atau kuesioner kepada responden yang mewakili berbagai kelompok masyarakat, termasuk warga negara, pengusaha, analis, dan pemangku kepentingan lainnya.	Inspektorat	

Namrole, Maret 2023

BUPATI BURU SELATAN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Safitri Malik Solisa', written over a horizontal line.

SAFITRI MALIK SOLISA



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				PROGRAM	ANGGARAN	
					TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	Terkoneksinya sistim perhubungan sampai pada pusat aktifitas ekonomi masyarakat	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	459,86	Total Panjang jalan dalam kondisi baik	✓	✓	✓	✓	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	33.130.063.000	
		Panjang jalan dilalui roda 4	630,06	Total Panjang jalan yang dilalui roda 4	✓	✓	✓	✓	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.193.226.793	
										PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	204.720.000
										PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	604.450.000
										PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.438.056.932
										PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	640.130.000
										PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	9.545.444.914
										PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	732.976.561
								PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.927.920.000		

2	Membangun dan memaksimalkan sarana dan prasarana transportasi laut, darat secara memadai di Kabupaten Buru Selatan	Fasilitas sisi darat pelabuhan laut	5	Total jumlah sisi darat pelabuhan laut	✓	✓	✓	✓	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	8.773.250.585
3	Terciptanya kluster produk unggulan daerah berbasis agro marine	NTN	101,37	Menghitung total nilai tukar nelayan	✓	✓	✓	✓	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	4.086.480.000
		NTP	136,59	Menghitung total nilai tukar petani	✓	✓	✓	✓	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	420.770.000
4	Perancangan master plan cluster pengembangan produk perikanan dan pertanian	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	3,00	Menghitung Total jumlah lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B	✓	✓	✓	✓	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	194.793.000
5	Peningkatan Kapasitas Petani, Nelayan (Pengetahuan Teknis, Teknologi, Manajemen Usaha)	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	1	Menghitung total jumlah kelompok nelayan yang dibina	✓	✓	✓	✓	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.101.640.000
		Cakupan Bina Kelompok Petani	1	Menghitung Total jumlah kelompok petani yang dibina	✓	✓	✓	✓	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	2.058.116.000
6	Membentuk sentra produk perikanan dan pertanian Sesuai dengan kluster produk unggulan	Produksi perikanan tangkap	11.077,3	Menghitung Total produksi perikanan tangkap	✓	✓	✓	✓	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	128.746.000
		Produksi perikanan budidaya	2,66	Menghitung Total produksi perikanan budidaya	✓	✓	✓	✓		
		produktivitas palawija	1.364,18	Menghitung Total produktivitas palawija	✓	✓	✓	✓		
7	Membangun sarana dan prasarana secara proporsional dan berkelanjutan untuk mendukung kluster produk unggulan pengembangan di setiap wilayah	Jumlah Bantuan Armada Tangkap dan Alat Penangkapan Ikan	45	Meghitung jumlah bantuan armada tangkap	✓	✓	✓	✓		
		Jumlah Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan	5	Menghitung total penyediaan prasarana pembudidayaan ikan	✓	✓	✓	✓		

8	Penciptaan lapangan kerja	Menurunya tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,85	Persentase Tingkat pengangguran terbuka	✓	✓	✓	✓	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	46.747.820
9	Pembentukan Dan Penguatan Tatakelola pusat usaha kecil mikro dan menengah sesuai potensi wilayah	Jumlah UMKM	617	Menghitung total jumlah UMKM	✓	✓	✓	✓	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	29.400.000
10	Membentuk Klaster Pengembangan UMKM berdasarkan potensi wilayah	Jumlah nilai investasi berskala nasional	16,66	Menghitung total nilai investasi berskala nasional	✓	✓	✓	✓	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	728.215.200
11	Memfasilitasi tersedianya infrastruktur dan akses modal bagi pengembangan UMKM Produktif	Rasio daya serap tenaga kerja	1,04	Menghitung rasio daya serap tenaga kerja	✓	✓	✓	✓	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1.861.200.000
									PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	53.768.000
									PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	80.241.000
									PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.909.656.100
									PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	500.000.000
									PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.101.888.000
									PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	87.289.000
									PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	339.239.500

									PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	120.604.000
									PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	74.410.000
									PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	160.810.000
									PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	15.920.500
									PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.058.850.000
									PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	88.400.000
									PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	301.600.000
									PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	130.000.000
									PROGRAM PENATAAN DESA	111.390.000
									PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	623.322.000
									PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,	384.896.000

									LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
12	Pengadaan tanah untuk peningkatan sarana prasarana pembangunan, perumahan layak huni.	Rasio permukiman layak huni	90,58	Menghitung rasio pemukiman layak huni	✓	✓	✓	✓	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SATUAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	76.206.000 2.000.000.000 45.450.000
13	Pendidikan gratis dengan pola yang adil, profesional berorientasi output	APM SD/MI	98,36	Menghitung angka partisipasi Murni SD/MI	✓	✓	✓	✓	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	46.727.489.410
		APM SMP/MTs	93,36	Menghitung Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	✓	✓	✓	✓		
14	Mengembangkan pendidikan anak usia dini (PAUD) untuk mencetak landasan yang kokoh bagi penguatan SDM	Jumlah siswa pada jenjang TK/RA	3251	Menghitung total jumlah siswa jenjang TK/RA	✓	✓	✓	✓		
16	Tersedianya akses kesehatan bagi masyarakat	Rasio Posyandu per satuan balita (/1.000)	12,88	Menghitung rasio posyandu persatuan penduduk	✓	✓	✓	✓	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	79.439.120.012
		Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (/1.000).	0,91	Menghitung rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu persatuan penduduk	✓	✓	✓	✓	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.510.755.000
		Rasio RS per satuan penduduk(/1.000)	0,02	Menghitung rasio Rumah Sakit persatuan penduduk	✓	✓	✓	✓	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	96.000.000
		Rasio dokter per satuan penduduk (/1000)	0,24	Menghitung Rasio Dokter persatuan penduduk	✓	✓	✓	✓	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	951.851.000

17	Meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan di seluruh wilayah Buru Selatan	Jumlah rumah tangga bersanitasi	52,93	Menghitung jumlah rumah tangga bersanitasi	✓	✓	✓	✓	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	23.438.550.000
18	Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata	Pengembangan objek wisata unggulan	1	Menghitung total pengembangan objek wisata unggulan	✓	✓	✓	✓	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	864.550.000
19	Pengembangan potensi pariwisata daerah secara professional.	Tersedianya SDM professional dibidang pariwisata	6	Menghitung total SDM professional dibidang pariwisata	✓	✓	✓	✓	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	36.350.000
									PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	359.305.000
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	247.850.000
20	Mendorong aktivitas keagamaan yang bersinergi dengan budaya lokal.	Rasio tempat ibadah per 1000 penduduk	1,68	Menghitung rasio tempat ibadah persatuan penduduk	✓	✓	✓	✓	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9.754.300.000
21	Peningkatan harkat dan martabat serta kualitas hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	1	Menghitung jumlah sarana sosial	✓	✓	✓	✓	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	61.970.000
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	48.140.000
									PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	952.192.700
									PROGRAM PENANGANAN BENCANA	80.424.000
22	Terwujudnya tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas KKN	Indeks Reformasi Birokrasi	100	Menghitung persentasi indeks Reformasi Birokrasi	✓	✓	✓	✓	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	2.794.984.800

									PEMBANGUNAN DAERAH	
23	Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah dalam menjalankan fungsinya secara efektif dan profesional	Pesentase kinerja ASN	100	Menghitung persentase kinerja ASN	✓	✓	✓	✓	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	574.589.200
24	Mengoptimalkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur serta kualitas layanan yang prima.	Pesentase disiplin ASN	100	Menghitung persentase disiplin ASN	✓	✓	✓	✓	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	409.629.000
25	Menyederhanakan alur birokrasi dengan sistem satu atap guna meningkatkan pelayanan publik yang efisien dan efektif	Dokumen SOP pelayanan satu atap	100	Menghitung total Dokumen SOP pelayanan satu atap	✓	✓	✓	✓	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	580.691.500
26	Melakukan praktek pengelolaan keuangan daerah yang adil, transparan	Indeks persepsi korupsi	Tersedia	Menghitung indeks persepsi korupsi	✓	✓	✓	✓	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	194.619.000
									PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	332.825.000
									PROGRAM PENCATATAN SIPIL	78.700.000
									PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	15.940.000
									PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	133.732.495.146
									PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	662.409.000

									PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.389.980.000
									PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.670.000.000
									PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	316.022.100
									PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	141.050.000
									PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	155.815.000
									PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	110.764.000
									PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	10.992.739.696
									PRGRAM PENGELOLAAN ARSIP	94.150.000
									PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	86.402.541.853

Namrole, Maret 2024

BUPATI BURU SELATAN

SAFITRI MALIK SOLISA